PDRB

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

DISKOMINFO

PER KECAMATAN
KABUPATEN CIREBON

MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2019

KERJA SAMA
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

P D R B

(PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO)

PER KECAMATAN
KABUPATEN CIREBON

MENURUT LAPANGAN USAHA

Tim Penyusun

1. Dr. H. Amran Jaenudin, Ir., M.S
2. Ida Setya Wahyu Atmaja, S.P., M.Si.
3. Ferry Ferdianto, S.T., M.Pd.
4. Farida Mardhatilla, S.Pt., M.Si.
5. Dr. Kartono, S.E., M.Si
6. Firman Hidayat, S.E., M.Si
7. Ramlah Puji Astuti, S.E., M.Si.
8. Agi Syarif, S.E., M.M
9. Ayatullah Michael Musyaffi, S.E., Ak., M.Ak. CA

Penerbit

FKIP UNSWAGATI PRESS
Sarana Eksplorasi Ilmu

P D R B (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO) PER KECAMATAN KABUPATEN CIREBON
MENURUT LAPANGAN USAHA

Penulis:

1. Dr. H. Amran Jaenudin, Ir., M.S
2. Ida Setya Wahyu Atmaja, S.P., M.Si.
3. Ferry Ferdianto, S.T., M.Pd.
4. Farida Mardhatilla, S.Pt., M.Si.
5. Dr. Kartono, S.E., M.Si
6. Firman Hidayat, S.E., M.Si
7. Ramlah Puji Astuti, S.E., M.Si.
8. Agi Syarif, S.E., M.M
9. Ayatullah Michael Musyaffi, S.E., Ak., M.Ak. CA

ISBN
978–602–71252–8–5

Editor

1. Ida Setya Wahyu Atmaja, S.P., M.Si.
2. Ferry Ferdianto, S.T., M.Pd.
3. Firman Hidayat, S.E., M.Si
4. Farida Mardhatilla, S.Pt., M.Si.

Sampul dan Tata Letak :
Ferry Ferdianto, S.T., M.Pd.

Penerbit
FKIP Unsagati Press

Redaksi
Jl. Perjuangan No 1 Cirebon
Kampus II Universitas Swadaya Gunung Jati
Telp. (0231) 487249 – 482115
Kode pos 45132
Email : fkipunswagatipress@unswagati.ac.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR
KEPALA LEMBAGA INOVASI DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia pada seluruh alam raya. Berkat izin dan ridhanya buku "Laporan Akhir Produk Domestik Bruto (PDRB) Kecamatan di Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019" dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tertuju pada contoh suri tauladan untuk semua umat Nabi Muhammad saw.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku "Laporan Akhir Produk Domestik Bruto (PDRB) Kecamatan di Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha Tahun 2019".

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, maka kami membutuhkan saran untuk perbaikan kedepan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kami selaku penulis maupun pembaca pada umumnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Cirebon, November 2020
Kepala Lembaga Inovasi dan Pengembangan
Universitas Swadaya Gunung Jati

H. Amran Jaenudin, Ir., M.S.
Pembina Utama Muda
NIP 19570821 198711 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sasaran	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Lokasi Kegiatan	3
1.7 Sumber Pendanaan	3
1.8 Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung	3
1.9 Rencana Kerja	3
1.10 Lingkup Pekerjaan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pembangunan	5
2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8
2.3 Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB	15
2.4 Kependudukan dan Ketenagakerjaan	20
BAB III METODOLOGI	24
3.1 Sumber Data	24
3.2 Analisis PDRB	25
3.3 Pendapatan Per Kapita	27
3.4 Penyajian Angka Indeks	27
BAB IV KINERJA PEREKONOMIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 – 2018	30
4.1 Pertumbuhan Ekonomi	30
4.2 Pertumbuhan Sektoral	31
4.4 PDRB Perkapita / Pendapatan Perkapita	34
BAB V TINJAUAN PEREKONOMIAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON	36
5.1 Analisa Antar Regional	36
5.2 PDRB Perkapita	63
5.3 Analisis PDRB per Kecamatan	66
5.4 Korelasi PDRB dengan Sektor Unggulan	72
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Rekomendasi	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rincian Sampel PDRB	24
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon dan Sekitarnya Tahun 2014-2019 (persen)	30
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Persen) Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha	31
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Dirinci Menurut Kategori Tahun 2019 (Persen)	33
Tabel 4.4 PDRB Perkapita Kabupaten Tahun 2014 – 2019 (Juta Rupiah)	34
Tabel 5.1. Perubahan Peringkat PDRB Per Kecamatan Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 dan 2019	37
Tabel 5.2 Peranan/Distribusi Kategori Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	39
Tabel 5.3 Peranan/Distribusi Kategori Industri Pengolahan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	42
Tabel 5.4. Peranan/Distribusi Kategori Konstruksi per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	43
Tabel 5.5 Peranan/Distribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	45
Tabel 5.6. Peranan/ Distribusi Kategori Transportasi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	47
Tabel 5.7 Peranan/Distribusi Kategori Pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	49
Tabel 5.8 Peranan/Distribusi Kategori Jasa Keuangan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	51
Tabel 5.9 Peranan/Distribusi Kategori Akomodasi dan Makan Mper Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	53
Tabel 5.10 Peranan/Distribusi Kategori Administrasi Pemerintahan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	55
Tabel 5.11. Peranan/Distribusi Kategori Jasa Lainnya per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	57
Tabel 5.12. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019	58
Tabel 5.13. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019	59
Tabel 5.14. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019	60
Tabel 5.15 Potensi Kecamatan berdasarkan Sektor PDRB	61
Tabel 5.16 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019	65
Tabel 5.17 Korelasi PDRB dengan Sektor Unggulan	34

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon dan Sekitarnya Propinsi jawa Barat Tahun 2014-2019 (persen)	70
Lampiran 2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Persen)	71
Lampiran 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Dirinci Menurut Kategori Tahun 2019 (Persen)	72
Lampiran 4.	PDRB Per Kapita Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)	73
Lampiran 5.	Perubahan Peringkat PDRB Per Kecamatan Kabupaten Cirebon Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2018 dan 2019	74
Lampiran 6.	Peranan/Distribusi kategori Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	75
Lampiran 7.	Peranan/Distribusi Kategori Industri Pengolahan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	76
Lampiran 8.	Peranan/Distribusi Kategori Konstruksi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	77
Lampiran 9.	Peranan/Distribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	78
Lampiran 10.	Peranan/Distribusi Kategori Transportasi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	79
Lampiran 11.	Peranan/Distribusi Kategori Pendidikan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	80
Lampiran 12.	Peranan/Distribusi Kategori Keuangan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	81
Lampiran 13.	Peranan/Distribusi Kategori Akomodasi dan Makan Minum Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	82
Lampiran 14.	Peranan/Distribusi Kategori Administrasi Pemerintahan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	83
Lampiran 15.	Peranan/Distribusi Kategori Jasa Lainnya Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	84
Lampiran 16.	Peranan/Distribusi Kategori Pertambangan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	85
Lampiran 17.	Peranan/Distribusi Kategori Listrik dan Gas Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	86
Lampiran 18.	Peranan/Distribusi Kategori Air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan Daur Ulang Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	87
Lampiran 19.	Peranan/Distribusi Kategori Informasi dan Komunikasi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	88
Lampiran 20.	Peranan/Distribusi Kategori Real Estate Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019	89

Lampiran 21. Peranan/Distribusi Kategori Jasa Perusahaan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 90
Lampiran 22. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019 91
Lampiran 23. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019 94
Lampiran 24. PDRB Kecamatan Arjawinangun 102
Lampiran 25. PDRB Kecamatan Astanajapura 103
Lampiran 26. PDRB Kecamatan Babakan 104
Lampiran 27. PDRB Kecamatan Beber 105
Lampiran 28. PDRB Kecamatan Ciledug 106
Lampiran 29. PDRB Kecamatan Ciwaringin 107
Lampiran 30. PDRB Kecamatan Depok 108
Lampiran 31. PDRB Kecamatan Dukupuntang 109
Lampiran 32. PDRB Kecamatan Gebang 110
Lampiran 33. PDRB Kecamatan Gegesik 111
Lampiran 34. PDRB Kecamatan Gempol 112
Lampiran 35. PDRB Kecamatan Greged 113
Lampiran 36. PDRB Kecamatan Gunungjati 114
Lampiran 37. PDRB Kecamatan Jamblang 115
Lampiran 38. PDRB Kecamatan Kaliwedi 116
Lampiran 39. PDRB Kecamatan Kapetakan 117
Lampiran 40. PDRB Kecamatan Karangsembung 118
Lampiran 41. PDRB Kecamatan Karangwareng 119
Lampiran 42. PDRB Kecamatan Kedawung 120
Lampiran 43. PDRB Kecamatan Klangenan 121
Lampiran 45. PDRB Kecamatan Lemahabang 122
Lampiran 46. PDRB Kecamatan Losari 123
Lampiran 47. PDRB Kecamatan Mundu 124
Lampiran 48. PDRB Kecamatan Pabedilan 125
Lampiran 49. PDRB Kecamatan Pabuaran 126
Lampiran 50. PDRB Kecamatan Palimanan 127
Lampiran 51. PDRB Kecamatan Pangenan 128
Lampiran 52. PDRB Kecamatan Panguragan 129
Lampiran 53. PDRB Kecamatan Pasaleman 130
Lampiran 54. PDRB Kecamatan Plered 131
Lampiran 55. PDRB Kecamatan Plumbon 132
Lampiran 56. PDRB Kecamatan Sedong 133
Lampiran 57. PDRB Kecamatan Sumber 134
Lampiran 58. PDRB Kecamatan Suranenggala 135
Lampiran 59. PDRB Kecamatan Susukan 136
Lampiran 60. PDRB Kecamatan Susukan Lebak 137
Lampiran 61. PDRB Kecamatan Talun 138
Lampiran 62. PDRB Kecamatan Tengah Tani 139
Lampiran 63. PDRB Kecamatan Waled
Lampiran 64. PDRB Kecamatan Weru

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator makro ekonomi sebuah Kabupaten/Kota bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah telah berada pada garis tren yang baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa beberapa kategori lapangan usaha ekonomi perlu dijaga kapabilitas peningkatannya. Sementara kategori lapangan usaha lain masih membutuhkan perhatian untuk menemukan tuas pendongkrak pertumbuhan. Indikator makro ekonomi Kabupaten/Kota lainnya, yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan serta iklim investasi mengindikasikan kondisi yang kondusif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur agregasi produktivitas ekonomi atau nilai tambah ekonomi seluruh kategori lapangan usaha ekonomi suatu wilayah. Nilai absolut PDRB di Kabupaten/kota dari tahun ke tahun diharpkan selalu meningkat, baik menurut harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

Capaian kondisi pembangunan Kabupaten Cirebon yang di satu sisi mengindikasikan keberhasilan namun di sisi lain masih sulit untuk dientaskan menarik untuk selalu diteliti, ditelusuri, dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Hal ini yang mendasari bahwa analisis PDRB penting untuk dilakukan untuk dapat memantau perkembangan ekonomi secara sektoral, maupun dari sisi pola pengeluaran, serta melihat perkembangan beberapa indikator sosial, sehingga diharapkan dari analisis ini dapat menjadi salah satu alat analisis kebijakan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan Kabupaten Cirebon yang lebih maju dan tepat sasaran.

1.2 Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pmbangunan Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.183-Diskominfo/2020 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Bruto (PDRB) Kecamatan Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Kabupaten Cirebon 2019 adalah memperoleh data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

1.3.2 Tujuan

Tujuan pekerjaan Penyusunan Analisis Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 adalah:

a. Mengetahui struktur dan dinamika ekonomi Kabupaten Cirebon tahun 2019;
b. Menyediakan angka dan indeks turunan PDRB Kabupaten Cirebon dan Kecamatan 2019;
c. Menyediakan hasil analisis sektoral PDRB Kabupaten Cirebon dan antar wilayah kecamatan tahun 2019 menurut kategori dan subkategori lapangan usaha;
d. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan validitas implementasi program pembangunan.

1.4 Sasaran

Data PDRB Kabupaten Cirebon Tahun 2019 menurut lapangan usaha dan

menurut penggunaan dilengkapi data pendukung lain yang terkait, serta indikator ekonomi sosial lainnya.

1.5 Manfaat

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB Kabupaten Cirebon 2019 adalah pilihan rekomendasi kebijakan hasil analisis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon ke depan.

1.6 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon.

1.7 Sumber Pendanaan

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Kabupaten Cirebon 2019 seluruhnya dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi & Informasi (Kominfo) Kabupaten Cirebon.

1.8 Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung

Dalam pelaksanaan Analisis PDRB Kabupaten Cirebon 2019 ini menggunakan tenaga ahli dan pendukung yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah: 10 orang terdiri dari unsur pimpinan di Sekretariat Daerah dan Diskominfo Kabupaten Cirebon;
2. Tim Pelaksana: 9 orang dari dosen dari Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) yang berpendidikan S3, dan S2.
3. Tim tenaga surveyor: 55 orang dari Lembaga Inovasi & Pengembangan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ).

1.9 Rencana Kerja

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan Analisis PDRB Kabupaten Cirebon 2019, urutannya sebagai berikut:

1. Pemrosesan berkas-berkas Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
2. Penyusunan Metodologi Analisis;
3. Pengumpulan data sekunder;
4. Tabulasi dan pengolahan data;

5. Analisis dan penyajian;
6. Penyerahan Draft hasil kajian.

1.10 Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Penyusunan Analisis PDRB Kabupaten Cirebon 2019, meliputi:

1. Menyediakan angka PDRB Kabupaten Cirebon dan di Kecamatan se-Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha;
2. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut lapangan usaha tahun 2019;
3. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Kecamatan di Kabupaten Cirebon tahun 2019;

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan

Konsepsi Pembangunan

Konsep pembangunan di tahun 1970-an yang cukup populer adalah yang didefinisikan oleh Portes (1970), yang mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)".

Situasi lingkungan juga mempengaruhi konsepsi pembangunan yang muncul. Di era tahun 1990-an, Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana". Konsepsi mengenai pembangunan juga dikemukakan Alexander (1994), yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, maka makna terpenting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Pembangunan Kewilayahan

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu negara maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga mempunyai kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Pembahasan pembangunan ekonomi secara nasional dititikberatkan pada analisis ekonomi makro, sementara pembahasan pembangunan ekonomi di tingkat wilayah membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam suatu ruang ekonomi (*economic space*) tertentu (Sukirno, 1976).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan atau kesempatan kerja baru serta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Blakely, 1989 dalam Mudrajat Kuncoro, 2004, 110). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi lain dari kedua UU tersebut yaitu adanya bagian pemberian kewenangan urusan, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Terkait dengan urusan pembiayaan, makna terpenting adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber daya potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kemajuan daerah lebih cepat tercapai.

Pembangunan suatu daerah juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Hoover dan Fisher (Nurcahyani, 2001) menyebutkan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi regional, meliputi: pertama, ekonomi subsisten. Dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-sehari. Kehidupan penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan pengumpulan hasil-hasil alamnya.

Kedua, pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal. Pada tahap kedua ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana maupun sarana transportasi yang mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasilokasi tertentu. Di kalangan masyarakat petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian dimana hasil

produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian bersangkutan.

Ketiga, perdagangan antardaerah. Hal ini terjadi karena telah terdapat perbaikan dalam bidang transportasi dan terjadi perubahan-perubahan di sektor kegiatan dari arah produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititikberatkan ke intensifikasi. Hasil sampingannya juga dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk kegiatan industri pedesaan.

Keempat, industrialisasi. Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi dari peningkatan produksi pertanian dan produksi ekstraktif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja yaitu melalui industrialisasi yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri-industri manufaktur serta pertambangan dan galian.

Kelima, spesialisasi daerah. Dalam tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi kegiatan, baik barang dan jasa-jasa untuk keperluan penjualan ke daerah lain yang termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya.

Keenam, aliran faktor produksi antardaerah. Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhimya meningkatkan tingkat mobilisasi faktor produksi antardaerah.

Di awal era otonomi daerah, permasalahan pokok pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Bila dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan kurang akurat maka permasalahan ini berlarut-larut dan menyebabkan kemajuan perekonomian daerah berjalan di tempat. Energi sumber daya dan pembiayaan pembangunan yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk implementasi lanjut bagi pengembangan potensi daerah masih berkutat untuk menentukan skala prioritas kebijakan.

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi

daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Boediono (1999, 1), faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.1 Definisi PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

2.2.2 Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Pengangkutan dan Pergudangan; ; I. Pengangkutan dan Komunikasi; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

2.2.3 Metode Penghitungan

a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga

kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan). Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

c. Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

d. Ekstrapolasi

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing- masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2000. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2000, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

e. Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

f. Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

2.2.4 Turunan PDRB

a. PDRB atas dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

c. PDRN atas dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi

pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

e. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 9 (sembilan) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 9 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam **Sektor Primer.** Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam **Sektor Sekunder**. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai **Sektor Tersier**.

f. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut penggunaan terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba),

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil pengolahan SUSENAS BPS Kabupaten Cirebon. Sementara untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi (harga konsumen) diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS Kabupaten Cirebon.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3 dari BPS. Apabila diteliti lebih jauh maka pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya.

Subsidi tidak dimasukkan, karena pengeluarannya merupakan transfer.

Kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah dan tidak termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk berproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB dibedakan atas pembentukan modal dalam bentuk bangunan/kontruksi, pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan/kendaraan, dan pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTDB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing pelaku usaha (9 sektor). Sementara kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang (*commodity flows*).

Pengertian inventori adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Perubahan inventori/stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai inventori/ stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan).

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

2.3 Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah terlalu bermakna. Namun meraih keduanya secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Para ekonom pun punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Mengorbankan pemerataan seringkali diperlukan guna meraih pertumbuhan, kata para ekonom penganut aliran capital fundamentalism. Pertumbuhan hanya bisa berlangsung ketika ketimpangan justru eksis dalam masyarakat, terutama pada fase awal pembangunan, kata ekonom Simon Kuznets, 60 tahun lampau.

Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitmen Rostow (1916-1979) yang juga diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru telah menimbulkan permasalahan kesenjangan pendapatan yang menganga. Di samping itu tahapan pembangunan juga telah menimbulkan kesenjangan sosial dan afiliasi politik yang berujung terjadinya krisis ekonomi dan sosial di tahun 1998.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (stagnasi). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang

digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut Sukirno (1997), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Todaro (2000) mengatakan, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kondisi demikian akan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Dimana peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sedangkan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

2.3.2 Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya

ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan untuk memilih. Pendiri ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo (dalam Lipsey,1985), sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga faktor produksi : tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat. Smith dan Ricardo tertarik pada apa yang menentukan pendapatan masing-masing kelompok dari pendapatan nasional, dan bagaimana suatu pertumbuhan dalam pendapatan nasional mempengaruhi distribusi pendapatan ini. Teori ini meramalkan bahwa kalau masyarakat mengalami perkembangan tuan tanah akan menjadi makmur dan kapitalis akan menjadi semakin melarat.

Disparitas antarwilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastuktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti

pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Menurut Yadiansyah (2007), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar daerah di Indonesia adalah, yang pertama: konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Pola distribusi nilai tambah industri antar daerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di Pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 1996).

Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarpulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tanaga kerja dan modal antardaerah. Keempat, yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran"klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah di luar Jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima, adalah perbedaan kondisi demografis antardaerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antardaerah. Ketidaklancaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

2.3.3 Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan

dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antargolongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antardaerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antaradaerah perkotaan dan daerah pedesaan bisa dilihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari dua indikator, yaitu: perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan pedesaan dan disparitas dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antarakedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antardaerah.

Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis "*development gap*" atau "disparitas" antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu:

a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota.
b. Konsumsi rumah tangga per kapita.

   Asumsi yang digunakan untuk menganalisis komsumsi rumah tangga per kapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah.
c. *Human Development Index.*

   Asumsi semakin baik pembangunan di wilayah, maka semakin tinggi HDInya.
d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB.

   Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan.
e. Struktur Fiskal.

   Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil perkapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (PAD asli) juga tinggi.

   Selain itu, menurut Tambunan (2001), distribusi pendapatan akan naik

sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pengsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

2.4 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2.4.1 Kependudukan

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap. *Tahap Pertama,* adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama- sama tinggi. Pada *tahap kedua,* karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga,* penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakt akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah (Susanti, 1995).

Apabila proses transisi demografi dikaitkan dengan proses peningkatan pendapatan perkapita, maka pada awal proses pembangunan peningkatan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan penurunan angka kematian yang begitu cepat daripada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kematian yang cepat ini disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan

pendapatan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat ini juga akan menyebabkan penerimaan pajak pemerintah meningkat, dan hal ini tentu saja memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akibat lain dari penurunan angka kematian yang lebih cepat daripada penurunan angka kelahiran adalah tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia tua pada struktur penduduk menurut umur, akibat dari hal ini adalah jumlah penduduk yang hidupnya ditanggung oleh penduduk usia kerja menjadi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita, perubahan pada aspek sosial- ekonomi dan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kelahiran juga akan turun dengan cepat. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk menurun dan dengan sendirinya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja akan menurun.

2.4.2 Ketenagakerjaan

Menurut konsep BPS, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat pengangguranya adalah kurang dari 4 persen.

Menurut Tambunan (1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), tenaga kerja adalah usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

Sedangkan menurut Ananta (1990), tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja ini terdiri dari yang benar-benar beerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Thomas Robert Malthus dalam Albert WS Kusen (2013), menyebutkan bahwa ukuran pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika Pendapatan Nasional Bruto (PNB) potensialnya meningkat. Sektor yang paling dominan adalah sektor industri dan pertanian. Jika output di kedua sektor itu ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa di tingkatkan. Menurut Thomas Robert Malthus ada dua faktor yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi; dan juga faktor nonekonomis seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Tetapi, diantara faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal.

Meski relasi antara pertumbuhan dan ketimpangan telah memicu debat panjang para ahli, namun tetap ada keinginan kuat untuk ”mengawinkan” keduanya. Oleh karena kompleksivitasnya permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ini, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan sejumlah

gagasan konseptual agar implikasi pembangunan lebih baik, mulai dari *redistribution with growth, the quality of growth, broad-based growth, pro-poor growth*, hingga *inclusive growth*. Analisis PDRB ini hanya berfokus membahas tentang konsep kualitas pertumbuhan (*the qualitiy of growth*).

BAB III
METODOLOGI

3.1 Sumber Data

Sumber data survey PDRB tahun 2020 yaitu berupa data primer yang dilakukan di 40 kecamatan Kabupaten Cirebon dengan jumlah sampel pelaku usaha di 17 sektor sebanyak 4400 sampel. Adapun rincian sampel dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Rincian Sampel PDRB

No	Sektor PDRB	Sampel	Persentase
1	Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	492	11.20%
2	Pertambangan dan Penggalian	61	1.40%
3	Industri Pengolahan	502	11.40%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	49	1.10%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	141	3.20%
6	Konstruksi	202	4.60%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	344	7.80%
8	Transportasi dan Pergudangan	106	2.40%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365	8.30%
10	Informasi dan Komunikasi	136	3.10%
11	Jasa Keuangan	202	4.60%
12	Real Estate	207	4.70%
13	Jasa Perusahaan	163	3.70%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	471	10.70%
15	Jasa Pendidikan	431	9.80%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387	8.80%
17	Jasa lainnya	141	3.20%
	Total Sampel	4400	100%

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sampel yang digunakan sebanyak 4400 sampel yang tersebar di 40 kecamatan Kabupaten Cirebon. Sampel-sampel tersebut dipilih secara acak dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling bertujuan agar dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih representative sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukannya penelitian

3.2 Analisis PDRB

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi produk (output) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa jasa dsb, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto.

Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (*value added*) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Di dalam literatur ekonomi terdapat perbedaan pengertian produk domestik dengan produk regional, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari kegiatan produksi yang dilakukan di suatu daerah/wilayah, beberapa faktor produksinya berasal dari daerah/wilayah lain, seperti tenaga kerja, mesin/alat bahkan modal untuk investasi, dengan demikian nilai produksi di daerah/wilayah atau domestik tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut.

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar daerah/wilayah.Atau dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur) yang dimiliki penduduk daerah/wilayah yang bersangkutan. Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu daerah/wilayah, maka antara produk domestik dengan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama.

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) atau *at current nominal prices* yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah yang menghasilkan output pada suatu perionde waktu yang dinilai atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar berlaku digunakan untuk melihat struktur

perekonomian atau peranan setiap sektor dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan.PDRB atas dasar harga konstan atau *at constant prices* digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.

3.2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (*gross value added*) dari seluruh sektor perekonomian di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun.

Nilai tambah adalah selisih nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate input*). Nilai Tambah Bruto (NTB) mencakup komponen faktor produksi; upah dan gaji, bunga, modal, sewa tanah, keuntungan, penyusutan, serta pajak tak langsung neto.Faktor pendapatan adalah merupakan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*), tanah (*land*), managerial (*entrepreneur*). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode pengitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Penghitungan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari sisi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi dengan demikian nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada pengunaan akhir dari barang dan jasa. Nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional. Pengeluaran akhir/permintaan akhir adalah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba/lembaga yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

Sementara itu, untuk perhitungan PDRB metode tidak langsung dengan cara mengalokasikan nilai tambah bruto propinsi ke masing-masing kegiatan ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Sebagai alokatornya digunakan indikator yang paling relevan atau erat kaitannya dengan produktivitas/ pendapatan dari kegiatan sektor tersebut.

3.3 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk.Pendapatan per kapita tersebut diperoleh dengan membagi pendapatan regional/produk regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

3.4 Penyajian Angka Indeks

Angka indeks pada dasarnya merupakan suatu nilai atau angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapatdigunakan untuk melakukan perbandingan antara suatu nilai/harga/volume/kualitas selama satu periode waktu tertentu.

Ciri khas dari angka indeks ini adalah perhitungan rasio (pembagian), di

mana hasil rasio tersebut selalu dikalikan dengan bilangan 100 untuk menunjukkan perubahan tersebut dalam persentase. Dengan demikian, basis dari angka indeks apapun selalu
100.

3.4.1 Indeks Perkembangan

Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan pen-dapatan/perekonomian dari tahun ke tahun yang dibandingkan dengan tahun dasar.Indeks tersebut diperoleh dengan membagi nilai agregat pendapatan masing-masing tahun dengan nilai tahun dasar dikalikan 100. Indeks perkembangan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} x100$$

Keterangan : IP : Indeks Perkembangan
i : Sektor 1, …Sektor 17
t : Tahun t
0 : Tahun dasar

3.4.2 Indeks Berantai

Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan atau yang lebih populer dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).Pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah ditunjukkan oleh indeks berantai atas dasar harga konstan.Indeks tersebut diperoleh dengan membagi masing-masing agregat pendapatan dengan tahun sebelumnya dikalikan 100.Indeks berantai tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IB = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i(t-1)}} x100$$

Keterangan : IB : Indeks Berantai
i : Sektor 1, …Sektor 17
t : Tahun t
t-1 : Tahun sebelumnya

3.4.3 Indeks Implisit

Indeks ini merupakan indikator tingkat perkembangan harga dibandingkan harga pada tahun dasar. Bila dari data ini disusun indeks berantainya akan menunjukkan perkembangan harga dari tahun ke tahun secara makro. Indeks implisit ini diperoleh dengan cara membagi agregat harga berlaku dengan harga konstan pada tahun yang sama, dikalikan 100. Indeks implisit tersebutdirumuskan sebagai berikut:

$$IH = \frac{PDRB\ HB_{it}}{PDRB\ HK_{io}} x100$$

Keterangan : IH : Indeks Implisit
HB : Harga Berlaku
HK : Harga Konstan

BAB IV
KINERJA PEREKONOMIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 – 2018

4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat dijadikan salah satu indicator pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki serta peran sector swasta yang menciptakan lapangan kerja baru. Tabel 4.1 di bawah menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dan Kabupaten sekitarnya.

Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon dan Sekitarnya Tahun 2014-2019 (persen)

Kabupaten / Kota / Propinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
	2 014	2 015	2 016*	2 017**	2 018***	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Cirebon	5,07	4,88	5,63	5,06	5,02	4,86
Kabupaten Kuningan	6,33	6,38	6,09	6,36	6,43	6,56
Kabupaten Majalengka	5,47	5,34	6,08	6,89	6,13	7,14
Kabupaten Indramayu	5,87	4,62	5,65	3,19	4,62	3,20
Kota Cirebon	5,71	5,81	6,09	5,80	6,21	6,29
Propinsi Jawa Barat	5,09	5,05	5,66	5,35	5,64	5,07

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon mengalami fluktuatif sejak tahun 2014 hingga 2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 (5.63%) sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 mengalami titik pertumbuhan terendah sejak tahun 2014, yaitu sebesar 4.86%. selain Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 (3.20%) dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 4.62%. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka adalah yang tertinggi sejak tahun 2014 hingga 2019 yaitu sebesar 7.14%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 disumbang cukup signifikan oleh penurunan ekonomi pada beberapa kategori, yaitu diantaranya pada kategori : pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa

perusahaan; jasa Pendidikan; jasa Kesehatan dan kegiatan social; dan jasa lainnya. Namun, pada kategori-kategori seperti : pertanian, kehutanan dan perikanan; industry pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; trasportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Persen) Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.26	-3.51	6.03	1.52	2.25	-0.87
B	Pertambangan dan Penggalian	4.33	0.48	-2.45	0.33	2.48	-3.32
C	Industri Pengolahan	4.95	5.30	5.81	5.07	5.15	1.56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.47	3.37	6.53	9.03	2.50	7.10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.28	4.89	5.28	7.71	4.60	6.75
F	Konstruksi	5.15	8.07	4.92	4.31	6.98	6.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.26	3.42	3.59	4.41	3.25	4.76
H	Transportasi dan Pergudangan	8.49	8.72	7.39	6.35	5.89	9.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.20	3.56	3.94	7.70	2.74	5.61
J	Informasi dan Komunikasi	12.69	13.37	10.58	9.58	9.01	6.59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.34	12.41	9.77	4.91	7.08	8.80
L	Real Estate	5.38	4.21	4.52	9.73	8.78	9.27
M,N	Jasa Perusahaan	8.65	7.76	8.97	9.40	8.57	9.28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.53	3.88	2.14	0.40	2.07	3.75
P	Jasa Pendidikan	13.80	10.36	6.29	9.53	7.81	12.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.53	10.60	8.78	7.77	7.32	11.58
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.69	9.45	8.17	9.44	6.07	8.44
	Jumlah	5.07	4.87	5.63	5.06	5.02	4.86

4.2 Pertumbuhan Sektoral

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berdasarkan kategori dapat dibagi menjadi beberapa kelompok seperti yang tersaji pada Tabel 3. Adapun kategori tersebut antara lain :

1. Kelompok kategori dengan laju pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, yaitu kelompok kategori yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi diatas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon sebesar 4.86% dan diatas 8%, yaitu kategori :
   a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
   b. Industri Pengolahan

c. Konstruksi
d. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
e. Trasportasi dan Pergudangan

2. Kelompok kategori dengan laju pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu kelompok kategori yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi diatas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon sebesar 4.86% tapi dibawah 8%, yaitu kategori :
   a. Jasa Pendidikan
3. Kelompok kategori dengan laju pertumbuhan ekonomi sedang, yaitu kelompok kategori yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon sebesar 4.86% dan diatas 0%, yaitu kategori :
   a. Pertambangan dan Penggalian
   b. Pengadaan Listrik dan Gas
   c. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
   d. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
   e. Informasi dan Komunikasi
   f. Jasa Keuangan dan Asuransi
   g. Real Estate
   h. Jasa Perusahaan
   i. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
   j. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
   k. Jasa lainnya
4. Kelompok kategori dengan laju pertumbuhan ekonomi rendah, yaitu kelompok kategori yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon sebesar 4.86% dan diatas 0%, tidak ada.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Dirinci Menurut Kategori Tahun 2019 (Persen)

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		2019	Kelompok Kategori
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,20	Sangat Tinggi
B	Pertambangan dan Penggalian	1,06	Sedang
C	Industri Pengolahan	20,35	Sangat Tinggi
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	Sedang
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, L	0,10	Sedang
F	Konstruksi	11,76	Sangat Tinggi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Repara	15,44	Sangat Tinggi
H	Transportasi dan Pergudangan	8,49	Sangat Tinggi
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Min	3,49	Sedang
J	Informasi dan Komunikasi	2,28	Sedang
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	Sedang
L	Real Estate	2,30	Sedang
M,N	Jasa Perusahaan	0,90	Sedang
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	3,05	Sedang
P	Jasa Pendidikan	5,78	Tinggi
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	Sedang
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,70	Sedang
	Jumlah	**4,86**	

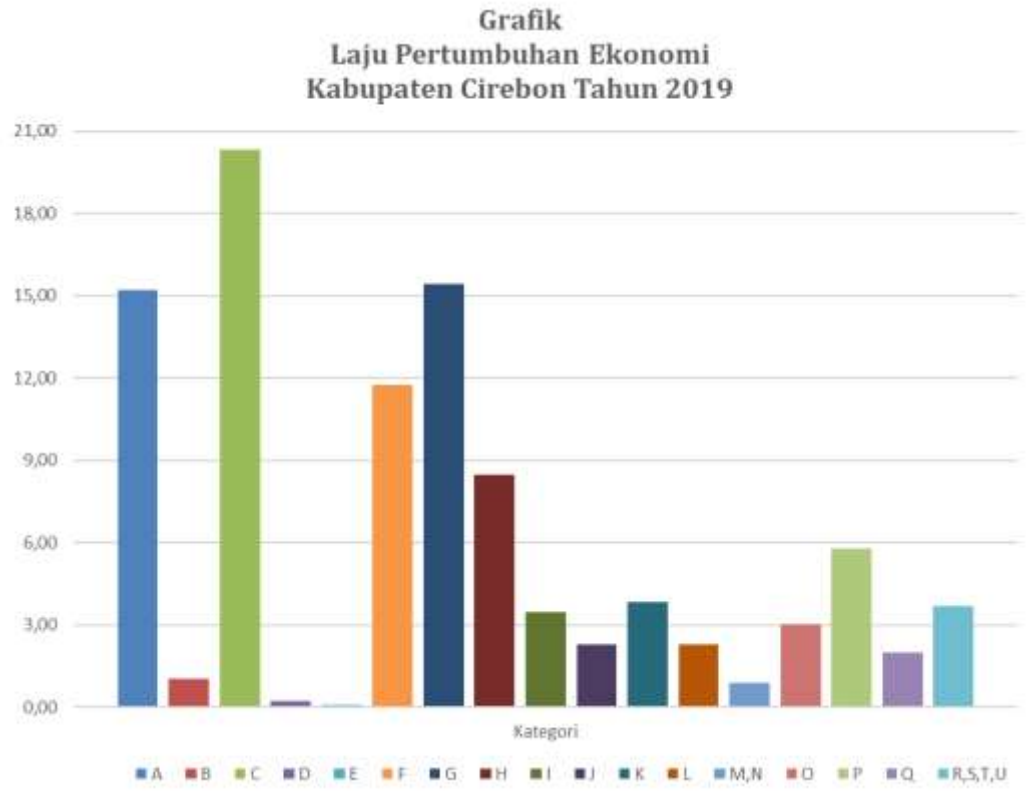

4.3 PDRB Perkapita / Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Cirebon merupakan pendapatan rerata setiap individu penduduk terhadap pendapatan Kabupaten Cirebon. Sedangkan pendapatan Kabupaten Cirebon diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dikurangi dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto dan ditambah arus pendapatan dari luar Kabupaten Cirebon.

PDRB perkapita Kabupaten Cirebon terus meningkat sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
PDRB Perkapita Kabupaten
Tahun 2014 - 2019 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHB per Kapita
2014	32.579.051,03	15,44
2015	35.734.651,33	16,81
2016	38.840.772,25	18,12
2017	41.919.286,13	19,41
2018	45.461.939,30	20,66
2019	49.639.012,37	22,06

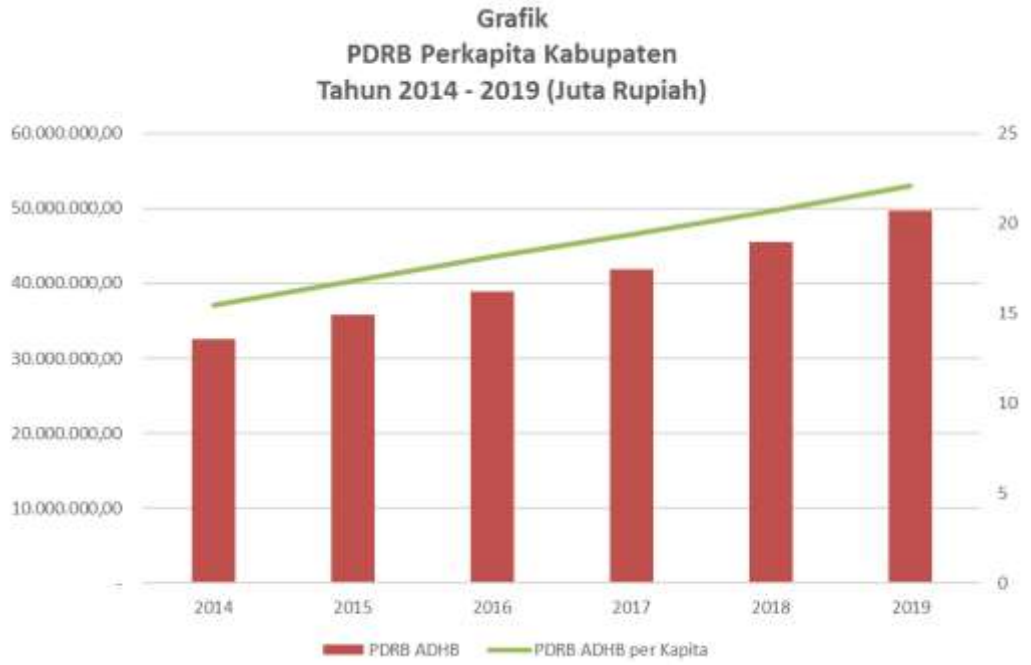

PDRB perkapita Kabupaten Cirebon Tahun 2019 sebesar 22.06 juta rupiah

bila dirinci menurut PDRB perkapita setiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.16.

BAB V
TINJAUAN PEREKONOMIAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON

5.1 Analisa Antar Regional

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Cirebon terbentuk dari berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi pada Kecamatan di Kabupaten Cirebon, termasuk PDRB Kabupaten Cirebon terbentuk dari PDRB seluruh Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Cirebon.

Oleh karena itu pengukuran atau penghitungan PDRB setiap Kecamatan sangat penting dilakukan setiap tahun agar dapat diperoleh PDRB Kabupaten Cirebon dan agar dapat diketahui pertumbuhan perekonomian dalam suatu wilayah.

5.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Antar Kecamatan

PDRB pada satu Kecamatan pada umumnya berbeda dengan PDRB pada Kecamatan lainnya. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap Kecamatan menjadi suatu proses produksi hingga menghasilkan produk pada Kecamatan tersebut.

Sumber daya yang dikelolah oleh suatu Kecamatan dapat berupa antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia (tenaga kerja), sumber daya modal (kapital), sumber daya sarana infrastruktur.

PDRB Kecamatan dapat berubah setiap tahunnya yang dapat dipengaruhi oleh factor internal (sumber daya) dan factor eksternal yang berasal dari luar Kecamatan tersebut. Berikut perubahan PDRB Kecamatan pada Kabupaten Cirebon yang disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Perubahan Peringkat PDRB Per Kecamatan Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 dan 2019

No	Kecamatan	2 018		2 019	
		PDRB ADHB (Milyar Rp)	Peringkat	PDRB ADHB (Milyar Rp)	Peringkat
1	Arjawinangun	1.688.925.358	7	1.806.788.775	7
2	Astanajapura	1.734.472.100	6	1.865.771.638	6
3	Babakan	1.014.978.380	20	1.071.512.676	24
4	Beber	610.673.080	35	644.687.571	37
5	Ciledug	1.073.378.460	16	1.133.165.640	18
6	Ciwaringin	777.024.030	29	820.304.268	30
7	Depok	2.324.172.180	3	2.502.470.352	3
8	Dukupuntang	1.187.707.400	11	1.253.862.702	13
9	Gebang	1.062.167.430	17	1.121.330.156	22
10	Gegesik	1.318.520.300	8	1.391.961.881	8
11	Gempol	705.038.300	31	744.308.933	33
12	Greged	477.061.831	39	538.192.345	39
13	Gunungjati	1.314.936.410	9	1.388.178.368	9
14	Jamblang	690.452.340	32	728.910.535	34
15	Kaliwedi	839.229.669	28	885.974.761	28
16	Kapetakan	1.183.478.988	12	1.321.258.558	10
17	Karangsembung	608.055.990	36	678.209.696	36
18	Karangwareng	607.883.060	37	678.827.617	35
19	Kedawung	1.029.936.323	19	1.156.810.402	16
20	Klangenan	860.822.389	26	959.992.305	26
21	Lemahabang	1.007.034.340	21	1.127.312.594	19
22	Losari	1.004.220.580	23	1.122.717.324	21
23	Mundu	1.031.752.104	18	1.145.313.428	17
24	Pabedilan	675.040.010	34	754.754.459	32
25	Pabuaran	844.533.150	27	938.692.958	27
26	Palimanan	2.768.822.080	2	3.058.991.330	2
27	Pangenan	897.857.375	25	1.001.079.021	25
28	Panguragan	1.192.463.020	10	1.301.828.692	11
29	Pasaleman	413.640.390	40	458.704.228	40
30	Plered	2.165.158.912	4	2.402.506.164	4
31	Plumbon	2.918.370.027	1	3.141.324.134	1
32	Sedong	748.043.397	30	835.685.795	29
33	Sumber	1.120.351.514	13	1.263.762.207	12
34	Suranenggala	965.567.210	24	1.078.685.420	23
35	Susukan	1.116.341.070	14	1.250.277.079	14
36	Susukan Lebak	680.612.212	33	762.997.002	31
37	Talun	1.094.534.102	15	1.217.744.984	15
38	Tengah Tani	1.005.644.021	22	1.126.249.781	20
39	Waled	565.391.980	38	625.782.984	38
40	Weru	2.105.820.340	5	2.332.083.608	5
	Kabupaten Cirebon	45,461,939.30		49.639.012.370	

Tabel 5.1 menunjukkan PDRB perkapita Kecamatan Plumbon sebesar 48.947 juta rupiah adalah PDRB perkapita Kecamatan yang tertinggi (peringkat 1) di Kabupaten Cirebon. Sedangkan PDRB perkapitan Kecamatan Greged adalah PDRB perkapita Kecamatan yang terrendah di Kabupaten Cirebon, yaitu sebesar

8.890 juta rupiah.

Adapun Kecamatan yang mengalami perubahan PDRB antaran lain Kecamatan : Babakan, Beber, Ciledug, Ciwaringin, Dukupuntang, Gebang, Gempol, Jamblang, Kapetakan, Karangwareng, Kedawung, Lemahabang, Losari, Mundu, Pabedilan, Panguragan, Sedong, Sumber, Suranenggala, Susukan Lebak, Tengah Tani.

5.1.2 Struktur / Komposisi Ekonomi

Perekonomian pada suatu Kecamatan memiliki struktur ekonomi yang ditopang oleh peranan kategori – kategori ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Peranan kategori ekonomi pada satu Kecamatan dapat mencerminkan dominasi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan tersebut, sehingga memunculkan karakteristik yang berbeda pada setiap Kecamatan. Contohnya, peranan kategori pertanian terbesar di Kabupaten Cirebon adalah Kecamatan Suranenggala, Kapetakan dan Pasaleman, dimana Kecamatan tersebut masih memiliki area lahan pertanian yang luas. Akan tetapi Kecamatan Plumbon dan Depok adalah Kecamatan yang memiliki peranan kategori industri pengolahan terbesar.

Secara umum, kategori pertanian; kategori industri pengolahan; kategori konstruksi; kategori perdagangan besar dan eceran; dan kategori transportasi memiliki peranan yang penting dalam pembentukan PDRB Kabupaten Cirebon.

Kategori Pertanian menyumbang 15.20% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019, sedikit turun dari tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 15.77%. Adapun Kecamatan Suranenggala merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (43.93%) untuk peranan kategori pertanian (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori pertanian adalah Kecamatan Weru, yaitu sebesar 1.53% (kurang potensi). Berikut Tabel 5.2 menunjukkan peranan kategori pertanian pada setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 5.2 Peranan/Distribusi Kategori Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Urutan	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Pertanian Tahun 2019 (%)	Keterangan
1	Suranenggala	43,93	Sangat Potensi
2	Kapetakan	42,72	Sangat Potensi
3	Pasaleman	41,65	Sangat Potensi
4	Gegesik	38,35	Sangat Potensi
5	Waled	37,57	Sangat Potensi
6	Susukan	36,93	Sangat Potensi
7	Kaliwedi	36,14	Sangat Potensi
8	Gempol	35,35	Sangat Potensi
9	Ciwaringin	32,62	Sangat Potensi
10	Pabedilan	31,59	Sangat Potensi
11	Losari	31,02	Sangat Potensi
12	Babakan	30,35	Sangat Potensi
13	Sedong	28,54	Potensi
14	Gebang	27,75	Potensi
15	Greged	26,23	Potensi
16	Beber	26,02	Potensi
17	Karangsembung	22,97	Potensi
18	Karangwareng	22,88	Potensi
19	Gunung Jati	21,26	Potensi
20	Mundu	19,66	Potensi
21	Klangenan	16,87	Potensi
22	Talun	16,33	Potensi
23	Pangenan	14,38	Kurang Potensi
24	Jamblang	13,50	Kurang Potensi
25	Astanajapura	12,79	Kurang Potensi
26	Lemahabang	11,93	Kurang Potensi
27	Susukan Lebak	11,67	Kurang Potensi
28	Pabuaran	11,31	Kurang Potensi
29	Sumber	9,72	Kurang Potensi
30	Dukupuntang	9,35	Kurang Potensi
31	Ciledug	8,73	Kurang Potensi
32	Panguragan	8,52	Kurang Potensi
33	Arjawinangun	5,75	Kurang Potensi
34	Palimanan	3,91	Kurang Potensi
35	Kedawung	3,79	Kurang Potensi
36	Tengah Tani	3,47	Kurang Potensi
37	Depok	2,46	Kurang Potensi
38	Plumbon	1,90	Kurang Potensi
39	Plered	1,83	Kurang Potensi
40	Weru	1,53	Kurang Potensi
	kab.cirebon	15,20	

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produksi pada kategori pertanian adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi.

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 29,80% terhadap PDRB Kecamatan.

2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 15,68 – 29,80% terhadap PDRB Kecamatan.

3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 15,68% terhadap PDRB kecamatan.

Kategori Industri Pengolahan memberikan peran 20.35% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019, sedikit turun dari tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 20.94%. Adapun Kecamatan Plumbon merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (66.64%) untuk peranan kategori industri pengolahan (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori industri pengolahan adalah Kecamatan Kapetakan, yaitu sebesar 1.14% (kurang potensi). Tabel 5.3 menunjukkan peranan kategori industri pengolahan tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori industri pengolahan adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 46,06% terhadap PDRB Kecamatan.

2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 23,61-46,06% terhadap PDRB

Kecamatan.

3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 23,61% terhadap PDRB Kecamatan.

Kategori Konstruksi berperan 11.76% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019, sedikit naik dari tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 11.58%. Adapun Kecamatan Talun merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (36.21%) untuk peranan kategori industri konstruksi (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori konstruksi adalah Kecamatan Plumbon, yaitu sebesar 3.55% (kurang potensi). Tabel 5.4 yang memperlihatkan peranan kategori konstruksi tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 25,33% terhadap PDRB Kecamatan.

2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 14,45-25,33% terhadap PDRB Kecamatan.

3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 14,45% terhadap PDRB Kecamatan.

Tabel 5.3 Peranan/Distribusi Kategori Industri Pengolahan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi	Keterangan
1	Plumbon	66.64	Sangat Potensi
2	Depok	63.92	Sangat Potensi
3	Weru	51.62	Sangat Potensi
4	Palimanan	49.27	Sangat Potensi
5	Plered	48.38	Sangat Potensi
6	Pangenan	41.34	Potensi
7	Astanajapura	31.02	Potensi
8	Mundu	23.03	Kurang Potensi
9	Karangsembung	15.53	Kurang Potensi
10	Kedawung	14.19	Kurang Potensi
11	Susukan Lebak	14.18	Kurang Potensi
12	Karangwareng	13.73	Kurang Potensi
13	Lemahabang	13.57	Kurang Potensi
14	Tengah Tani	12.97	Kurang Potensi
15	Talun	12.32	Kurang Potensi
16	Pabuaran	11.17	Kurang Potensi
17	Ciledug	10.02	Kurang Potensi
18	Babakan	9.68	Kurang Potensi
19	Gebang	9.15	Kurang Potensi
20	Waled	7.51	Kurang Potensi
21	Pasaleman	6.94	Kurang Potensi
22	Ciwaringin	5.61	Kurang Potensi
23	Jamblang	5.31	Kurang Potensi
24	Klangenan	5.00	Kurang Potensi
25	Gunung Jati	4.86	Kurang Potensi
26	Gempol	4.32	Kurang Potensi
27	Pabedilan	3.57	Kurang Potensi
28	Greged	3.20	Kurang Potensi
29	Losari	2.71	Kurang Potensi
30	Dukupuntang	2.63	Kurang Potensi
31	Sedong	2.58	Kurang Potensi
32	Beber	2.52	Kurang Potensi
33	Sumber	2.35	Kurang Potensi
34	Arjawinangun	1.94	Kurang Potensi
35	Susukan	1.92	Kurang Potensi
36	Panguragan	1.73	Kurang Potensi
37	Gegesik	1.65	Kurang Potensi
38	Kaliwedi	1.50	Kurang Potensi
39	Suranenggala	1.16	Kurang Potensi
40	Kapetakan	1.14	Kurang Potensi
	Kabupaten Cirebon	20.35	

Tabel 5.4. Peranan/Distribusi Kategori Konstruksi per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Konstruksi Tahun 2019	Keterangan
1	Talun	36,21	Sangat Potensi
2	Sedong	31,71	Sangat Potensi
3	Susukan	26,84	Sangat Potensi
4	Mundu	23,89	Potensi
5	Beber	23,75	Potensi
6	Greged	23,54	Potensi
7	Ciwaringin	18,72	Potensi
8	Kaliwedi	17,26	Potensi
9	Gempol	17,25	Potensi
10	Gegesik	16,84	Potensi
11	Jamblang	15,78	Potensi
12	Klangenan	15,27	Potensi
13	Losari	14,09	Kurang Potensi
14	Pabedilan	14,06	Kurang Potensi
15	Karangwareng	13,52	Kurang Potensi
16	Karangsembung	13,51	Kurang Potensi
17	Susukan Lebak	13,19	Kurang Potensi
18	Lemahabang	13,14	Kurang Potensi
19	Suranenggala	12,52	Kurang Potensi
20	Sumber	12,23	Kurang Potensi
21	Kapetakan	12,01	Kurang Potensi
22	Gebang	11,57	Kurang Potensi
23	Tengah Tani	11,26	Kurang Potensi
24	Dukupuntang	11,22	Kurang Potensi
25	Kedawung	11,11	Kurang Potensi
26	Ciledug	11,05	Kurang Potensi
27	Babakan	11,02	Kurang Potensi
28	Pabuaran	10,71	Kurang Potensi
29	Gunung Jati	10,57	Kurang Potensi
30	Panguragan	8,69	Kurang Potensi
31	Waled	7,90	Kurang Potensi
32	Arjawinangun	7,82	Kurang Potensi
33	Astanajapura	7,55	Kurang Potensi
34	Pasaleman	7,28	Kurang Potensi
35	Palimanan	7,11	Kurang Potensi
36	Pangenan	7,08	Kurang Potensi
37	Plered	5,52	Kurang Potensi
38	Weru	5,24	Kurang Potensi
39	Depok	3,95	Kurang Potensi
40	Plumbon	3,55	Kurang Potensi
	Kabupaten Cirebon	11,76	

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran memiliki peran 15.44% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019, sedikit turun dari tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 15.55%. Adapun Kecamatan Arjawinangun merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (48.06%) untuk peranan kategori perdagangan besar dan eceran (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori perdagangan besar dan eceran adalah Kecamatan Palimanan, yaitu sebesar 5.34% (kurang potensi). Tabel 5.5 menunjukkan peranan kategori perdagangan besar dan eceran tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori perdagangan besar dan eceran adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 33,83% terhadap PDRB Kecamatan.
2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 19,59-33,83% terhadap PDRB Kecamatan.
3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 19,59% terhadap PDRB Kecamatan.

Tabel 5.5 Peranan/Distribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Pertanian Tahun 2019	Keterangan
1	Arjawinangun	48,06	Sangat Potensi
2	Panguragan	46,74	Sangat Potensi
3	Kedawung	27,13	Potensi
4	Pabuaran	24,97	Potensi
5	Tengah Tani	24,73	Potensi
6	Ciledug	24,25	Potensi
7	Klangenan	22,16	Potensi
8	Sumber	21,73	Potensi
9	Gebang	20,95	Potensi
10	Jamblang	20,23	Potensi
11	Dukupuntang	19,42	Kurang Potensi
12	Kapetakan	19,21	Kurang Potensi
13	Suranenggala	18,15	Kurang Potensi
14	Karangsembung	17,44	Kurang Potensi
15	Pabedilan	17,36	Kurang Potensi
16	Sedong	17,22	Kurang Potensi
17	Karangwareng	17,06	Kurang Potensi
18	Babakan	17,01	Kurang Potensi
19	Losari	16,42	Kurang Potensi
20	Lemahabang	15,87	Kurang Potensi
21	Susukan Lebak	15,32	Kurang Potensi
22	Weru	15,06	Kurang Potensi
23	Plered	14,72	Kurang Potensi
24	Beber	13,75	Kurang Potensi
25	Greged	13,52	Kurang Potensi
26	Gunung Jati	12,43	Kurang Potensi
27	Mundu	11,93	Kurang Potensi
28	Gegesik	11,35	Kurang Potensi
29	Gempol	10,58	Kurang Potensi
30	Kaliwedi	10,57	Kurang Potensi
31	Ciwaringin	10,32	Kurang Potensi
32	Talun	9,82	Kurang Potensi
33	Pangenan	8,83	Kurang Potensi
34	Susukan	8,64	Kurang Potensi
35	Waled	8,51	Kurang Potensi
36	Astanajapura	8,32	Kurang Potensi
37	Pasaleman	8,25	Kurang Potensi
38	Depok	6,64	Kurang Potensi
39	Plumbon	5,44	Kurang Potensi
40	Palimanan	5,34	Kurang Potensi
	Kab. Cirebon	15,44	

Kategori Transportasi ikut berperan 8.18% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019 atau sama dengan tahun sebelumnya (2018). Adapun Kecamatan Klangenan merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (15.94%) untuk peranan kategori transportasi (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori transportasi adalah Kecamatan Weru, yaitu sebesar 4.02% (kurang potensi). Tabel 5.6 yang memperlihatkan peranan kategori transportasi tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori transportasi adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 11,97% terhadap PDRB Kecamatan.
2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB 7,99-11,97% terhadap PDRB Kecamatan
3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 7,99% terhadap PDRB Kecamatan.

Tabel 5.6. Peranan/ Distribusi Kategori Transportasi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Transportasi Tahun 2019	Keterangan
1	Klangenan	15,94	Sangat Potensi
2	Sumber	15,68	Sangat Potensi
3	Palimanan	14,62	Sangat Potensi
4	Jamblang	13,56	Sangat Potensi
5	Dukupuntang	13,12	Sangat Potensi
6	Kaliwedi	12,56	Sangat Potensi
7	Susukan	11,75	Potensi
8	Kapetakan	11,52	Potensi
9	Gunung Jati	10,54	Potensi
10	Mundu	10,50	Potensi
11	Gegesik	10,35	Potensi
12	Suranenggala	10,10	Potensi
13	Talun	9,79	Potensi
14	Arjawinangun	8,70	Potensi
15	Panguragan	8,03	Potensi
16	Pasaleman	7,75	Kurang Potensi
17	Pabuaran	7,48	Kurang Potensi
18	Gempol	7,27	Kurang Potensi
19	Waled	7,12	Kurang Potensi
20	Ciledug	7,1	Kurang Potensi
21	Ciwaringin	6,75	Kurang Potensi
22	Karangsembung	6,63	Kurang Potensi
23	Greged	6,46	Kurang Potensi
24	Plumbon	6,35	Kurang Potensi
25	Astanajapura	6,3	Kurang Potensi
26	Susukan Lebak	6,29	Kurang Potensi
27	Pangenan	6,06	Kurang Potensi
28	Babakan	6,02	Kurang Potensi
29	Beber	5,87	Kurang Potensi
30	Karangwareng	5,71	Kurang Potensi
31	Plered	5,67	Kurang Potensi
32	Tengah Tani	5,59	Kurang Potensi
33	Kedawung	5,38	Kurang Potensi
34	Losari	5,33	Kurang Potensi
35	Lemahabang	5,30	Kurang Potensi
36	Pabedilan	5,08	Kurang Potensi
37	Gebang	5,07	Kurang Potensi
38	Sedong	4,90	Kurang Potensi
39	Depok	4,60	Kurang Potensi
40	Weru	4,02	Kurang Potensi
	Kabupaten Cirebon	8,18	

Kategori Jasa Pendidikan ikut berperan 5.78% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 (5.31%). Adapun Kecamatan Astanajapura merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (14.25%) untuk peranan kategori Jasa Pendidikan (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori Jasa Pendidikan adalah Kecamatan Talun, yaitu sebesar 1.84% (kurang potensi). Berikut Tabel 5.7 yang memperlihatkan peranan kategori Jasa Pendidikan tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori Jasa Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 10,12% terhadap PDRB Kecamatan
2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 5,99-10,12% terhadap PDRB Kecamatan
3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 5,99% terhadap PDRB Kecamatan

Tabel 5.7 Peranan/Distribusi Kategori Pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Jasa Pendidikan Tahun 2019	Keterangan
1	Astanajapura	14.25	Sangat Potensi
2	Pangenan	11.97	Sangat Potensi
3	Dukupuntang	9.45	Potensi
4	Sumber	9.09	Potensi
5	Ciwaringin	8.81	Potensi
6	Plered	8.26	Potensi
7	Gempol	8.23	Potensi
8	Tengah Tani	7.82	Potensi
9	Weru	7.72	Potensi
10	Kedawung	7.10	Potensi
11	Panguragan	6.35	Potensi
12	Karangwareng	5.94	Kurang Potensi
13	Arjawinangun	5.84	Kurang Potensi
14	Susukan Lebak	5.69	Kurang Potensi
15	Karangsembung	5.54	Kurang Potensi
16	Pabedilan	5.19	Kurang Potensi
17	Losari	5.07	Kurang Potensi
18	Lemahabang	4.92	Kurang Potensi
19	Gunung Jati	4.76	Kurang Potensi
20	Beber	4.69	Kurang Potensi
21	Greged	4.48	Kurang Potensi
22	Palimanan	4.27	Kurang Potensi
23	Pabuaran	3.92	Kurang Potensi
24	Gegesik	3.84	Kurang Potensi
25	Kaliwedi	3.76	Kurang Potensi
26	Ciledug	3.75	Kurang Potensi
27	Suranenggala	3.75	Kurang Potensi
28	Sedong	3.31	Kurang Potensi
29	Kapetakan	3.30	Kurang Potensi
30	Pasaleman	2.75	Kurang Potensi
31	Jamblang	2.72	Kurang Potensi
32	Babakan	2.69	Kurang Potensi
33	Depok	2.62	Kurang Potensi
34	Gebang	2.48	Kurang Potensi
35	Mundu	2.38	Kurang Potensi
36	Plumbon	2.28	Kurang Potensi
37	Waled	2.16	Kurang Potensi
38	Klangenan	2.01	Kurang Potensi
39	Susukan	1.93	Kurang Potensi
40	Talun	1.84	Kurang Potensi

Kategori Jasa Keuangan ikut berperan 3.86% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 (3.71%). Adapun Kecamatan Lemahabang merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (16.23%) untuk peranan kategori Jasa Keuangan (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori Jasa Keuangan adalah Kecamatan Sedong, yaitu sebesar 0.15% (kurang potensi). Tabel 5.8 yang memperlihatkan peranan kategori Jasa Keuangan tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 10,88% terhadap PDRB Kecamatan
2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 5,52-10,88% terhadap PDRB Kecamatan
3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 5,52% terhadap PDRB Kecamatan

Tabel 5.8 Peranan/Distribusi Kategori Jasa Keuangan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Jasa Keuangan Tahun 2019	Keterangan
1	Lemahabang	16.23	Sangat Potensi
2	Susukan Lebak	15.82	Sangat Potensi
3	Dukupuntang	13.15	Sangat Potensi
4	Sumber	12.76	Sangat Potensi
5	Tengah Tani	8.55	Potensi
6	Kedawung	7.49	Potensi
7	Jamblang	5.24	Kurang Potensi
8	Gempol	5.23	Kurang Potensi
9	Ciwaringin	5.17	Kurang Potensi
10	Klangenan	4.61	Kurang Potensi
11	Losari	4.31	Kurang Potensi
12	Pabedilan	4.28	Kurang Potensi
13	Ciledug	3.89	Kurang Potensi
14	Greged	3.76	Kurang Potensi
15	Babakan	3.65	Kurang Potensi
16	Pabuaran	3.51	Kurang Potensi
17	Gebang	3.25	Kurang Potensi
18	Depok	3.13	Kurang Potensi
19	Susukan	2.93	Kurang Potensi
20	Plumbon	2.81	Kurang Potensi
21	Karangwareng	2.78	Kurang Potensi
22	Karangsembung	2.45	Kurang Potensi
23	Arjawinangun	2.45	Kurang Potensi
24	Gunung Jati	2.45	Kurang Potensi
25	Panguragan	2.25	Kurang Potensi
26	Beber	2.13	Kurang Potensi
27	Waled	2.06	Kurang Potensi
28	Pasaleman	2.02	Kurang Potensi
29	Suranenggala	1.66	Kurang Potensi
30	Kapetakan	1.51	Kurang Potensi
31	Plered	1.48	Kurang Potensi
32	Weru	1.34	Kurang Potensi
33	Palimanan	1.31	Kurang Potensi
34	Kaliwedi	1.24	Kurang Potensi
35	Astanajapura	0.79	Kurang Potensi
36	Gegesik	0.63	Kurang Potensi
37	Mundu	0.57	Kurang Potensi
38	Talun	0.50	Kurang Potensi
39	Pangenan	0.44	Kurang Potensi
40	Sedong	0.15	Kurang Potensi

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ikut berperan 3.49% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 (3.42%). Adapun Kecamatan Ciledug merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (7.92%) untuk peranan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah Kecamatan Susukan Lebak, yaitu sebesar 0.79% (kurang potensi). Berikut Tabel 5.9 yang memperlihatkan peranan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 5,55% terhadap PDRB Kecamatan
2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 3,18-5,55% terhadap PDRB Kecamatan
3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 3,18% terhadap PDRB Kecamatan

Tabel 5.9 Peranan/Distribusi Kategori Akomodasi dan Makan Mper Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2019	Keterangan
1	Ciledug	7.92	Sangat Potensi
2	Pabuaran	7.87	Sangat Potensi
3	Kedawung	6.97	Sangat Potensi
4	Tengah Tani	6.62	Sangat Potensi
5	Beber	6.3	Sangat Potensi
6	Greged	5.53	Potensi
7	Talun	5.15	Potensi
8	Jamblang	4.72	Potensi
9	Losari	4.47	Potensi
10	Waled	4.06	Potensi
11	Dukupuntang	4.05	Potensi
12	Sumber	4.03	Potensi
13	Plumbon	3.90	Potensi
14	Pasaleman	3.86	Potensi
15	Pabedilan	3.86	Potensi
16	Depok	3.82	Potensi
17	Klangenan	3.68	Potensi
18	Plered	3.34	Potensi
19	Kaliwedi	3.29	Potensi
20	Weru	3.27	Potensi
21	Gunung Jati	3.27	Potensi
22	Sedong	3.18	Potensi
23	Babakan	3.05	Kurang Potensi
24	Gebang	2.82	Kurang Potensi
25	Suranenggala	2.60	Kurang Potensi
26	Susukan	2.60	Kurang Potensi
27	Karangwareng	2.59	Kurang Potensi
28	Kapetakan	2.58	Kurang Potensi
29	Gegesik	2.54	Kurang Potensi
30	Karangsembung	2.36	Kurang Potensi
31	Arjawinangun	2.14	Kurang Potensi
32	Panguragan	1.86	Kurang Potensi
33	Astanajapura	1.62	Kurang Potensi
34	Palimanan	1.54	Kurang Potensi
35	Ciwaringin	1.42	Kurang Potensi
36	Gempol	1.42	Kurang Potensi
37	Pangenan	1.18	Kurang Potensi
38	Lemahabang	0.84	Kurang Potensi
39	Mundu	0.83	Kurang Potensi
40	Susukan Lebak	0.79	Kurang Potensi

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ikut berperan 3.05% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019 menurun dari tahun 2018 (3.07%). Adapun Kecamatan Waled merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (6.42%) untuk peranan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah Kecamatan Weru, yaitu sebesar 1.29% (kurang potensi). Tabel 5.10 yang menunjukkan peranan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 4,72% terhadap PDRB Kecamatan
2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 3,01-4,72% terhadap PDRB Kecamatan
3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 3,01% terhadap PDRB Kecamatan

Tabel 5.10 Peranan/Distribusi Kategori Administrasi Pemerintahan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Administrasi Pemerintahan Tahun 2019	Keterangan
1	Waled	6.42	Sangat Potensi
2	Pasaleman	5.52	Sangat Potensi
3	Karangwareng	5.36	Sangat Potensi
4	Beber	5.3	Sangat Potensi
5	Karangsembung	4.77	Sangat Potensi
6	Losari	4.42	Potensi
7	Lemahabang	4.31	Potensi
8	Susukan Lebak	4.29	Potensi
9	Greged	4.23	Potensi
10	Jamblang	4.21	Potensi
11	Pabedilan	4.20	Potensi
12	Babakan	4.13	Potensi
13	Gebang	4.13	Potensi
14	Gunung Jati	3.98	Potensi
15	Klangenan	3.94	Potensi
16	Talun	3.83	Potensi
17	Gegesik	3.52	Potensi
18	Suranenggala	3.50	Potensi
19	Gempol	3.48	Potensi
20	Kapetakan	3.39	Potensi
21	Ciwaringin	3.37	Potensi
22	Susukan	3.26	Potensi
23	Ciledug	3.25	Potensi
24	Pabuaran	2.91	Kurang Potensi
25	Arjawinangun	2.90	Kurang Potensi
26	Panguragan	2.81	Kurang Potensi
27	Palimanan	2.71	Kurang Potensi
28	Kaliwedi	2.45	Kurang Potensi
29	Astanajapura	2.41	Kurang Potensi
30	Tengah Tani	2.37	Kurang Potensi
31	Dukupuntang	2.32	Kurang Potensi
32	Sumber	2.18	Kurang Potensi
33	Mundu	2.12	Kurang Potensi
34	Kedawung	2.02	Kurang Potensi
35	Depok	1.72	Kurang Potensi
36	Sedong	1.70	Kurang Potensi
37	Pangenan	1.53	Kurang Potensi
38	Plered	1.43	Kurang Potensi
39	Plumbon	1.30	Kurang Potensi
40	Weru	1.29	Kurang Potensi

Kategori Jasa lainnya ikut berperan 3.70% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019 menurun dari tahun 2018 (3.54%). Adapun Kecamatan Gunung Jati merupakan Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki persentase PDRB tertinggi pada Tahun 2019 (17.36%) untuk peranan kategori Jasa lainnya (sangat potensi). Sedangkan persentase PDRB terendah Tahun 2019 untuk peranan kategori Jasa lainnya adalah Kecamatan Greged, yaitu sebesar 0.15% (kurang potensi). Berikut Tabel 5.11 yang memperlihatkan peranan kategori Jasa lainnya tiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Adapun pengelompokkan Kecamatan berdasarkan potensi produktifitas pada kategori Jasa lainnya adalah sebagai berikut :

1. Sangat Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB lebih dari 11,47% terhadap PDRB Kecamatan
2. Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB sebesar 5,74-11,47% terhadap PDRB Kecamatan
3. Kurang Potensi

   Kelompok Kecamatan yang masuk pada kategori ini merupakan kecamatan yang memiliki distribusi PDRB kurang dari 5,74% terhadap PDRB Kecamatan

Tabel 5.11. Peranan/Distribusi Kategori Jasa Lainnya per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Jasa Kesehatan Tahun 2019	Keterangan
1	Gunung Jati	17.36	Sangat Potensi
2	Tengah Tani	6.84	Potensi
3	Kedawung	6.48	Potensi
4	Ciledug	6.25	Potensi
5	Gebang	5.92	Potensi
6	Pabuaran	5.65	Kurang Potensi
7	Waled	5.09	Kurang Potensi
8	Panguragan	4.86	Kurang Potensi
9	Babakan	4.75	Kurang Potensi
10	Pasaleman	4.29	Kurang Potensi
11	Arjawinangun	4.10	Kurang Potensi
12	Plered	3.76	Kurang Potensi
13	Weru	3.56	Kurang Potensi
14	Karangwareng	3.22	Kurang Potensi
15	Dukupuntang	3.06	Kurang Potensi
16	Gegesik	3.02	Kurang Potensi
17	Karangsembung	2.96	Kurang Potensi
18	Sumber	2.94	Kurang Potensi
19	Palimanan	2.89	Kurang Potensi
20	Jamblang	2.87	Kurang Potensi
21	Klangenan	2.80	Kurang Potensi
22	Depok	2.72	Kurang Potensi
23	Losari	2.58	Kurang Potensi
24	Plumbon	2.50	Kurang Potensi
25	Pabedilan	2.48	Kurang Potensi
26	Astanajapura	2.21	Kurang Potensi
27	Sedong	2.18	Kurang Potensi
28	Lemahabang	2.15	Kurang Potensi
29	Kaliwedi	2.12	Kurang Potensi
30	Susukan Lebak	1.97	Kurang Potensi
31	Gempol	1.45	Kurang Potensi
32	Pangenan	1.30	Kurang Potensi
33	Talun	1.24	Kurang Potensi
34	Ciwaringin	1.22	Kurang Potensi
35	Suranenggala	1.18	Kurang Potensi
36	Kapetakan	1.13	Kurang Potensi
37	Mundu	1.08	Kurang Potensi
38	Susukan	0.59	Kurang Potensi
39	Beber	0.25	Kurang Potensi
40	Greged	0.15	Kurang Potensi

Tabel 5.12. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Konstruksi
1	Arjawinangun	5.75	0.00	1.94	0.24	0.44	7.82
2	Astanajapura	12.79	5.2	31.02	0	0	7.55
3	Babakan	30.35	1.01	9.68	0	0	11.02
4	Beber	26.02	3.35	2.52	0	0.24	23.75
5	Ciledug	8.73	0.19	10.02	0.9	0.06	11.05
6	Ciwaringin	32.62	0.82	5.61	0.00	0.00	18.72
7	Depok	2.46	0.25	63.92	0.00	0.00	3.95
8	Dukupuntang	9.35	2.92	2.63	1.02	0.50	11.22
9	Gebang	27.75	1.32	9.15	0.00	0.00	11.57
10	Gegesik	38.35	0.00	1.65	0.22	0.27	16.84
11	Gempol	35.35	0.65	4.32	0.00	0.00	17.25
12	Greged	26.23	2.54	3.20	0.00	0.25	23.54
13	Gunung Jati	21.26	0.00	4.86	0.00	0.00	10.57
14	Jamblang	13.50	0.00	5.31	0.65	0.00	15.78
15	Kaliwedi	36.14	0.00	1.50	1.02	0.45	17.26
16	Kapetakan	42.72	0.00	1.14	0.00	0.49	12.01
17	Karangsembung	22.97	1.03	15.53	0.00	0.09	13.51
18	Karangwareng	22.88	0.81	13.73	0.00	0.09	13.52
19	Kedawung	3.79	0.26	14.19	0.99	0.00	11.11
20	Klangenan	16.87	0.00	5.00	0.82	0.00	15.27
21	Lemahabang	11.93	2.73	13.57	0.89	0.08	13.14
22	Losari	31.02	0.00	2.71	0.37	0.00	14.09
23	Mundu	19.66	2.77	23.03	0.00	0.00	23.89
24	Pabedilan	31.59	0.00	3.57	0.35	0.00	14.06
25	Pabuaran	11.31	0.15	11.17	0.67	0.05	10.71
26	Palimanan	3.91	3.65	49.27	0.00	0.01	7.11
27	Pangenan	14.38	2.95	41.34	0.00	0.00	7.08
28	Panguragan	8.52	0.00	1.73	0.25	0.44	8.69
29	Pasaleman	41.65	6.82	6.94	0.00	0.08	7.28
30	Plered	1.83	0.00	48.38	0.14	0.00	5.52
31	Plumbon	1.90	0.18	68.52	0.00	0.00	3.55
32	Sedong	28.54	1.59	2.58	0.00	0.00	31.71
33	Sumber	9.72	2.06	2.35	1.08	0.25	12.23
34	Suranenggala	43.93	0.00	1.16	0.00	0.50	12.52
35	Susukan	36.93	0.00	1.92	0.00	0.00	26.84
36	Susukan Lebak	11.67	2.35	14.18	1.00	0.08	13.19
37	Talun	16.33	2.01	12.32	0.00	0.00	36.21
38	Tengah Tani	3.47	0.30	12.97	1.02	0.00	11.26
39	Waled	37.57	8.16	7.51	0.00	0.06	7.90
40	Weru	1.53	0.00	51.62	0.13	0.00	5.24
	2019 Kab Cirebon	15.20	1.06	20.35	0.24	0.10	11.76

Tabel 5.13. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan	Real Estate	Jasa Perusahaan
1	Arjawinangun	48.06	8.70	2.14	6.08	2.45	1.47	0.32
2	Astanajapura	8.32	6.3	1.62	0.82	0.79	2.31	0.36
3	Babakan	17.01	6.02	3.05	0.75	3.65	3.12	0.74
4	Beber	13.75	5.87	6.3	0.79	2.13	3.6	0.19
5	Ciledug	24.25	7.1	7.92	7.33	3.89	2.35	0.71
6	Ciwaringin	10.32	6.75	1.42	0.48	5.17	1.72	0.25
7	Depok	6.64	4.60	3.82	1.02	3.13	1.41	0.52
8	Dukupuntang	19.42	13.12	4.05	2.05	13.15	1.52	1.08
9	Gebang	20.95	5.07	2.82	0.54	3.25	2.65	0.65
10	Gegesik	11.35	10.35	2.54	1.25	0.63	2.75	0.22
11	Gempol	10.58	7.27	1.42	0.56	5.23	1.76	0.25
12	Greged	13.52	6.46	5.53	1.23	3.76	3.26	0.57
13	Gunung Jati	12.43	10.54	3.27	0.46	2.45	2.35	3.54
14	Jamblang	20.23	13.56	4.72	7.23	5.24	2.13	0.35
15	Kaliwedi	10.57	12.56	3.29	1.67	1.24	2.76	0.34
16	Kapetakan	19.21	11.52	2.58	0.42	1.51	2.46	0.30
17	Karangsembung	17.44	6.63	2.36	2.01	2.45	3.09	0.61
18	Karangwareng	17.06	5.71	2.59	2.94	2.78	3.38	0.62
19	Kedawung	27.13	5.38	6.97	0.45	7.49	3.14	4.16
20	Klangenan	22.16	15.94	3.68	6.95	4.61	1.78	0.31
21	Lemahabang	15.87	5.30	0.84	7.58	16.23	1.96	0.34
22	Losari	16.42	5.33	4.47	7.95	4.31	2.70	0.24
23	Mundu	11.93	10.50	0.83	0.96	0.57	2.19	0.32
24	Pabedilan	17.36	5.08	3.86	6.87	4.28	2.63	0.20
25	Pabuaran	24.97	7.48	7.87	7.83	3.51	2.03	0.63
26	Palimanan	5.34	14.62	1.54	1.92	1.31	1.13	1.22
27	Pangenan	8.83	6.06	1.18	0.60	0.44	1.57	0.33
28	Panguragan	46.74	8.03	1.86	5.05	2.25	1.33	0.23
29	Pasaleman	8.25	7.75	3.86	0.93	2.02	3.88	0.27
30	Plered	14.72	5.67	3.34	3.27	1.48	0.96	1.33
31	Plumbon	5.44	6.35	3.90	0.94	2.81	0.89	0.44
32	Sedong	17.22	4.90	3.18	0.35	0.15	4.31	0.66
33	Sumber	21.73	15.68	4.03	1.98	12.76	1.30	1.40
34	Suranenggala	18.15	10.10	2.60	0.48	1.66	2.39	0.26
35	Susukan	8.64	11.75	2.60	0.97	2.93	3.43	0.28
36	Susukan Lebak	15.32	6.29	0.79	6.92	15.82	1.99	0.28
37	Talun	9.82	9.79	5.15	0.88	0.50	2.29	0.34
38	Tengah Tani	24.73	5.59	6.62	0.53	8.55	3.42	4.53
39	Waled	8.51	7.12	4.06	0.98	2.06	4.27	0.34
40	Weru	15.06	4.02	3.27	3.03	1.34	0.95	1.40
	2019 Kab Cirebon	15.44	8.49	3.49	2.28	3.86	2.30	0.90

Tabel 5.14. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa lainnya
1	Arjawinangun	2.90	5.84	1.75	4.10
2	Astanajapura	2.41	14.25	4.05	2.21
3	Babakan	4.13	2.69	2.03	4.75
4	Beber	5.3	4.69	1.25	0.25
5	Ciledug	3.25	3.75	2.25	6.25
6	Ciwaringin	3.37	8.81	2.72	1.22
7	Depok	1.72	2.62	1.22	2.72
8	Dukupuntang	2.32	9.45	3.14	3.06
9	Gebang	4.13	2.48	1.75	5.92
10	Gegesik	3.52	3.84	3.20	3.02
11	Gempol	3.48	8.23	2.20	1.45
12	Greged	4.23	4.48	1.05	0.15
13	Gunung Jati	3.98	4.76	2.17	17.36
14	Jamblang	4.21	2.72	1.50	2.87
15	Kaliwedi	2.45	3.76	2.87	2.12
16	Kapetakan	3.39	3.30	0.67	1.13
17	Karangsembung	4.77	5.54	1.78	2.96
18	Karangwareng	5.36	5.94	2.20	3.22
19	Kedawung	2.02	7.10	2.50	6.48
20	Klangenan	3.94	2.01	0.63	2.80
21	Lemahabang	4.31	4.92	1.16	2.15
22	Losari	4.42	5.07	1.19	2.58
23	Mundu	2.12	2.38	0.27	1.08
24	Pabedilan	4.20	5.19	1.19	2.48
25	Pabuaran	2.91	3.92	1.71	5.65
26	Palimanan	2.71	4.27	1.36	2.89
27	Pangenan	1.53	11.97	3.19	1.30
28	Panguragan	2.81	6.35	1.53	4.86
29	Pasaleman	5.52	2.75	0.18	4.29
30	Plered	1.43	8.26	2.40	3.76
31	Plumbon	1.30	2.28	0.91	2.50
32	Sedong	1.70	3.31	0.48	2.18
33	Sumber	2.18	9.09	2.59	2.94
34	Suranenggala	3.50	3.75	0.68	1.18
35	Susukan	3.26	1.93	0.90	0.59
36	Susukan Lebak	4.29	5.69	1.22	1.97
37	Talun	3.83	1.84	0.11	1.24
38	Tengah Tani	2.37	7.82	2.93	6.84
39	Waled	6.42	2.16	0.16	5.09
40	Weru	1.29	7.72	2.23	3.56
	2019 Kab Cirebon	3.05	5.78	2.01	3.70

Potensi Kecamatan berdasarkan sektor PDRB dapat dilihat pada table 5.15 berikut.

Tabel 5.15 Potensi Kecamatan berdasarkan Sektor PDRB

No	Sektor	Kecamatan	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1. Suranenggala 2. Kapetakan 3. Pasaleman 4. Gegesik 5. Waled 6. Susukan 7. Kaliwedi 8. Gempol 9. Ciwaringin 10. Pabedilan 11. Losari 12. Babakan	Sangat Potensi
2	Pertambangan dan Penggalian	1. Waled 2. Pasaleman	Sangat Potensi
3	Industri Pengolahan	1. Plumbon 2. Depok 3. Weru 4. Palimanan 5. Plered	Sangat Potensi
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1. Sumber 2. Tengah Tani 3. Dukupuntang 4. Kaliwedi 5. Susukan Lebak 6. Kedawung 7. Ciledug 8. Lemahabang 9. Klangenan	Sangat Potensi
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1. Dukupuntang 2. Suranenggala 3. Kapetakan 4. Kaliwedi 5. Panguragan 6. Arjawinangun	Sangat Potensi
6	Konstruksi	1. Talun 2. Sedong 3. Susukan	Sangat Potensi

7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1. Arjawinangun 2. Panguragan	Sangat Potensi
8	Transportasi dan Pergudangan	1. Klangenan 2. Sumber 3. Palimanan 4. Jamblang 5. Dukupuntang 6. Kaliwedi	Sangat Potensi
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1. Ciledug 2. Pabuaran 3. Kedawung 4. Tengah Tani 5. Beber	Sangat Potensi
10	Informasi dan Komunikasi	1. Losari 2. Pabuaran 3. Lemahabang 4. Ciledug 5. Jamblang 6. Klangenan 7. Susukan Lebak 8. Pabedilan 9. Arjawinangun	Sangat Potensi
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1. Lemahabang 2. Susukan Lebak 3. Dukupuntang 4. Sumber	Sangat Potensi
12	Real Estate	1. Beber 2. Waled 3. Pasaleman 4. Susukan 5. Tengah Tani 6. Karangwareng 7. Greged 8. Sedong	Sangat Potensi
13	Jasa Perusahaan	1. Tengah Tani 2. Kedawung 3. Gunung Jati	Sangat Potensi
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1. Waled 2. Sumber 3. Pasaleman 4. Karangwareng	Sangat Potensi

		5. Beber 6. Karangsembung	
15	Jasa Pendidikan	1. Sumber 2. Kedawung 3. Astanajapura 4. Pangenan 5. Ciwaringin	Sangat Potensi
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1. Astanajapura 2. Kedawung 3. Sumber 4. Gegesik 5. Pangenan 6. Dukupuntang 7. Tengah Tani 8. Kaliwedi	Sangat Potensi
17	Jasa lainnya	Gunung Jati	Sangat Potensi

5.2 PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu daerah atau Kecamatan selama kurun waktu satu tahun. PDRB perkapita dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan materiil suatu daerah atau Kecamatan. Namun demikian, pada kondisi riil produk yang dihasilkan oleh suatu daerah atau Kecamatan belum tentu sepenuhnya dirasakan oleh setiap penduduk pada daerah atau Kecamatan tersebut. Hal tersebut karena aktifitas produksi dalam suatu daerah atau Kacamatan tidak hanya dilakukan oleh penduduk setempat melainkan bisa saja terdapat penduduk dari daerah atau Kecamatan lain, dimana kondisi tersebut merupakan kondisi yang maklum terjadi.

Oleh karena itu, PDRB perkapita dapat diperoleh dengan membagi nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada suatu daerah atau Kecamatan dengan jumlah penduduk pada daerah atau Kecamatan tersebut. Sehingga adakalanya PDRB satu daerah atau Kecamatan yang lebih besar daripada daerah atau Kecamatan lain namun memiliki PDRB perkapita yang lebih kecil yang disebabkan jumlah penduduk yang lebih besar.

Sebagai contoh seperti pada Tabel 5.8 yang memperlihatkan PDRB perkapita setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, PDRB perkapita Kecamatan

Beber (Rp. 15.911.000,-) lebih besar daripada PDRB perkapita Kecamatan Babakan (Rp. 15.387.000,-) meskipun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kecamatan Babakan lebih besar (Rp. 1.071.512.675.000,-) daripada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kecamatan Beber (Rp. 644.687.570.000,-). Hal tersebut karena jumlah penduduk Kecamatan Babakan lebih besar (69.636 jiwa) dibandingkan jumlah penduduk Kecamatan Beber (40.516 jiwa).

Tabel 5.16

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan

Tahun 2019

No	Kecamatan	2 019	Peringkat	Jumlah Penduduk	PDRB ADHB per kapita (Rp)	Peringkat
		PDRB ADHB (Milyar Rp)				
1	Arjawinangun	1,806,788,775	7	77589	23,286.66	10
2	Astanajapura	1,865,771,638	6	88159	21,163.71	15
3	Babakan	1,071,512,676	24	69636	15,387.34	35
4	Beber	644,687,571	37	40516	15,911.93	34
5	Ciledug	1,133,165,640	18	44501	25,463.82	8
6	Ciwaringin	820,304,268	30	37328	21,975.58	14
7	Depok	2,502,470,352	3	63474	39,425.12	4
8	Dukupuntang	1,253,862,702	13	62951	19,918.07	19
9	Gebang	1,121,330,156	22	65223	17,192.25	31
10	Gegesik	1,391,961,881	8	79351	17,541.83	28
11	Gempol	744,308,933	33	51416	14,476.21	36
12	Greged	538,192,345	39	60535	8,890.60	40
13	Gunungjati	1,388,178,368	9	79307	17,503.86	29
14	Jamblang	728,910,535	34	40007	18,219.57	27
15	Kaliwedi	885,974,761	28	45570	19,442.06	20
16	Kapetakan	1,321,258,558	10	57653	22,917.43	11
17	Karangsembung	678,209,696	36	36035	18,820.86	24
18	Karangwareng	678,827,617	35	30117	22,539.68	12
19	Kedawung	1,156,810,402	16	57980	19,951.89	18
20	Klangenan	959,992,305	26	51413	18,672.17	26
21	Lemahabang	1,127,312,594	19	56142	20,079.67	17
22	Losari	1,122,717,324	21	65143	17,234.66	30
23	Mundu	1,145,313,428	17	71661	15,982.38	33
24	Pabedilan	754,754,459	32	53376	14,140.33	37
25	Pabuaran	938,692,958	27	35469	26,465.17	7
26	Palimanan	3,058,991,330	2	68011	44,977.89	2
27	Pangenan	1,001,079,021	25	44583	22,454.28	13
28	Panguragan	1,301,828,692	11	42548	30,596.71	6
29	Pasaleman	458,704,228	40	27163	16,887.10	32
30	Plered	2,402,506,164	4	55303	43,442.60	3
31	Plumbon	3,141,324,134	1	64178	48,947.06	1
32	Sedong	835,685,795	29	40675	20,545.44	16
33	Sumber	1,263,762,207	12	91907	13,750.45	38
34	Suranenggala	1,078,685,420	23	43472	24,813.34	9
35	Susukan	1,250,277,079	14	64375	19,421.78	21
36	Susukan Lebak	762,997,002	31	40169	18,994.67	23
37	Talun	1,217,744,984	15	65191	18,679.65	25
38	Tengah Tani	1,126,249,781	20	59122	19,049.59	22
39	Waled	625,782,984	38	54019	11,584.50	39
40	Weru	2,332,083,608	5	68992	33,802.23	5
	Kabupaten Cirebon	49,639,012,370		2250260	22,059.23	

5.3 Analisis PDRB per Kecamatan

Setiap wilayah memiliki karakteristik spesifik yang mendukung berkembangnya suatu sektor tertentu. Setiap wilayah termasuk wilayah kecamatan harus mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di wilayah tersebut, sehingga pengembangan sektor unggulan tersebut dapat dioptimalkan. Berdasarkan hasil analisis PDRB per Kecamatan di kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki nilai PDRB tertinggi dan terendah memiliki potensi sektor ekonomi unggulan wilayah yang berbeda-beda. Berikut disajikan analisis PDRB pada 10 kecamatan di Kabupaten Cirebon dengan kategori lima kecamatan penyumbang PDRB tertinggi dan lima kecamatan penyumbang PDRB terendah.

5.3.1 Kecamatan dengan Nilai PDRB Tertinggi

1. Kecamatan Plumbon

Kecamatan Plumbon menduduki peringkat pertama penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Cirebon. Sektor industri pengolahan merupakan sektor terbesar dan signifikan dibanding sektor lainnya. Rotan merupakan industri pengolahan terbesar di wilayah ini.

Di Kabupaten Cirebon sendiri, pada 2018 tercatat sebanyak 60 ribu warga bekerja di sektor industri meubel/kerajinan rotan(BPS, 2018). Jumlah perusahaan industri rotan pun terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2018 jumlah perusahaan industri rotan tercatat sebanyak 1.408 perusahaan. Sebelumnya, pada 2015 terdapat 1.370 industri rotan (BPS, 2018). Tujuh dari 13 desa pengekspor rotan di Jawa Barat berada di Kabupaten Cirebon dan 6 dari 7 desa tersebut berada di Kecamatan Plumbon. Kecamatan Plumbon merupakan salah satu sentra industri rotan terbesar di Indonesia. Selain pengolahan rotan, terdapat juga industri lain seperti garmen dan industri kecil pengolahan lainnya seperti industri pengolahan mukena, kerudung, dan makanan kecil.

2. Kecamatan Palimanan

Urutan kedua penyumbang PDRB terbesar adalah Kecamatan Palimanan. Sama halnya dengan Kecamatan Plumbon, sektor industri pengolahan merupakan

sektor terbesar penyumbang PDRB di kecamatan ini. PT Indocement yang berada di kecamatan palimanan sangat berpengaruh terhadap PDRB di Kecamatan Palimanan. Selain itu, ada juga industri pengolahan spritus dan garmen yang menyumbangkan kontribusi perekonomian di kecamatan palimanan. Atas dasar tersebut pemerintah harus mendukung melalui program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan usaha di sektor pengolahan. Namun perlu di evaluasi secara berkala dampak yang ditimbukan dari hasil usaha tersebut.

3. Kecamatan Depok

Sektor Industri pengolahan merupakan sektor yang menyumbangkan nilai tertinggi pada PDRB Kecamatan Depok. Hal ini didukung oleh perkembangan industri rotan dan meuble lainya yang ada diwilayah tersebut. Sektor ini masih bisa untuk dikembangkan lagi karena memiliki potensi pasar yang cukup besar yaitu pasar luar negeri melalui ekspor. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam rangka peningkatan produktifitas di sektor industri rotan yang ada diwilayah Kecamatan Depok. Pengusaha rotan harus diberikan kebijkan yang lebih longgar untuk memasarkan hasil produksinya keluar negeri. Peningkatan penjualan keluar negeri dapat juga menjadi salah satu pendapatan negara melalui penambahan devisa bagi negera. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan dapat mendukung produksi industri rotan melalui kebijakan yang lebih longgar terutama untuk kebijkan tarif dan kuota ekspor.

4. Kecamatan Plered

Kecamatan Plered berada di sebelah timur Kecamatan Plumbon. Hal ini berpengaruh terhadap penyumbang PDRB di Kecamatan tersebut. Industri pengolahan masih menjadi urutan pertama penyumbang PDRB terbesar di wilayah ini. Selain industri rotan dan mebel, kecamatan ini juga memiliki sentra batik trusmi yang cukup tua dan merupakan salah satu keunggulan wisata di Kabupaten Cirebon. Keberadaan sentra batik ini juga berpengaruh pada PDRB dari sektor perdagangan. Pemerintah hendaknya meningkatkan pemanfaatan dan desain sentra batik tersebut agar dapat kondusif bagi wisatawan sehingga meningkatkan pendapataan di sektor perdagangan besar maupun peningkatan sektor-sektor lainnya.

Selain industri pengolahan dan sektor perdagangan, jasa Pendidikan juga

memiliki kontribusi PDRB yang cukup besar, mengingat adanya beberapa Perguruan Tinggi dan sebaran sekolah-sekolah dari SD sampai SMA. Universitas Muhammadiyah Cirebon dan ITB cabang Cirebon merupakan Univeritas besar yang berada di Kecamatan Plered, selain itu ada sebanyak 8 TK, 6 PAUD, 22 Sekolah Dasar, 5 RA. Pemerintah dapat memanfaatkan tingginya kontribusi sektor pendidikan dengan meningkatkan perekonomian UMKM di kecamatan Plered dengan kebijakan yang mendukung.

5. Kecamatan Weru

Kecamatan Weru memiliki kontribusi besar di bidang industri pengolahan. Sama halnya dengan Kecamatan Plered dan Kecamatan Plumbon, Kecamatan Weru juga merupakan salah satu Kecamatan penghasil kerajinan rotan dan mebel. Selain itu, Kecamatan Weru dikenal sebagai sentra industri makanan kecil. Sebagai sentra industri makanan kecil, wilayah ini terdapat Pasar Wetan atau Pasar Kue, pasar grosir khusus makanan kecil. Pasar ini merupakan pusat distributor makanan kecil di Wilayah III Cirebon hingga Jawa Barat, seperti Bekasi, Tasikmalaya hingga Bogor. Keberadaan pasar tersebut berpengaruh pada besar pada kontribusi di sektor perdagangan besar maupun eceran. Jalur Kecamatan Weru juga merupakan salah satu jalur penghubung antar provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sehingga aktifitas perdagangan wilayah ini cukup besar memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Pemerintah setempat harus mempertimbangkan potensi ini sebagai daya dukung perekonomian nasional, namun pemerintah juga harus memperhatikan dampak bagi masyarakat seperti kemacetan dan lain-lain.

5.3.2 Kecamatan dengan Nilai PDRB Terendah

1. Kecamatan Karangsembung

Kecamatan Karangsembung merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian Tenggara Kabupaten Cirebon. Sektor pertanian, perkebunan, petenakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB di wilayah kecamatan ini, yaitu sebesar 22,97%. Komoditas yang banyak dibudidayakan di Kecamatan ini adalah padi dan tebu. Data BPS (2019) menunjukkan bahwa Kecamatan Karangsembung memiliki luas tanam untuk tanaman padi seluas 1445

Ha dan tebu sebesar 3012,04 Ha.

Selain sektor pertanian, perkebunan, petenakan, kehutanan dan perikanan, sektor kedua penyumbang PDRB terbesar di kecamatan Karangsembung adalah ditunjang dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kecamatan Karangsembung memiliki posisi yang strategis karena merupakan pintu masuk dari arah Jakarta-Bandung. Hal tersebut merupakan potensi bagi wilayah ini untuk pengembangan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pedagang baik pedagang besar, menengah dan kecil di Kecamatan Karangsembung adalah tertinggi dibandingkan wilayah sekitar, yaitu 256 pedagang (BPS, 2018).

Hasil analisis PDRB Kabupaten menunjukkan bahwa Kecamatan Karangsembung menduduki peringkat ke 36 penyumbang PDRB Kabupaten Cirebon dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 678.209.695,87-,. Peringkat tersebut tidak bergeser dari tahun 2018, walaupun mengalami peningkatan jumlah PDRB sebesar 11,57% dari tahun 2018.

2. Kecamatan Beber

Kecamatan Beber berada di wilayah selatan Kabupaten Cirebon. Secara administratif wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Talun di bagian Utara, Kecamatan Greged di bagian timur dan Kabupaten Kuningan di bagian selatan dan Barat. Kecamatan Beber berada pada ketinggian wilayah 221-393 mdpl, sehingga wilayah ini memiliki potensi pertanian yang memiliki peluang untuk diusahakan.

Hasil analisis PDRB tahun 2019 menunjukkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kecamatan Beber, yaitu sebesar 26,02%. Komoditas pertanian yang berpeluang untuk dikembangkan diwilayah ini adalah jenis tanaman palawija dan holtikulutura. Selain komoditas tersebut jenis tanaman lain yang berpotensi dikembangkan adalah tanaman mangga, pisang dan umbi-umbian. Kecamatan Beber merupakan sentra produksi ubi jalar di Kabupaten Cirebon. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pada tahun 2018 luas tanam ubi jalar di Kecamatan Beber adalah 218 Ha dengan produksi mencapai 4944 ton, tertinggi di Kabupaten Cirebon.

Kecamatan Beber memiliki banyak lahan yang belum termanfaatkan secara optimal dan hal ini merupakan peluang bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan produktifitas pertanian terutama komoditas tanaman dataran tinggi sesuai dengan karekteristik wilayah kecamatan Beber. Dibutuhkan peran serta semua pihak untuk meningkatkan potensi produksi dan produktivitas di sektor pertanian. Selain peningkatan produktivitas, pemerintah daerah diharapkan dapat memacu masyarakat untuk menciptakan diversifikasi produk pertanian agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

3. Kecamatan Waled

Kecamatan Waled berada di timur Kabupaten Cirebon. Wilayah yang memiliki 12 desa/kelurahan ini memiliki luas wilayah kecamtan sebesar 22,44 km2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Kecamatan Waled memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp. 625.782.983,77 terhadap PDRB kabupaten Cirebon, naik 10,68% dari tahun 2018. Nilai tersebut menempatan Kecamatan Waled pada peringkat 38.

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kecamatan Waled, yaitu sebesar 37,57%. Berada pada ketinggian 25-30 mdpl komoditas pertanian yang banyak dikembangkan di wilayah ini adalah komoditas pertanian dataran rendah diantaranya bawang merah dan cabai merah yang diusahakan di tiga desa/kelurahan serta jagung, padi dan mangga. Dari 12 desa/kelurahan di Kecamatan Waled, terdapat tujuh desa/kecamatan yang membudidayakan tanaman jagung sebagai komoditas utama. Setelah sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor kedua penyumbang terbesar PDRB Kecamatan Waled yaitu sebesar 8,51%.

4. Kecamatan Greged

Kecamatan Greged merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah 30,57 km2. Wilayah ini terdiri dari 10 desa/keluarahan. Berdasarkan analisis PDRB, kecamatan Greged merupakan kecamatan yang menduduki peringkat ke 39 sebagai penyumbang PDRB Kabupaten Cirebon, yaitu sebesar Rp. 538.192.344,52,.

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan

merupakan sektor terbesar yang berkontribusi pada PDRB Kecamatan Greged. Komoditas yang potensial dikembangkan di wilayah ini adalah mangga. Greged merupakan kecamatan terbesar ketiga setelah Sedong dan Dukupuntang yang potensial untuk pengembangan berbagai komoditas mangga (Dinas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan Kabupaten Cirebon, 2015). Guna meningkatkan potensi dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah daeragh dan masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan petani mangga dan menciptakan diversifikasi produk untuk peningkatan nilai tambah komoditas tersebut.

Selain mangga, padi sawah juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Desa Kamarang merupakan salah satu desa di Kecamatan Greged yang memiliki areal persawahan yang subur sehingga tercatat sebgai desa yang berpotensi dalam pengembangan agrowisata.

5. Kecamatan Pasaleman

Kecamatan Pasaleman secara administratif berbatasan dengan Kecamatan Ciledug dan Pabuaran di bagian utara, di bagian selatan dengan Kabupaten Kuningan, Kecamatan Waled dan Kabupaten Kuningan di bagian barat, dan di bagian timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Kontribusi terbesar PDRB di Kecamatan Pasaleman berasal dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 41,65%. Sektor pertanian inilah yang menyebabkan Kecamatan Pasaleman berperan sebagai penunjang produksi bahan baku pertanian di Kawasan Agropolian Ciledug. Adapun komoditas unggulan di wilayah ini adalah cabai merah, mangga, pepaya, pisang dan tebu.

Pada tingkat Kabupaten Kecamatan Pasaleman menduduki peringkat terendah dari 40 kecamatan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Cirebon. Kontribusi PDRB Kecamatan Pasaleman adalah Rp. 468.704.227,53- atau naik 10,89% dari 2018.

Berdasarkan hasil analisis PDRB Kecamatan di Kabupaten Cirebon diketahui bahwa kecamatan dengan nilai PDRB tertingi dan terendah memiliki perbedaan sektor ekonomi unggulan daerah yang berkontribusi terhadap PDRB Kecamatan. Lima kecamatan dengan nilai PDRB tertinggi, yaitu kecamatan Plumbon,

Palimanan, Depok, Plered dan Weru ditunjang dari sektor industri pengolahan, baik pengolahan makanan maupun non makanan. Keberadaan industri pengolahan rotan, meubel, batik, spirtus, tekstil, kabel, dan industri makanan termasuk makanan ringan menjadi sektor ekonomi unggulan yang potensial dikembangkan pada wilayah tersebut.

Pada lima kecamatan dengan kontribusi PDRB terendah, yang meliputi kecamatan Karangsembung, Beber, Waled, Greged, dan Pasaleman diketahui bahwa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor ungggulan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Karakteristik topografi wilayah, iklim, potensi sumberdaya alam dan ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor penunjang pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan diwilayah ini. Adapun komoditas pertanian yang potensial dikembangkan meliputi padi, ubi jalar, mangga, cabai merah dan tebu.

5.4 Korelasi PDRB dengan Sektor Unggulan

Tabel 5.17 Korelasi PDRB dengan Sektor Unggulan

Correlations

		PDRB	Sektor
PDRB	Pearson Correlation	1	.524**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	40	40
Sektor	Pearson Correlation	.524**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi pearson, terdapat korelasi antara nilai PDRB dengan sektor unggulan. Hal ini dapat diartikan bahwa, nilai PDRB yang tinggi disumbang oleh sektor unggulan pada Kecamatan tersebut. Nilai korelasi sebesar 0,524 menunjukkan bahwa korelasi ini memiliki hubungan yang sedang dan signifikan. Ada 4 sektor yang menjadi unggulan Kabupaten Cirebon. Keempat

sektor tersebut merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Cirebon. Empat sektor tersebut adalah :

1. Sektor Industri Pengolahan.

   Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor penyumbang terbesar dari PDRB. 22 persen dari PDRB Kabupaten Cirebon disumbang oleh sektor industri pengolahan. Pada Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-3 negara eksportir produk rotan terbesar dunia. Salah satu daerah penyumbang ekspor terbesar industri rotan di Indonesia adalah Kabupaten Cirebon. Selain industri pengolahan rotan, Kabupaten Cirebon juga merupakan sentra batik Jawa Barat. Lima Kecamatan yang mempunyai nilai tertinggi PDRB di Kabupaten Cirebon berasal dari sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulannya. Kelima Kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Plumbon, Palimanan, Depok, Plered dan Weru. Selain itu, ada Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan menjadikan sektor ini sebagai sektor unggulan PDRB Kecamatannya.

2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

   Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 16,05% dari total PDRB Kabupaten Cirebon. Terdapat 11 Kecamatan yang PDRB nya disumbang oleh sektor ini. Kecamatan tersebut adalah : Arjawinangun, Panuragan, Sumber, Dukuhpuntang, Kedawung, Cileduk, Lemahabang, Tengahtani, Klangenan, Pabuaran dan Jamblang.

   Dari 11 Kecamatan tersebut, Kecamatan Arjawinangun memiliki peringkat tertinggi nilai PDRB nya. Kecamatan Arjawinangun merupakan sentra perdagangan terbesar di Kabupaten Cirebon, karena memiliki pasar Tegal Gubuk, yaitu pasar sandang terbesar di Asia Tenggara.

3. Sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan.

   Pada Sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan didominasi oleh Kecamatan yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dengan wilayah lain dan jauh dari pusat ibukota Kabupaten. Sektor ini menyumbang 16,2% dari total PDRB Kabupaten Cirebon. Terdapat 20 Kecamatan yang disumbang pada sektor ini. Kecamatan tersebut adalah Gegesik, Gunungjati, Kapetakan, Susukan, Losari, Gebang, Suranenggala, Babakan, Kaliwedi, Ciwaringin, Sedong, Susukan Lebak, Pabedilan, Gempol,

Karangwareng, Karangsembung, Beber, Waled, Greged, Pasaleman.

4. Sektor Konstruksi

   Sektor Kontruksi menyumbang 17,9% dari total PDRB Kabupaten Cirebon. Kecamatan yang tertinggi pada sektor ini ada 2 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Talun dan Kecamatan Mundu

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis PDRB Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kecamatan yang memilliki PDRB tertinggi di Kabupaten Cirebon meliputi kecamatan Plumbon, Palimanan, Depok, Plered dan Weru. Sedangkan kecamatan yang memiliki PDRB kecamatan terendah meliputi Kecamatan Karangsembung, Beber, Waled, Greged, dan Pasaleman.
2. Pada wilayah kecamatan dengan nilai PDRB tertinggi, sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari sektor industri pengolahan, baik makanan maupun non makanan. Industri pengolahan menyumbang lebih dari 46% dari total PDRB kecamatan.
3. Pada wilayah dengan PDRB terendah sektor ekonomi penyumbang PDRB kecamatan terbesar berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan menyumbang lebih dari 23% dari total PDRB Kecamatan.
4. Karakteristik wilayah seperti kondisi topografi, iklim, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sumberdaya alam dan aksesibilitas atau infrastruktur merupakan faktor pendukung terhadap capaian PDRB wilayah kecamatan.
5. Industri pengolahan yang menjadi potensi unggulan untuk dikembangkan adalah industri rotan, mebeul, batik, tekstil, kapur, dan industri pengolahan makanan termasuk makanan kecil. Sedangkan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, komoditas unggulan yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah padi, bawang merah, cabai merah, mangga, perikanan laut dan tambak.
6. Berdasarkan hasil korelasi pearson, empat sektor unggulan Kabupaten Cirebon berpengaruh nyata pada tingginya nilai PDRB. Empat sektor unggulan tersebut adalah Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; serta Sektor Konstruksi.

6.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan analisis PDRB Kecamatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis PDRB Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi salah satu dasar penentuan kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Cirebon
2. Pengembangan salah satu sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di setiap kecamatan hendaknya mempertimbangkan dampak yang akan timbul, diantaranya adalah kemacetan dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga dibutuhkan penataan wilayah yang komprehensif.
3. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan potensi produksi diantaranya adalah :
    a. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi di masing-masing sektor unggulan termasuk untuk kelompok tani.
       Pembinaan dan pelatihan untuk industri pengolahan minimal mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pola ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk industri pengolahan makanan.
    b. Diversifikasi produk sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk atau komoditas pertanian.
    c. Perlindungan terhadap harga produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan agar keberlangsungan berkembangnya industri, UMKM, produk pertanian dapat terjaga.
    d. Pengembangan potensi lain yang dapat muncul dari sektor unggulan tersebut. Sebagai contoh adalah pengembangan agrowisata yang dapat muncul dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
4. Berdasarkan hasil uji korelasi, maka sebaiknya Pemda Kabupaten Cirebon memberikan perhatian yang lebih terhadap pengembangan empat sektor unggulan yaitu Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; serta Sektor Konstruksi. Hal ini berguna meningkatkan PDRB Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon dan Sekitarnya Propinsi jawa Barat Tahun 2014-2019 (persen)

Kabupaten / Kota / Propinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
	2 014	2 015	2 016*	2 017**	2 018***	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Cirebon	5,07	4,88	5,63	5,06	5,02	4,86
Kabupaten Kuningan	6,33	6,38	6,09	6,36	6,43	6,56
Kabupaten Majalengka	5,47	5,34	6,08	6,89	6,13	7,14
Kabupaten Indramayu	5,87	4,62	5,65	3,19	4,62	3,20
Kota Cirebon	5,71	5,81	6,09	5,80	6,21	6,29
Propinsi Jawa Barat	5,09	5,05	5,66	5,35	5,64	5,07

Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Persen)

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.26	-3.51	6.03	1.52	2.25	15.20
B	Pertambangan dan Penggalian	4.33	0.48	-2.45	0.33	2.48	1.06
C	Industri Pengolahan	4.95	5.30	5.81	5.07	5.15	20.35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.47	3.37	6.53	9.03	2.50	0.24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.28	4.89	5.28	7.71	4.60	0.10
F	Konstruksi	5.15	8.07	4.92	4.31	6.98	11.76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.26	3.42	3.59	4.41	3.25	15.44
H	Transportasi dan Pergudangan	8.49	8.72	7.39	6.35	5.89	8.49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.20	3.56	3.94	7.70	2.74	3.49
J	Informasi dan Komunikasi	12.69	13.37	10.58	9.58	9.01	2.28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.34	12.41	9.77	4.91	7.08	3.86
L	Real Estate	5.38	4.21	4.52	9.73	8.78	2.30
M,N	Jasa Perusahaan	8.65	7.76	8.97	9.40	8.57	0.90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.53	3.88	2.14	0.40	2.07	3.05
P	Jasa Pendidikan	13.80	10.36	6.29	9.53	7.81	5.78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.53	10.60	8.78	7.77	7.32	2.01
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.69	9.45	8.17	9.44	6.07	3.70
	Jumlah	**5.07**	**4.87**	**5.63**	**5.06**	**5.02**	**4.86**

Lampiran 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Dirinci Menurut Kategori Tahun 2019 (Persen)

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		2019	Kelompok Kategori
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.20	Sangat Tinggi
B	Pertambangan dan Penggalian	1.06	Sedang
C	Industri Pengolahan	20.35	Sangat Tinggi
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.24	Sedang
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, L	0.10	Sedang
F	Konstruksi	11.76	Sangat Tinggi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Repara	15.44	Sangat Tinggi
H	Transportasi dan Pergudangan	8.49	Sangat Tinggi
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Min	3.49	Sedang
J	Informasi dan Komunikasi	2.28	Sedang
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.86	Sedang
L	Real Estate	2.30	Sedang
M,N	Jasa Perusahaan	0.90	Sedang
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	3.05	Sedang
P	Jasa Pendidikan	5.78	Tinggi
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.01	Sedang
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.70	Sedang
	Jumlah	**4.86**	

Lampiran 4. PDRB Per Kapita Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHB per Kapita
2014	32,579,051.03	15.44
2015	35,734,651.33	16.81
2016	38,840,772.25	18.12
2017	41,919,286.13	19.41
2018	45,461,939.30	20.66
2019	49,639,012.37	22.06

Lampiran 5. Perubahan Peringkat PDRB Per Kecamatan Kabupaten Cirebon Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2018 dan 2019

No	Kecamatan	2 018		2 019	
		PDRB ADHB (Milyar Rp)	Peringkat	PDRB ADHB (Milyar Rp)	Peringkat
1	Arjawinangun	1.688.925.358	7	1.806.788.775	7
2	Astanajapura	1.734.472.100	6	1.865.771.638	6
3	Babakan	1.014.978.380	20	1.071.512.676	24
4	Beber	610.673.080	35	644.687.571	37
5	Ciledug	1.073.378.460	16	1.133.165.640	18
6	Ciwaringin	777.024.030	29	820.304.268	30
7	Depok	2.324.172.180	3	2.502.470.352	3
8	Dukupuntang	1.187.707.400	11	1.253.862.702	13
9	Gebang	1.062.167.430	17	1.121.330.156	22
10	Gegesik	1.318.520.300	8	1.391.961.881	8
11	Gempol	705.038.300	31	744.308.933	33
12	Greged	477.061.831	39	538.192.345	39
13	Gunungjati	1.314.936.410	9	1.388.178.368	9
14	Jamblang	690.452.340	32	728.910.535	34
15	Kaliwedi	839.229.669	28	885.974.761	28
16	Kapetakan	1.183.478.988	12	1.321.258.558	10
17	Karangsembung	608.055.990	36	678.209.696	36
18	Karangwareng	607.883.060	37	678.827.617	35
19	Kedawung	1.029.936.323	19	1.156.810.402	16
20	Klangenan	860.822.389	26	959.992.305	26
21	Lemahabang	1.007.034.340	21	1.127.312.594	19
22	Losari	1.004.220.580	23	1.122.717.324	21
23	Mundu	1.031.752.104	18	1.145.313.428	17
24	Pabedilan	675.040.010	34	754.754.459	32
25	Pabuaran	844.533.150	27	938.692.958	27
26	Palimanan	2.768.822.080	2	3.058.991.330	2
27	Pangenan	897.857.375	25	1.001.079.021	25
28	Panguragan	1.192.463.020	10	1.301.828.692	11
29	Pasaleman	413.640.390	40	458.704.228	40
30	Plered	2.165.158.912	4	2.402.506.164	4
31	Plumbon	2.918.370.027	1	3.141.324.134	1
32	Sedong	748.043.397	30	835.685.795	29
33	Sumber	1.120.351.514	13	1.263.762.207	12
34	Suranenggala	965.567.210	24	1.078.685.420	23
35	Susukan	1.116.341.070	14	1.250.277.079	14
36	Susukan Lebak	680.612.212	33	762.997.002	31
37	Talun	1.094.534.102	15	1.217.744.984	15
38	Tengah Tani	1.005.644.021	22	1.126.249.781	20
39	Waled	565.391.980	38	625.782.984	38
40	Weru	2.105.820.340	5	2.332.083.608	5
	Kabupaten Cirebon	45,461,939.30		49.639.012.370	

Lampiran 6. Peranan/Distribusi kategori Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Urutan	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Pertanian Tahun 2019 (%)	Keterangan
1	Suranenggala	43,93	Sangat Potensi
2	Kapetakan	42,72	Sangat Potensi
3	Pasaleman	41,65	Sangat Potensi
4	Gegesik	38,35	Sangat Potensi
5	Waled	37,57	Sangat Potensi
6	Susukan	36,93	Sangat Potensi
7	Kaliwedi	36,14	Sangat Potensi
8	Gempol	35,35	Sangat Potensi
9	Ciwaringin	32,62	Sangat Potensi
10	Pabedilan	31,59	Sangat Potensi
11	Losari	31,02	Sangat Potensi
12	Babakan	30,35	Sangat Potensi
13	Sedong	28,54	Potensi
14	Gebang	27,75	Potensi
15	Greged	26,23	Potensi
16	Beber	26,02	Potensi
17	Karangsembung	22,97	Potensi
18	Karangwareng	22,88	Potensi
19	Gunung Jati	21,26	Potensi
20	Mundu	19,66	Potensi
21	Klangenan	16,87	Potensi
22	Talun	16,33	Potensi
23	Pangenan	14,38	Kurang Potensi
24	Jamblang	13,50	Kurang Potensi
25	Astanajapura	12,79	Kurang Potensi
26	Lemahabang	11,93	Kurang Potensi
27	Susukan Lebak	11,67	Kurang Potensi
28	Pabuaran	11,31	Kurang Potensi
29	Sumber	9,72	Kurang Potensi
30	Dukupuntang	9,35	Kurang Potensi
31	Ciledug	8,73	Kurang Potensi
32	Panguragan	8,52	Kurang Potensi
33	Arjawinangun	5,75	Kurang Potensi
34	Palimanan	3,91	Kurang Potensi
35	Kedawung	3,79	Kurang Potensi
36	Tengah Tani	3,47	Kurang Potensi
37	Depok	2,46	Kurang Potensi
38	Plumbon	1,90	Kurang Potensi
39	Plered	1,83	Kurang Potensi
40	Weru	1,53	Kurang Potensi
	kab.cirebon	15,20	

Lampiran 7. Peranan/Distribusi Kategori Industri Pengolahan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi	Keterangan
1	Plumbon	66.64	Sangat Potensi
2	Depok	63.92	Sangat Potensi
3	Weru	51.62	Sangat Potensi
4	Palimanan	49.27	Sangat Potensi
5	Plered	48.38	Sangat Potensi
6	Pangenan	41.34	Potensi
7	Astanajapura	31.02	Potensi
8	Mundu	23.03	Kurang Potensi
9	Karangsembung	15.53	Kurang Potensi
10	Kedawung	14.19	Kurang Potensi
11	Susukan Lebak	14.18	Kurang Potensi
12	Karangwareng	13.73	Kurang Potensi
13	Lemahabang	13.57	Kurang Potensi
14	Tengah Tani	12.97	Kurang Potensi
15	Talun	12.32	Kurang Potensi
16	Pabuaran	11.17	Kurang Potensi
17	Ciledug	10.02	Kurang Potensi
18	Babakan	9.68	Kurang Potensi
19	Gebang	9.15	Kurang Potensi
20	Waled	7.51	Kurang Potensi
21	Pasaleman	6.94	Kurang Potensi
22	Ciwaringin	5.61	Kurang Potensi
23	Jamblang	5.31	Kurang Potensi
24	Klangenan	5.00	Kurang Potensi
25	Gunung Jati	4.86	Kurang Potensi
26	Gempol	4.32	Kurang Potensi
27	Pabedilan	3.57	Kurang Potensi
28	Greged	3.20	Kurang Potensi
29	Losari	2.71	Kurang Potensi
30	Dukupuntang	2.63	Kurang Potensi
31	Sedong	2.58	Kurang Potensi
32	Beber	2.52	Kurang Potensi
33	Sumber	2.35	Kurang Potensi
34	Arjawinangun	1.94	Kurang Potensi
35	Susukan	1.92	Kurang Potensi
36	Panguragan	1.73	Kurang Potensi
37	Gegesik	1.65	Kurang Potensi
38	Kaliwedi	1.50	Kurang Potensi
39	Suranenggala	1.16	Kurang Potensi
40	Kapetakan	1.14	Kurang Potensi
	Kabupaten Cirebon	20.35	

Lampiran 8. Peranan/Distribusi Kategori Konstruksi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Konstruksi Tahun 2019	Keterangan
1	Talun	36,21	Sangat Potensi
2	Sedong	31,71	Sangat Potensi
3	Susukan	26,84	Sangat Potensi
4	Mundu	23,89	Potensi
5	Beber	23,75	Potensi
6	Greged	23,54	Potensi
7	Ciwaringin	18,72	Potensi
8	Kaliwedi	17,26	Potensi
9	Gempol	17,25	Potensi
10	Gegesik	16,84	Potensi
11	Jamblang	15,78	Potensi
12	Klangenan	15,27	Potensi
13	Losari	14,09	Kurang Potensi
14	Pabedilan	14,06	Kurang Potensi
15	Karangwareng	13,52	Kurang Potensi
16	Karangsembung	13,51	Kurang Potensi
17	Susukan Lebak	13,19	Kurang Potensi
18	Lemahabang	13,14	Kurang Potensi
19	Suranenggala	12,52	Kurang Potensi
20	Sumber	12,23	Kurang Potensi
21	Kapetakan	12,01	Kurang Potensi
22	Gebang	11,57	Kurang Potensi
23	Tengah Tani	11,26	Kurang Potensi
24	Dukupuntang	11,22	Kurang Potensi
25	Kedawung	11,11	Kurang Potensi
26	Ciledug	11,05	Kurang Potensi
27	Babakan	11,02	Kurang Potensi
28	Pabuaran	10,71	Kurang Potensi
29	Gunung Jati	10,57	Kurang Potensi
30	Panguragan	8,69	Kurang Potensi
31	Waled	7,90	Kurang Potensi
32	Arjawinangun	7,82	Kurang Potensi
33	Astanajapura	7,55	Kurang Potensi
34	Pasaleman	7,28	Kurang Potensi
35	Palimanan	7,11	Kurang Potensi
36	Pangenan	7,08	Kurang Potensi
37	Plered	5,52	Kurang Potensi
38	Weru	5,24	Kurang Potensi
39	Depok	3,95	Kurang Potensi
40	Plumbon	3,55	Kurang Potensi
	Kabupaten Cirebon	11,76	

Lampiran 9. Peranan/Distribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Pertanian Tahun 2019	Keterangan
1	Arjawinangun	48,06	Sangat Potensi
2	Panguragan	46,74	Sangat Potensi
3	Kedawung	27,13	Potensi
4	Pabuaran	24,97	Potensi
5	Tengah Tani	24,73	Potensi
6	Ciledug	24,25	Potensi
7	Klangenan	22,16	Potensi
8	Sumber	21,73	Potensi
9	Gebang	20,95	Potensi
10	Jamblang	20,23	Potensi
11	Dukupuntang	19,42	Kurang Potensi
12	Kapetakan	19,21	Kurang Potensi
13	Suranenggala	18,15	Kurang Potensi
14	Karangsembung	17,44	Kurang Potensi
15	Pabedilan	17,36	Kurang Potensi
16	Sedong	17,22	Kurang Potensi
17	Karangwareng	17,06	Kurang Potensi
18	Babakan	17,01	Kurang Potensi
19	Losari	16,42	Kurang Potensi
20	Lemahabang	15,87	Kurang Potensi
21	Susukan Lebak	15,32	Kurang Potensi
22	Weru	15,06	Kurang Potensi
23	Plered	14,72	Kurang Potensi
24	Beber	13,75	Kurang Potensi
25	Greged	13,52	Kurang Potensi
26	Gunung Jati	12,43	Kurang Potensi
27	Mundu	11,93	Kurang Potensi
28	Gegesik	11,35	Kurang Potensi
29	Gempol	10,58	Kurang Potensi
30	Kaliwedi	10,57	Kurang Potensi
31	Ciwaringin	10,32	Kurang Potensi
32	Talun	9,82	Kurang Potensi
33	Pangenan	8,83	Kurang Potensi
34	Susukan	8,64	Kurang Potensi
35	Waled	8,51	Kurang Potensi
36	Astanajapura	8,32	Kurang Potensi
37	Pasaleman	8,25	Kurang Potensi
38	Depok	6,64	Kurang Potensi
39	Plumbon	5,44	Kurang Potensi
40	Palimanan	5,34	Kurang Potensi
	Kab. Cirebon	15,44	

Lampiran 10. Peranan/Distribusi Kategori Transportasi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Transportasi Tahun 2019	Keterangan
1	Klangenan	15,94	Sangat Potensi
2	Sumber	15,68	Sangat Potensi
3	Palimanan	14,62	Sangat Potensi
4	Jamblang	13,56	Sangat Potensi
5	Dukupuntang	13,12	Sangat Potensi
6	Kaliwedi	12,56	Sangat Potensi
7	Susukan	11,75	Potensi
8	Kapetakan	11,52	Potensi
9	Gunung Jati	10,54	Potensi
10	Mundu	10,50	Potensi
11	Gegesik	10,35	Potensi
12	Suranenggala	10,10	Potensi
13	Talun	9,79	Potensi
14	Arjawinangun	8,70	Potensi
15	Panguragan	8,03	Potensi
16	Pasaleman	7,75	Kurang Potensi
17	Pabuaran	7,48	Kurang Potensi
18	Gempol	7,27	Kurang Potensi
19	Waled	7,12	Kurang Potensi
20	Ciledug	7,1	Kurang Potensi
21	Ciwaringin	6,75	Kurang Potensi
22	Karangsembung	6,63	Kurang Potensi
23	Greged	6,46	Kurang Potensi
24	Plumbon	6,35	Kurang Potensi
25	Astanajapura	6,3	Kurang Potensi
26	Susukan Lebak	6,29	Kurang Potensi
27	Pangenan	6,06	Kurang Potensi
28	Babakan	6,02	Kurang Potensi
29	Beber	5,87	Kurang Potensi
30	Karangwareng	5,71	Kurang Potensi
31	Plered	5,67	Kurang Potensi
32	Tengah Tani	5,59	Kurang Potensi
33	Kedawung	5,38	Kurang Potensi
34	Losari	5,33	Kurang Potensi
35	Lemahabang	5,30	Kurang Potensi
36	Pabedilan	5,08	Kurang Potensi
37	Gebang	5,07	Kurang Potensi
38	Sedong	4,90	Kurang Potensi
39	Depok	4,60	Kurang Potensi
40	Weru	4,02	Kurang Potensi
	Kabupaten Cirebon	8,18	

Lampiran 11. Peranan/Distribusi Kategori Pendidikan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Jasa Pendidikan Tahun 2019	Keterangan
1	Astanajapura	14.25	Sangat Potensi
2	Pangenan	11.97	Sangat Potensi
3	Dukupuntang	9.45	Potensi
4	Sumber	9.09	Potensi
5	Ciwaringin	8.81	Potensi
6	Plered	8.26	Potensi
7	Gempol	8.23	Potensi
8	Tengah Tani	7.82	Potensi
9	Weru	7.72	Potensi
10	Kedawung	7.10	Potensi
11	Panguragan	6.35	Potensi
12	Karangwareng	5.94	Kurang Potensi
13	Arjawinangun	5.84	Kurang Potensi
14	Susukan Lebak	5.69	Kurang Potensi
15	Karangsembung	5.54	Kurang Potensi
16	Pabedilan	5.19	Kurang Potensi
17	Losari	5.07	Kurang Potensi
18	Lemahabang	4.92	Kurang Potensi
19	Gunung Jati	4.76	Kurang Potensi
20	Beber	4.69	Kurang Potensi
21	Greged	4.48	Kurang Potensi
22	Palimanan	4.27	Kurang Potensi
23	Pabuaran	3.92	Kurang Potensi
24	Gegesik	3.84	Kurang Potensi
25	Kaliwedi	3.76	Kurang Potensi
26	Ciledug	3.75	Kurang Potensi
27	Suranenggala	3.75	Kurang Potensi
28	Sedong	3.31	Kurang Potensi
29	Kapetakan	3.30	Kurang Potensi
30	Pasaleman	2.75	Kurang Potensi
31	Jamblang	2.72	Kurang Potensi
32	Babakan	2.69	Kurang Potensi
33	Depok	2.62	Kurang Potensi
34	Gebang	2.48	Kurang Potensi
35	Mundu	2.38	Kurang Potensi
36	Plumbon	2.28	Kurang Potensi
37	Waled	2.16	Kurang Potensi
38	Klangenan	2.01	Kurang Potensi
39	Susukan	1.93	Kurang Potensi
40	Talun	1.84	Kurang Potensi

Lampiran 12. Peranan/Distribusi Kategori Keuangan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Jasa Keuangan Tahun 2019	Keterangan
1	Lemahabang	16.23	Sangat Potensi
2	Susukan Lebak	15.82	Sangat Potensi
3	Dukupuntang	13.15	Sangat Potensi
4	Sumber	12.76	Sangat Potensi
5	Tengah Tani	8.55	Potensi
6	Kedawung	7.49	Potensi
7	Jamblang	5.24	Kurang Potensi
8	Gempol	5.23	Kurang Potensi
9	Ciwaringin	5.17	Kurang Potensi
10	Klangenan	4.61	Kurang Potensi
11	Losari	4.31	Kurang Potensi
12	Pabedilan	4.28	Kurang Potensi
13	Ciledug	3.89	Kurang Potensi
14	Greged	3.76	Kurang Potensi
15	Babakan	3.65	Kurang Potensi
16	Pabuaran	3.51	Kurang Potensi
17	Gebang	3.25	Kurang Potensi
18	Depok	3.13	Kurang Potensi
19	Susukan	2.93	Kurang Potensi
20	Plumbon	2.81	Kurang Potensi
21	Karangwareng	2.78	Kurang Potensi
22	Karangsembung	2.45	Kurang Potensi
23	Arjawinangun	2.45	Kurang Potensi
24	Gunung Jati	2.45	Kurang Potensi
25	Panguragan	2.25	Kurang Potensi
26	Beber	2.13	Kurang Potensi
27	Waled	2.06	Kurang Potensi
28	Pasaleman	2.02	Kurang Potensi
29	Suranenggala	1.66	Kurang Potensi
30	Kapetakan	1.51	Kurang Potensi
31	Plered	1.48	Kurang Potensi
32	Weru	1.34	Kurang Potensi
33	Palimanan	1.31	Kurang Potensi
34	Kaliwedi	1.24	Kurang Potensi
35	Astanajapura	0.79	Kurang Potensi
36	Gegesik	0.63	Kurang Potensi
37	Mundu	0.57	Kurang Potensi
38	Talun	0.50	Kurang Potensi
39	Pangenan	0.44	Kurang Potensi
40	Sedong	0.15	Kurang Potensi

Lampiran 13. Peranan/Distribusi Kategori Akomodasi dan Makan Minum Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2019	Keterangan
1	Ciledug	7.92	Sangat Potensi
2	Pabuaran	7.87	Sangat Potensi
3	Kedawung	6.97	Sangat Potensi
4	Tengah Tani	6.62	Sangat Potensi
5	Beber	6.3	Sangat Potensi
6	Greged	5.53	Potensi
7	Talun	5.15	Potensi
8	Jamblang	4.72	Potensi
9	Losari	4.47	Potensi
10	Waled	4.06	Potensi
11	Dukupuntang	4.05	Potensi
12	Sumber	4.03	Potensi
13	Plumbon	3.90	Potensi
14	Pasaleman	3.86	Potensi
15	Pabedilan	3.86	Potensi
16	Depok	3.82	Potensi
17	Klangenan	3.68	Potensi
18	Plered	3.34	Potensi
19	Kaliwedi	3.29	Potensi
20	Weru	3.27	Potensi
21	Gunung Jati	3.27	Potensi
22	Sedong	3.18	Potensi
23	Babakan	3.05	Kurang Potensi
24	Gebang	2.82	Kurang Potensi
25	Suranenggala	2.60	Kurang Potensi
26	Susukan	2.60	Kurang Potensi
27	Karangwareng	2.59	Kurang Potensi
28	Kapetakan	2.58	Kurang Potensi
29	Gegesik	2.54	Kurang Potensi
30	Karangsembung	2.36	Kurang Potensi
31	Arjawinangun	2.14	Kurang Potensi
32	Panguragan	1.86	Kurang Potensi
33	Astanajapura	1.62	Kurang Potensi
34	Palimanan	1.54	Kurang Potensi
35	Ciwaringin	1.42	Kurang Potensi
36	Gempol	1.42	Kurang Potensi
37	Pangenan	1.18	Kurang Potensi
38	Lemahabang	0.84	Kurang Potensi
39	Mundu	0.83	Kurang Potensi
40	Susukan Lebak	0.79	Kurang Potensi

Lampiran 14. Peranan/Distribusi Kategori Administrasi Pemerintahan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Administrasi Pemerintahan Tahun 2019	Keterangan
1	Waled	6.42	Sangat Potensi
2	Pasaleman	5.52	Sangat Potensi
3	Karangwareng	5.36	Sangat Potensi
4	Beber	5.3	Sangat Potensi
5	Karangsembung	4.77	Sangat Potensi
6	Losari	4.42	Potensi
7	Lemahabang	4.31	Potensi
8	Susukan Lebak	4.29	Potensi
9	Greged	4.23	Potensi
10	Jamblang	4.21	Potensi
11	Pabedilan	4.20	Potensi
12	Babakan	4.13	Potensi
13	Gebang	4.13	Potensi
14	Gunung Jati	3.98	Potensi
15	Klangenan	3.94	Potensi
16	Talun	3.83	Potensi
17	Gegesik	3.52	Potensi
18	Suranenggala	3.50	Potensi
19	Gempol	3.48	Potensi
20	Kapetakan	3.39	Potensi
21	Ciwaringin	3.37	Potensi
22	Susukan	3.26	Potensi
23	Ciledug	3.25	Potensi
24	Pabuaran	2.91	Kurang Potensi
25	Arjawinangun	2.90	Kurang Potensi
26	Panguragan	2.81	Kurang Potensi
27	Palimanan	2.71	Kurang Potensi
28	Kaliwedi	2.45	Kurang Potensi
29	Astanajapura	2.41	Kurang Potensi
30	Tengah Tani	2.37	Kurang Potensi
31	Dukupuntang	2.32	Kurang Potensi
32	Sumber	2.18	Kurang Potensi
33	Mundu	2.12	Kurang Potensi
34	Kedawung	2.02	Kurang Potensi
35	Depok	1.72	Kurang Potensi
36	Sedong	1.70	Kurang Potensi
37	Pangenan	1.53	Kurang Potensi
38	Plered	1.43	Kurang Potensi
39	Plumbon	1.30	Kurang Potensi
40	Weru	1.29	Kurang Potensi

Lampiran 15. Peranan/Distribusi Kategori Jasa Lainnya Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Jasa Kesehatan Tahun 2019	Keterangan
1	Gunung Jati	17.36	Sangat Potensi
2	Tengah Tani	6.84	Potensi
3	Kedawung	6.48	Potensi
4	Ciledug	6.25	Potensi
5	Gebang	5.92	Potensi
6	Pabuaran	5.65	Kurang Potensi
7	Waled	5.09	Kurang Potensi
8	Panguragan	4.86	Kurang Potensi
9	Babakan	4.75	Kurang Potensi
10	Pasaleman	4.29	Kurang Potensi
11	Arjawinangun	4.10	Kurang Potensi
12	Plered	3.76	Kurang Potensi
13	Weru	3.56	Kurang Potensi
14	Karangwareng	3.22	Kurang Potensi
15	Dukupuntang	3.06	Kurang Potensi
16	Gegesik	3.02	Kurang Potensi
17	Karangsembung	2.96	Kurang Potensi
18	Sumber	2.94	Kurang Potensi
19	Palimanan	2.89	Kurang Potensi
20	Jamblang	2.87	Kurang Potensi
21	Klangenan	2.80	Kurang Potensi
22	Depok	2.72	Kurang Potensi
23	Losari	2.58	Kurang Potensi
24	Plumbon	2.50	Kurang Potensi
25	Pabedilan	2.48	Kurang Potensi
26	Astanajapura	2.21	Kurang Potensi
27	Sedong	2.18	Kurang Potensi
28	Lemahabang	2.15	Kurang Potensi
29	Kaliwedi	2.12	Kurang Potensi
30	Susukan Lebak	1.97	Kurang Potensi
31	Gempol	1.45	Kurang Potensi
32	Pangenan	1.30	Kurang Potensi
33	Talun	1.24	Kurang Potensi
34	Ciwaringin	1.22	Kurang Potensi
35	Suranenggala	1.18	Kurang Potensi
36	Kapetakan	1.13	Kurang Potensi
37	Mundu	1.08	Kurang Potensi
38	Susukan	0.59	Kurang Potensi
39	Beber	0.25	Kurang Potensi
40	Greged	0.15	Kurang Potensi

Lampiran 16. Peranan/Distribusi Kategori Pertambangan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Pertambangan Tahun 2019	Keterangan
1	Waled	8.16	Sangat Potensi
2	Pasaleman	6.82	Sangat Potensi
3	Astanajapura	5.20	Potensi
4	Palimanan	3.65	Potensi
5	Beber	3.35	Potensi
6	Pangenan	2.95	Potensi
7	Dukupuntang	2.92	Potensi
8	Mundu	2.77	Potensi
9	Lemahabang	2.73	Kurang Potensi
10	Greged	2.54	Kurang Potensi
11	Susukan Lebak	2.35	Kurang Potensi
12	Sumber	2.06	Kurang Potensi
13	Talun	2.01	Kurang Potensi
14	Sedong	1.59	Kurang Potensi
15	Gebang	1.32	Kurang Potensi
16	Karangsembung	1.03	Kurang Potensi
17	Babakan	1.01	Kurang Potensi
18	Ciwaringin	0.82	Kurang Potensi
19	Karangwareng	0.81	Kurang Potensi
20	Gempol	0.65	Kurang Potensi
21	Tengah Tani	0.30	Kurang Potensi
22	Kedawung	0.26	Kurang Potensi
23	Depok	0.25	Kurang Potensi
24	Ciledug	0.19	Kurang Potensi
25	Plumbon	0.18	Kurang Potensi
26	Pabuaran	0.15	Kurang Potensi
27	Arjawinangun	0.00	Kurang Potensi
28	Gegesik	0.00	Kurang Potensi
29	Gunung Jati	0.00	Kurang Potensi
30	Jamblang	0.00	Kurang Potensi
31	Kaliwedi	0.00	Kurang Potensi
32	Kapetakan	0.00	Kurang Potensi
33	Klangenan	0.00	Kurang Potensi
34	Losari	0.00	Kurang Potensi
35	Pabedilan	0.00	Kurang Potensi
36	Panguragan	0.00	Kurang Potensi
37	Plered	0.00	Kurang Potensi
38	Suranenggala	0.00	Kurang Potensi
39	Susukan	0.00	Kurang Potensi
40	Weru	0.00	Kurang Potensi

Lampiran 17. Peranan/Distribusi Kategori Listrik dan Gas Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Listrik dan Gas Tahun 2019	Keterangan
1	Sumber	1.08	Sangat Potensi
2	Tengah Tani	1.02	Sangat Potensi
3	Dukupuntang	1.02	Sangat Potensi
4	Kaliwedi	1.02	Sangat Potensi
5	Susukan Lebak	1.00	Sangat Potensi
6	Kedawung	0.99	Sangat Potensi
7	Ciledug	0.90	Sangat Potensi
8	Lemahabang	0.89	Sangat Potensi
9	Klangenan	0.82	Sangat Potensi
10	Pabuaran	0.67	Potensi
11	Jamblang	0.65	Potensi
12	Losari	0.37	Kurang Potensi
13	Pabedilan	0.35	Kurang Potensi
14	Panguragan	0.25	Kurang Potensi
15	Arjawinangun	0.24	Kurang Potensi
16	Gegesik	0.22	Kurang Potensi
17	Plered	0.14	Kurang Potensi
18	Weru	0.13	Kurang Potensi
19	Astanajapura	0.00	Kurang Potensi
20	Babakan	0.00	Kurang Potensi
21	Beber	0.00	Kurang Potensi
22	Ciwaringin	0.00	Kurang Potensi
23	Depok	0.00	Kurang Potensi
24	Gebang	0.00	Kurang Potensi
25	Gempol	0.00	Kurang Potensi
26	Greged	0.00	Kurang Potensi
27	Gunung Jati	0.00	Kurang Potensi
28	Kapetakan	0.00	Kurang Potensi
29	Karangsembung	0.00	Kurang Potensi
30	Karangwareng	0.00	Kurang Potensi
31	Mundu	0.00	Kurang Potensi
32	Palimanan	0.00	Kurang Potensi
33	Pangenan	0.00	Kurang Potensi
34	Pasaleman	0.00	Kurang Potensi
35	Plumbon	0.00	Kurang Potensi
36	Sedong	0.00	Kurang Potensi
37	Suranenggala	0.00	Kurang Potensi
38	Susukan	0.00	Kurang Potensi
39	Talun	0.00	Kurang Potensi
40	Waled	0.00	Kurang Potensi

Lampiran 18. Peranan/Distribusi Kategori Air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan Daur Ulang Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2019	Keterangan
1	Dukupuntang	0.50	Sangat Potensi
2	Suranenggala	0.50	Sangat Potensi
3	Kapetakan	0.49	Sangat Potensi
4	Kaliwedi	0.45	Sangat Potensi
5	Panguragan	0.44	Sangat Potensi
6	Arjawinangun	0.44	Sangat Potensi
7	Gegesik	0.27	Potensi
8	Sumber	0.25	Potensi
9	Greged	0.25	Potensi
10	Beber	0.24	Potensi
11	Karangwareng	0.09	Kurang Potensi
12	Karangsembung	0.09	Kurang Potensi
13	Susukan Lebak	0.08	Kurang Potensi
14	Lemahabang	0.08	Kurang Potensi
15	Pasaleman	0.08	Kurang Potensi
16	Waled	0.06	Kurang Potensi
17	Ciledug	0.06	Kurang Potensi
18	Pabuaran	0.05	Kurang Potensi
19	Palimanan	0.01	Kurang Potensi
20	Astanajapura	0.00	Kurang Potensi
21	Babakan	0.00	Kurang Potensi
22	Ciwaringin	0.00	Kurang Potensi
23	Depok	0.00	Kurang Potensi
24	Gebang	0.00	Kurang Potensi
25	Gempol	0.00	Kurang Potensi
26	Gunung Jati	0.00	Kurang Potensi
27	Jamblang	0.00	Kurang Potensi
28	Kedawung	0.00	Kurang Potensi
29	Klangenan	0.00	Kurang Potensi
30	Losari	0.00	Kurang Potensi
31	Mundu	0.00	Kurang Potensi
32	Pabedilan	0.00	Kurang Potensi
33	Pangenan	0.00	Kurang Potensi
34	Plered	0.00	Kurang Potensi
35	Plumbon	0.00	Kurang Potensi
36	Sedong	0.00	Kurang Potensi
37	Susukan	0.00	Kurang Potensi
38	Talun	0.00	Kurang Potensi
39	Tengah Tani	0.00	Kurang Potensi
40	Weru	0.00	Kurang Potensi

Lampiran 19. Peranan/Distribusi Kategori Informasi dan Komunikasi Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi Tahun 2019	Keterangan
1	Losari	7.95	Sangat Potensi
2	Pabuaran	7.83	Sangat Potensi
3	Lemahabang	7.58	Sangat Potensi
4	Ciledug	7.33	Sangat Potensi
5	Jamblang	7.23	Sangat Potensi
6	Klangenan	6.95	Sangat Potensi
7	Susukan Lebak	6.92	Sangat Potensi
8	Pabedilan	6.87	Sangat Potensi
9	Arjawinangun	6.08	Sangat Potensi
10	Panguragan	5.05	Potensi
11	Plered	3.27	Potensi
12	Weru	3.03	Potensi
13	Karangwareng	2.94	Potensi
14	Dukupuntang	2.05	Kurang Potensi
15	Karangsembung	2.01	Kurang Potensi
16	Sumber	1.98	Kurang Potensi
17	Palimanan	1.92	Kurang Potensi
18	Kaliwedi	1.67	Kurang Potensi
19	Gegesik	1.25	Kurang Potensi
20	Greged	1.23	Kurang Potensi
21	Depok	1.02	Kurang Potensi
22	Waled	0.98	Kurang Potensi
23	Susukan	0.97	Kurang Potensi
24	Mundu	0.96	Kurang Potensi
25	Plumbon	0.94	Kurang Potensi
26	Pasaleman	0.93	Kurang Potensi
27	Talun	0.88	Kurang Potensi
28	Astanajapura	0.82	Kurang Potensi
29	Beber	0.79	Kurang Potensi
30	Babakan	0.75	Kurang Potensi
31	Pangenan	0.60	Kurang Potensi
32	Gempol	0.56	Kurang Potensi
33	Gebang	0.54	Kurang Potensi
34	Tengah Tani	0.53	Kurang Potensi
35	Ciwaringin	0.48	Kurang Potensi
36	Suranenggala	0.48	Kurang Potensi
37	Gunung Jati	0.46	Kurang Potensi
38	Kedawung	0.45	Kurang Potensi
39	Kapetakan	0.42	Kurang Potensi
40	Sedong	0.35	Kurang Potensi

Lampiran 20. Peranan/Distribusi Kategori Real Estate Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Real Estate Tahun 2019	Keterangan
1	Sedong	4.31	Sangat Potensi
2	Waled	4.27	Sangat Potensi
3	Pasaleman	3.88	Sangat Potensi
4	Beber	3.6	Sangat Potensi
5	Susukan	3.43	Sangat Potensi
6	Tengah Tani	3.42	Sangat Potensi
7	Karangwareng	3.38	Sangat Potensi
8	Greged	3.26	Sangat Potensi
9	Kedawung	3.14	Potensi
10	Babakan	3.12	Potensi
11	Karangsembung	3.09	Potensi
12	Kaliwedi	2.76	Potensi
13	Gegesik	2.75	Potensi
14	Losari	2.70	Potensi
15	Gebang	2.65	Potensi
16	Pabedilan	2.63	Potensi
17	Kapetakan	2.46	Potensi
18	Suranenggala	2.39	Potensi
19	Ciledug	2.35	Potensi
20	Gunung Jati	2.35	Potensi
21	Astanajapura	2.31	Potensi
22	Talun	2.29	Potensi
23	Mundu	2.19	Potensi
24	Jamblang	2.13	Potensi
25	Pabuaran	2.03	Kurang Potensi
26	Susukan Lebak	1.99	Kurang Potensi
27	Lemahabang	1.96	Kurang Potensi
28	Klangenan	1.78	Kurang Potensi
29	Gempol	1.76	Kurang Potensi
30	Ciwaringin	1.72	Kurang Potensi
31	Pangenan	1.57	Kurang Potensi
32	Dukupuntang	1.52	Kurang Potensi
33	Arjawinangun	1.47	Kurang Potensi
34	Depok	1.41	Kurang Potensi
35	Panguragan	1.33	Kurang Potensi
36	Sumber	1.30	Kurang Potensi
37	Palimanan	1.13	Kurang Potensi
38	Plered	0.96	Kurang Potensi
39	Weru	0.95	Kurang Potensi
40	Plumbon	0.89	Kurang Potensi

Lampiran 21. Peranan/Distribusi Kategori Jasa Perusahaan Per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Distibusi PDRB Kategori Jasa Perusahaan Tahun 2019	Keterangan
1	Tengah Tani	4.53	Sangat Potensi
2	Kedawung	4.16	Sangat Potensi
3	Gunung Jati	3.54	Sangat Potensi
4	Sumber	1.40	Kurang Potensi
5	Weru	1.40	Kurang Potensi
6	Plered	1.33	Kurang Potensi
7	Palimanan	1.22	Kurang Potensi
8	Dukupuntang	1.08	Kurang Potensi
9	Babakan	0.74	Kurang Potensi
10	Ciledug	0.71	Kurang Potensi
11	Sedong	0.66	Kurang Potensi
12	Gebang	0.65	Kurang Potensi
13	Pabuaran	0.63	Kurang Potensi
14	Karangwareng	0.62	Kurang Potensi
15	Karangsembung	0.61	Kurang Potensi
16	Greged	0.57	Kurang Potensi
17	Depok	0.52	Kurang Potensi
18	Plumbon	0.44	Kurang Potensi
19	Astanajapura	0.36	Kurang Potensi
20	Jamblang	0.35	Kurang Potensi
21	Kaliwedi	0.34	Kurang Potensi
22	Lemahabang	0.34	Kurang Potensi
23	Talun	0.34	Kurang Potensi
24	Waled	0.34	Kurang Potensi
25	Pangenan	0.33	Kurang Potensi
26	Mundu	0.32	Kurang Potensi
27	Arjawinangun	0.32	Kurang Potensi
28	Klangenan	0.31	Kurang Potensi
29	Kapetakan	0.30	Kurang Potensi
30	Susukan Lebak	0.28	Kurang Potensi
31	Susukan	0.28	Kurang Potensi
32	Pasaleman	0.27	Kurang Potensi
33	Suranenggala	0.26	Kurang Potensi
34	Ciwaringin	0.25	Kurang Potensi
35	Gempol	0.25	Kurang Potensi
36	Losari	0.24	Kurang Potensi
37	Panguragan	0.23	Kurang Potensi
38	Gegesik	0.22	Kurang Potensi
39	Pabedilan	0.20	Kurang Potensi
40	Beber	0.19	Kurang Potensi

Lampiran 22. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Konstruksi
1	Arjawinangun	5.75	0.00	1.94	0.24	0.44	7.82
2	Astanajapura	12.79	5.2	31.02	0	0	7.55
3	Babakan	30.35	1.01	9.68	0	0	11.02
4	Beber	26.02	3.35	2.52	0	0.24	23.75
5	Ciledug	8.73	0.19	10.02	0.9	0.06	11.05
6	Ciwaringin	32.62	0.82	5.61	0.00	0.00	18.72
7	Depok	2.46	0.25	63.92	0.00	0.00	3.95
8	Dukupuntang	9.35	2.92	2.63	1.02	0.50	11.22
9	Gebang	27.75	1.32	9.15	0.00	0.00	11.57
10	Gegesik	38.35	0.00	1.65	0.22	0.27	16.84
11	Gempol	35.35	0.65	4.32	0.00	0.00	17.25
12	Greged	26.23	2.54	3.20	0.00	0.25	23.54
13	Gunung Jati	21.26	0.00	4.86	0.00	0.00	10.57
14	Jamblang	13.50	0.00	5.31	0.65	0.00	15.78
15	Kaliwedi	36.14	0.00	1.50	1.02	0.45	17.26
16	Kapetakan	42.72	0.00	1.14	0.00	0.49	12.01
17	Karangsembung	22.97	1.03	15.53	0.00	0.09	13.51
18	Karangwareng	22.88	0.81	13.73	0.00	0.09	13.52
19	Kedawung	3.79	0.26	14.19	0.99	0.00	11.11
20	Klangenan	16.87	0.00	5.00	0.82	0.00	15.27
21	Lemahabang	11.93	2.73	13.57	0.89	0.08	13.14
22	Losari	31.02	0.00	2.71	0.37	0.00	14.09
23	Mundu	19.66	2.77	23.03	0.00	0.00	23.89
24	Pabedilan	31.59	0.00	3.57	0.35	0.00	14.06
25	Pabuaran	11.31	0.15	11.17	0.67	0.05	10.71
26	Palimanan	3.91	3.65	49.27	0.00	0.01	7.11
27	Pangenan	14.38	2.95	41.34	0.00	0.00	7.08
28	Panguragan	8.52	0.00	1.73	0.25	0.44	8.69
29	Pasaleman	41.65	6.82	6.94	0.00	0.08	7.28
30	Plered	1.83	0.00	48.38	0.14	0.00	5.52
31	Plumbon	1.90	0.18	68.52	0.00	0.00	3.55
32	Sedong	28.54	1.59	2.58	0.00	0.00	31.71
33	Sumber	9.72	2.06	2.35	1.08	0.25	12.23
34	Suranenggala	43.93	0.00	1.16	0.00	0.50	12.52
35	Susukan	36.93	0.00	1.92	0.00	0.00	26.84
36	Susukan Lebak	11.67	2.35	14.18	1.00	0.08	13.19
37	Talun	16.33	2.01	12.32	0.00	0.00	36.21
38	Tengah Tani	3.47	0.30	12.97	1.02	0.00	11.26
39	Waled	37.57	8.16	7.51	0.00	0.06	7.90
40	Weru	1.53	0.00	51.62	0.13	0.00	5.24
	2019 Kab Cirebon	15.20	1.06	20.35	0.24	0.10	11.76

Lanjutan..

No	Kecamatan	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan	Real Estate	Jasa Perusahaan
1	Arjawinangun	48.06	8.70	2.14	6.08	2.45	1.47	0.32
2	Astanajapura	8.32	6.3	1.62	0.82	0.79	2.31	0.36
3	Babakan	17.01	6.02	3.05	0.75	3.65	3.12	0.74
4	Beber	13.75	5.87	6.3	0.79	2.13	3.6	0.19
5	Ciledug	24.25	7.1	7.92	7.33	3.89	2.35	0.71
6	Ciwaringin	10.32	6.75	1.42	0.48	5.17	1.72	0.25
7	Depok	6.64	4.60	3.82	1.02	3.13	1.41	0.52
8	Dukupuntang	19.42	13.12	4.05	2.05	13.15	1.52	1.08
9	Gebang	20.95	5.07	2.82	0.54	3.25	2.65	0.65
10	Gegesik	11.35	10.35	2.54	1.25	0.63	2.75	0.22
11	Gempol	10.58	7.27	1.42	0.56	5.23	1.76	0.25
12	Greged	13.52	6.46	5.53	1.23	3.76	3.26	0.57
13	Gunung Jati	12.43	10.54	3.27	0.46	2.45	2.35	3.54
14	Jamblang	20.23	13.56	4.72	7.23	5.24	2.13	0.35
15	Kaliwedi	10.57	12.56	3.29	1.67	1.24	2.76	0.34
16	Kapetakan	19.21	11.52	2.58	0.42	1.51	2.46	0.30
17	Karangsembung	17.44	6.63	2.36	2.01	2.45	3.09	0.61
18	Karangwareng	17.06	5.71	2.59	2.94	2.78	3.38	0.62
19	Kedawung	27.13	5.38	6.97	0.45	7.49	3.14	4.16
20	Klangenan	22.16	15.94	3.68	6.95	4.61	1.78	0.31
21	Lemahabang	15.87	5.30	0.84	7.58	16.23	1.96	0.34
22	Losari	16.42	5.33	4.47	7.95	4.31	2.70	0.24
23	Mundu	11.93	10.50	0.83	0.96	0.57	2.19	0.32
24	Pabedilan	17.36	5.08	3.86	6.87	4.28	2.63	0.20
25	Pabuaran	24.97	7.48	7.87	7.83	3.51	2.03	0.63
26	Palimanan	5.34	14.62	1.54	1.92	1.31	1.13	1.22
27	Pangenan	8.83	6.06	1.18	0.60	0.44	1.57	0.33
28	Panguragan	46.74	8.03	1.86	5.05	2.25	1.33	0.23
29	Pasaleman	8.25	7.75	3.86	0.93	2.02	3.88	0.27
30	Plered	14.72	5.67	3.34	3.27	1.48	0.96	1.33
31	Plumbon	5.44	6.35	3.90	0.94	2.81	0.89	0.44
32	Sedong	17.22	4.90	3.18	0.35	0.15	4.31	0.66
33	Sumber	21.73	15.68	4.03	1.98	12.76	1.30	1.40
34	Suranenggala	18.15	10.10	2.60	0.48	1.66	2.39	0.26
35	Susukan	8.64	11.75	2.60	0.97	2.93	3.43	0.28
36	Susukan Lebak	15.32	6.29	0.79	6.92	15.82	1.99	0.28
37	Talun	9.82	9.79	5.15	0.88	0.50	2.29	0.34
38	Tengah Tani	24.73	5.59	6.62	0.53	8.55	3.42	4.53
39	Waled	8.51	7.12	4.06	0.98	2.06	4.27	0.34
40	Weru	15.06	4.02	3.27	3.03	1.34	0.95	1.40
	2019 Kab Cirebon	15.44	8.49	3.49	2.28	3.86	2.30	0.90

Lanjutan…

No	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa lainnya
1	Arjawinangun	2.90	5.84	1.75	4.10
2	Astanajapura	2.41	14.25	4.05	2.21
3	Babakan	4.13	2.69	2.03	4.75
4	Beber	5.3	4.69	1.25	0.25
5	Ciledug	3.25	3.75	2.25	6.25
6	Ciwaringin	3.37	8.81	2.72	1.22
7	Depok	1.72	2.62	1.22	2.72
8	Dukupuntang	2.32	9.45	3.14	3.06
9	Gebang	4.13	2.48	1.75	5.92
10	Gegesik	3.52	3.84	3.20	3.02
11	Gempol	3.48	8.23	2.20	1.45
12	Greged	4.23	4.48	1.05	0.15
13	Gunung Jati	3.98	4.76	2.17	17.36
14	Jamblang	4.21	2.72	1.50	2.87
15	Kaliwedi	2.45	3.76	2.87	2.12
16	Kapetakan	3.39	3.30	0.67	1.13
17	Karangsembung	4.77	5.54	1.78	2.96
18	Karangwareng	5.36	5.94	2.20	3.22
19	Kedawung	2.02	7.10	2.50	6.48
20	Klangenan	3.94	2.01	0.63	2.80
21	Lemahabang	4.31	4.92	1.16	2.15
22	Losari	4.42	5.07	1.19	2.58
23	Mundu	2.12	2.38	0.27	1.08
24	Pabedilan	4.20	5.19	1.19	2.48
25	Pabuaran	2.91	3.92	1.71	5.65
26	Palimanan	2.71	4.27	1.36	2.89
27	Pangenan	1.53	11.97	3.19	1.30
28	Panguragan	2.81	6.35	1.53	4.86
29	Pasaleman	5.52	2.75	0.18	4.29
30	Plered	1.43	8.26	2.40	3.76
31	Plumbon	1.30	2.28	0.91	2.50
32	Sedong	1.70	3.31	0.48	2.18
33	Sumber	2.18	9.09	2.59	2.94
34	Suranenggala	3.50	3.75	0.68	1.18
35	Susukan	3.26	1.93	0.90	0.59
36	Susukan Lebak	4.29	5.69	1.22	1.97
37	Talun	3.83	1.84	0.11	1.24
38	Tengah Tani	2.37	7.82	2.93	6.84
39	Waled	6.42	2.16	0.16	5.09
40	Weru	1.29	7.72	2.23	3.56
	2019 Kab Cirebon	3.05	5.78	2.01	3.70

Lampiran 23. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Seluruh Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2 019	Peringkat	Jumlah Penduduk	PDRB ADHB per kapita (Rp)	Peringkat
		PDRB ADHB (Milyar Rp)				
1	Arjawinangun	1,806,788,775	7	77589	23,286.66	10
2	Astanajapura	1,865,771,638	6	88159	21,163.71	15
3	Babakan	1,071,512,676	24	69636	15,387.34	35
4	Beber	644,687,571	37	40516	15,911.93	34
5	Ciledug	1,133,165,640	18	44501	25,463.82	8
6	Ciwaringin	820,304,268	30	37328	21,975.58	14
7	Depok	2,502,470,352	3	63474	39,425.12	4
8	Dukupuntang	1,253,862,702	13	62951	19,918.07	19
9	Gebang	1,121,330,156	22	65223	17,192.25	31
10	Gegesik	1,391,961,881	8	79351	17,541.83	28
11	Gempol	744,308,933	33	51416	14,476.21	36
12	Greged	538,192,345	39	60535	8,890.60	40
13	Gunungjati	1,388,178,368	9	79307	17,503.86	29
14	Jamblang	728,910,535	34	40007	18,219.57	27
15	Kaliwedi	885,974,761	28	45570	19,442.06	20
16	Kapetakan	1,321,258,558	10	57653	22,917.43	11
17	Karangsembung	678,209,696	36	36035	18,820.86	24
18	Karangwareng	678,827,617	35	30117	22,539.68	12
19	Kedawung	1,156,810,402	16	57980	19,951.89	18
20	Klangenan	959,992,305	26	51413	18,672.17	26
21	Lemahabang	1,127,312,594	19	56142	20,079.67	17
22	Losari	1,122,717,324	21	65143	17,234.66	30
23	Mundu	1,145,313,428	17	71661	15,982.38	33
24	Pabedilan	754,754,459	32	53376	14,140.33	37
25	Pabuaran	938,692,958	27	35469	26,465.17	7
26	Palimanan	3,058,991,330	2	68011	44,977.89	2
27	Pangenan	1,001,079,021	25	44583	22,454.28	13
28	Panguragan	1,301,828,692	11	42548	30,596.71	6
29	Pasaleman	458,704,228	40	27163	16,887.10	32
30	Plered	2,402,506,164	4	55303	43,442.60	3
31	Plumbon	3,141,324,134	1	64178	48,947.06	1
32	Sedong	835,685,795	29	40675	20,545.44	16
33	Sumber	1,263,762,207	12	91907	13,750.45	38
34	Suranenggala	1,078,685,420	23	43472	24,813.34	9
35	Susukan	1,250,277,079	14	64375	19,421.78	21
36	Susukan Lebak	762,997,002	31	40169	18,994.67	23
37	Talun	1,217,744,984	15	65191	18,679.65	25
38	Tengah Tani	1,126,249,781	20	59122	19,049.59	22
39	Waled	625,782,984	38	54019	11,584.50	39
40	Weru	2,332,083,608	5	68992	33,802.23	5
	Kabupaten Cirebon	49,639,012,370		2250260	22,059.23	

Lampiran 24. PDRB Kecamatan Arjawinangun

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	98,275,800.65	5.82	103,890,354.55	5.75
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	-
Industri Pengolahan	31,238,871.34	1.85	35,051,702.23	1.94
Pengadaan Listrik dan Gas	3,883,751.57	0.23	4,336,293.06	0.24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,923,209.32	0.41	7,949,870.61	0.44
Konstruksi	132,722,988.50	7.86	141,290,882.19	7.82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	811,366,361.02	48.05	868,342,685.17	48.06
Transportasi dan Pergudangan	147,244,842.21	8.72	157,190,623.41	8.70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,304,634.26	2.15	38,665,279.78	2.14
Informasi dan Komunikasi	102,834,987.28	6.09	109,852,757.51	6.08
Jasa Keuangan	41,032,679.65	2.43	44,266,324.98	2.45
Real Estate	26,510,825.95	1.57	26,559,794.99	1.47
Jasa Perusahaan	4,896,904.16	0.29	5,781,724.08	0.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	48,969,041.56	2.9	52,396,874.47	2.90
Jasa Pendidikan	98,613,518.18	5.84	105,516,464.45	5.84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,719,142.46	1.76	31,618,803.56	1.75
Jasa lainnya	68,387,799.42	4.05	74,078,339.77	4.10
Total	1,688,925,357.53	100	1,806,788,774.80	100.00

Lampiran 25. PDRB Kecamatan Astanajapura

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	222,185,876.01	12.81	238,632,192.50	12.79
Pertambangan dan Penggalian	91,927,021.30	5.30	97,020,125.17	5.2
Industri Pengolahan	536,992,562.16	30.96	578,762,362.10	31.02
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0
Konstruksi	130,605,749.13	7.53	140,865,758.67	7.55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	143,961,184.30	8.30	155,232,200.28	8.32
Transportasi dan Pergudangan	109,965,531.14	6.34	117,543,613.19	6.3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,445,342.44	1.64	30,225,500.54	1.62
Informasi dan Komunikasi	13,702,329.59	0.79	15,299,327.43	0.82
Jasa Keuangan	13,355,435.17	0.77	14,739,595.94	0.79
Real Estate	38,678,727.83	2.23	43,099,324.84	2.31
Jasa Perusahaan	5,897,205.14	0.34	6,716,777.90	0.36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	41,453,883.19	2.39	44,965,096.48	2.41
Jasa Pendidikan	246,641,932.62	14.22	265,872,458.41	14.25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71,113,356.10	4.10	75,563,751.34	4.05
Jasa lainnya	39,545,963.88	2.28	41,233,553.20	2.21
Total	1,734,472,100.00	100	1,865,771,637.97	100.00

Lampiran 26. PDRB Kecamatan Babakan

	2018		2019	
Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	307,741,444.82	30.32	325,204,097.09	30.35
Pertambangan dan Penggalian	9,540,796.77	0.94	10,822,278.03	1.01
Industri Pengolahan	97,640,920.16	9.62	103,722,427.01	9.68
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0
Konstruksi	111,140,132.61	10.95	118,080,696.87	11.02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	168,080,419.73	16.56	182,264,306.15	17.01
Transportasi dan Pergudangan	59,883,724.42	5.9	64,505,063.08	6.02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30,753,844.91	3.03	32,681,136.61	3.05
Informasi dan Komunikasi	7,307,844.34	0.72	8,036,345.07	0.75
Jasa Keuangan	36,742,217.36	3.62	39,110,212.67	3.65
Real Estate	31,362,831.94	3.09	33,431,195.48	3.12
Jasa Perusahaan	7,612,337.85	0.75	7,929,193.80	0.74
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	41,715,611.42	4.11	44,253,473.51	4.13
Jasa Pendidikan	27,201,420.58	2.68	28,823,690.98	2.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,995,074.09	1.97	21,751,707.32	2.03
Jasa lainnya	58,259,759.01	5.74	50,896,852.10	4.75
Total	1,014,978,380.00	100.00	1,071,512,675.77	100.00

Lampiran 27. PDRB Kecamatan Beber

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	158,530,731.57	25.96	167,747,705.86	26.02
Pertambangan dan Penggalian	20,640,750.10	3.38	21,597,033.61	3.35
Industri Pengolahan	15,327,894.31	2.51	16,246,126.78	2.52
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,404,548.08	0.23	1,547,250.17	0.24
Konstruksi	144,912,721.88	23.73	153,113,298.01	23.75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	84,822,490.81	13.89	88,644,540.95	13.75
Transportasi dan Pergudangan	35,724,375.18	5.85	37,843,160.39	5.87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,983,865.58	6.22	40,615,316.95	6.3
Informasi dan Komunikasi	4,702,182.72	0.77	5,093,031.81	0.79
Jasa Keuangan	13,007,336.60	2.13	13,731,845.25	2.13
Real Estate	22,106,365.50	3.62	23,208,752.54	3.6
Jasa Perusahaan	1,099,211.54	0.18	1,224,906.38	0.19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	32,732,077.09	5.36	34,168,441.24	5.3
Jasa Pendidikan	28,762,702.07	4.71	30,235,847.06	4.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,511,278.88	1.23	8,058,594.63	1.25
Jasa lainnya	1,404,548.08	0.23	1,611,718.93	0.25
	610,673,080.00	100.00	644,687,570.56	100.00

Lampiran 28. PDRB Kecamatan Ciledug

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	93,920,615.25	8.75	98,925,360.39	8.73
Pertambangan dan Penggalian	1,824,743.38	0.17	2,153,014.72	0.19
Industri Pengolahan	106,908,494.62	9.96	113,543,197.15	10.02
Pengadaan Listrik dan Gas	7,513,649.22	0.7	10,198,490.76	0.9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	536,689.23	0.05	679,899.38	0.06
Konstruksi	118,286,306.29	11.02	125,214,803.24	11.05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	258,684,208.86	24.1	274,792,667.75	24.25
Transportasi dan Pergudangan	76,424,546.35	7.12	80,454,760.46	7.1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84,045,533.42	7.83	89,746,718.71	7.92
Informasi dan Komunikasi	80,288,708.81	7.48	83,061,041.43	7.33
Jasa Keuangan	43,042,476.25	4.01	44,080,143.40	3.89
Real Estate	25,331,731.66	2.36	26,629,392.55	2.35
Jasa Perusahaan	7,298,973.53	0.68	8,045,476.05	0.71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	37,031,556.87	3.45	36,827,883.31	3.25
Jasa Pendidikan	41,432,408.56	3.86	42,493,711.51	3.75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,258,353.20	2.26	25,496,226.90	2.25
Jasa lainnya	66,549,464.52	6.2	70,822,852.51	6.25
	1,073,378,460	100.00	1,133,165,640.22	100.00

Lampiran 29. PDRB Kecamatan Ciwaringin

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	252,765,916.96	32.53	267,583,252.38	32.62
Pertambangan dan Penggalian	6,138,489.84	0.79	6,726,495.00	0.82
Industri Pengolahan	45,611,310.56	5.87	46,019,069.46	5.61
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00
Konstruksi	144,759,576.79	18.63	153,560,959.06	18.72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	79,644,963.08	10.25	84,655,400.51	10.32
Transportasi dan Pergudangan	54,158,574.89	6.97	55,370,538.12	6.75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,722,931.61	1.38	11,648,320.61	1.42
Informasi dan Komunikasi	4,040,524.96	0.52	3,937,460.49	0.48
Jasa Keuangan	40,249,844.75	5.18	42,409,730.68	5.17
Real Estate	13,054,003.70	1.68	14,109,233.42	1.72
Jasa Perusahaan	2,097,964.88	0.27	2,050,760.67	0.25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25,641,792.99	3.30	27,644,253.85	3.37
Jasa Pendidikan	68,378,114.64	8.80	72,268,806.05	8.81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,057,351.21	2.71	22,312,276.10	2.72
Jasa lainnya	8,702,669.14	1.12	10,007,712.08	1.22
	777,024,030.00	100	820,304,268.47	100.00

Lampiran 30. PDRB Kecamatan Depok

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	56,709,801	2.44	61,560,771	2.46
Pertambangan dan Penggalian	5,810,430	0.25	6,256,176	0.25
Industri Pengolahan	1,483,751,520	63.84	1,599,579,049	63.92
Pengadaan Listrik dan Gas	-	0.00	0	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0.00	0	0.00
Konstruksi	91,339,967	3.93	98,847,579	3.95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	132,245,397	5.69	166,164,031	6.64
Transportasi dan Pergudangan	129,921,225	5.59	115,113,636	4.60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	88,550,960	3.81	95,594,367	3.82
Informasi dan Komunikasi	22,544,470	0.97	25,525,198	1.02
Jasa Keuangan	72,281,755	3.11	78,327,322	3.13
Real Estate	31,841,159	1.37	35,284,832	1.41
Jasa Perusahaan	11,620,861	0.50	13,012,846	0.52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	39,510,927	1.70	43,042,490	1.72
Jasa Pendidikan	60,660,894	2.61	65,564,723	2.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,679,073	1.32	30,530,138	1.22
Jasa lainnya	66,703,742	2.87	68,067,194	2.72
	2,324,172,180	100	2,502,470,352	100.00

Lampiran 31. PDRB Kecamatan Dukuhpuntang

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	110,813,100.42	9.33	117,236,162.65	9.35
Pertambangan dan Penggalian	34,087,202.38	2.87	36,612,790.90	2.92
Industri Pengolahan	31,355,475.36	2.64	32,976,589.07	2.63
Pengadaan Listrik dan Gas	11,520,761.78	0.97	12,789,399.56	1.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,969,268.50	0.25	6,269,313.51	0.50
Konstruksi	132,785,687.32	11.18	140,683,395.18	11.22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	233,622,045.58	19.67	243,500,136.76	19.42
Transportasi dan Pergudangan	154,877,044.96	13.04	164,506,786.53	13.12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,508,296.00	4	50,781,439.44	4.05
Informasi dan Komunikasi	24,823,084.66	2.09	25,704,185.39	2.05
Jasa Keuangan	155,708,440.14	13.11	164,882,945.34	13.15
Real Estate	19,003,318.40	1.6	19,058,713.07	1.52
Jasa Perusahaan	12,708,469.18	1.07	13,541,717.18	1.08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27,198,499.46	2.29	29,089,614.69	2.32
Jasa Pendidikan	114,613,764.10	9.65	118,490,025.36	9.45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,631,222.00	3	39,371,288.85	3.14
Jasa lainnya	38,481,719.76	3.24	38,368,198.69	3.06
	1,187,707,400	100	1,253,862,702.18	100.00

Lampiran 32. PDRB Kecamatan Gebang

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	295,601,195.77	27.83	311,169,118.25	27.75
Pertambangan dan Penggalian	13,383,309.62	1.26	14,801,558.06	1.32
Industri Pengolahan	98,144,270.53	9.24	102,601,709.26	9.15
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00
Konstruksi	123,636,288.85	11.64	129,737,899.03	11.57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	221,568,125.90	20.86	234,918,667.65	20.95
Transportasi dan Pergudangan	54,170,538.93	5.10	56,851,438.90	5.07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,997,170.84	2.73	31,621,510.39	2.82
Informasi dan Komunikasi	6,585,438.07	0.62	6,055,182.84	0.54
Jasa Keuangan	32,927,190.33	3.10	36,443,230.07	3.25
Real Estate	29,315,821.07	2.76	29,715,249.13	2.65
Jasa Perusahaan	7,010,305.04	0.66	7,288,646.01	0.65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44,186,165.09	4.16	46,310,935.44	4.13
Jasa Pendidikan	26,872,835.98	2.53	27,808,987.87	2.48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,738,196.08	1.67	19,623,277.73	1.75
Jasa lainnya	62,030,577.91	5.84	66,382,745.23	5.92
	1,062,167,430.00	100.00	1,121,330,155.85	100.00

Lampiran 33. PDRB Kecamatan Gegesik

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	504,070,310.69	38.23	533,817,381.25	38.35
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	21,491,880.89	1.63	22,967,371.03	1.65
Pengadaan Listrik dan Gas	2,637,040.60	0.20	3,062,316.14	0.22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,351,116.99	0.33	3,758,297.08	0.27
Konstruksi	220,456,594.16	16.72	234,406,380.71	16.84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	137,257,963.23	10.41	157,987,673.46	11.35
Transportasi dan Pergudangan	151,102,426.38	11.46	144,068,054.65	10.35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,127,456.22	2.74	35,355,831.77	2.54
Informasi dan Komunikasi	17,800,024.05	1.35	17,399,523.51	1.25
Jasa Keuangan	9,493,346.16	0.72	8,769,359.85	0.63
Real Estate	37,577,828.55	2.85	38,278,951.72	2.75
Jasa Perusahaan	3,164,448.72	0.24	3,062,316.14	0.22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44,961,542.23	3.41	48,997,058.20	3.52
Jasa Pendidikan	49,971,919.37	3.79	53,451,336.22	3.84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,028,200.88	2.96	44,542,780.18	3.20
Jasa lainnya	39,028,200.88	2.96	42,037,248.80	3.02
Total	1,318,520,300.00	100.00	1,391,961,880.71	100.00

Lampiran 34. PDRB Kecamatan Gempol

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	247,891,466.28	35.16	263,113,207.93	35.35
Pertambangan dan Penggalian	5,851,817.89	0.83	4,838,008.07	0.65
Industri Pengolahan	39,623,152.46	5.62	32,154,145.92	4.32
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00
Konstruksi	121,971,625.90	17.30	128,393,291.00	17.25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	71,631,891.28	10.16	78,747,885.14	10.58
Transportasi dan Pergudangan	51,961,322.71	7.37	54,111,259.45	7.27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,575,574.50	1.50	10,569,186.85	1.42
Informasi dan Komunikasi	4,441,741.29	0.63	4,168,130.03	0.56
Jasa Keuangan	33,841,838.40	4.80	38,927,357.21	5.23
Real Estate	10,716,582.16	1.52	13,099,837.23	1.76
Jasa Perusahaan	1,974,107.24	0.28	1,860,772.33	0.25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,221,652.83	3.01	25,901,950.88	3.48
Jasa Pendidikan	58,518,178.90	8.30	61,256,625.21	8.23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,625,957.50	2.50	16,374,796.53	2.20
Jasa lainnya	7,191,390.66	1.02	10,792,479.53	1.45
	705,038,300.00	100.00	744,308,933.31	100.00

Lampiran 35. PDRB Kecamatan Greged

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	120,887,467.86	25.34	141,167,851.97	26.23
Pertambangan dan Penggalian	15,265,978.58	3.20	13,670,085.55	2.54
Industri Pengolahan	14,216,442.55	2.98	17,222,155.02	3.20
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,097,242.21	0.23	1,345,480.86	0.25
Konstruksi	111,393,937.43	23.35	126,690,477.90	23.54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	63,973,991.47	13.41	72,763,604.98	13.52
Transportasi dan Pergudangan	31,486,080.82	6.60	34,767,225.46	6.46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,339,302.58	6.15	29,762,036.65	5.53
Informasi dan Komunikasi	3,911,907.01	0.82	6,619,765.84	1.23
Jasa Keuangan	11,020,128.29	2.31	20,236,032.15	3.76
Real Estate	17,174,225.90	3.60	17,545,070.43	3.26
Jasa Perusahaan	858,711.29	0.18	3,067,696.36	0.57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27,049,405.79	5.67	22,765,536.17	4.23
Jasa Pendidikan	22,517,318.40	4.72	24,111,017.03	4.48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,201,803.80	1.30	5,651,019.62	1.05
Jasa lainnya	667,886.56	0.14	807,288.52	0.15
	477,061,830.54	100.00	538,192,344.52	100.00

Lampiran 36. PDRB Kecamatan Gunungjati

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	269,561,964.05	20.50	295,126,721.04	21.26
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	66,141,301.42	5.03	67,465,468.69	4.86
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00
Konstruksi	147,272,877.92	11.20	146,730,453.50	10.57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	183,302,135.55	13.94	172,550,571.15	12.43
Transportasi dan Pergudangan	152,927,104.48	11.63	146,313,999.99	10.54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,735,433.33	3.25	45,393,432.63	3.27
Informasi dan Komunikasi	4,602,277.44	0.35	6,385,620.49	0.46
Jasa Keuangan	36,555,232.20	2.78	34,010,370.02	2.45
Real Estate	28,402,626.46	2.16	32,622,191.65	2.35
Jasa Perusahaan	48,915,634.45	3.72	49,141,514.23	3.54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44,050,369.74	3.35	55,249,499.05	3.98
Jasa Pendidikan	57,068,240.19	4.34	66,077,290.32	4.76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,160,751.28	2.75	30,123,470.59	2.17
Jasa lainnya	197,240,461.50	15.00	240,987,764.69	17.36
	1,314,936,410.00	100.00	1,388,178,368.04	100.00

Lampiran 37. PDRB Kecamatan Jamblang

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB	PDRB ADHB (Milyar Rp)	% terhadap Total PDRB
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	98,803,729.85	14.31	98,402,922.27	13.50
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	36,732,064.49	5.32	38,705,149.43	5.31
Pengadaan Listrik dan Gas	5,385,528.25	0.78	4,737,918.48	0.65
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00
Konstruksi	103,774,986.70	15.03	115,022,082.48	15.78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	137,814,287.06	19.96	147,458,601.30	20.23
Transportasi dan Pergudangan	103,153,579.60	14.94	98,840,268.59	13.56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,582,415.09	3.85	34,404,577.27	4.72
Informasi dan Komunikasi	45,362,718.74	6.57	52,700,231.70	7.23
Jasa Keuangan	36,663,019.25	5.31	38,194,912.05	5.24
Real Estate	15,673,268.12	2.27	15,525,794.40	2.13
Jasa Perusahaan	2,347,537.96	0.34	2,551,186.87	0.35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,758,495.85	4.31	30,687,133.54	4.21
Jasa Pendidikan	18,642,213.18	2.70	19,826,366.56	2.72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,147,337.61	1.18	10,933,658.03	1.50
Jasa lainnya	21,611,158.24	3.13	20,919,732.36	2.87
	690,452,340.00	100.00	728,910,535.34	100.00

Lampiran 38. PDRB Kecamatan Kaliwedi

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	313,284,435.30	37.33	320,191,278.69	36.14
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	15,106,134.04	1.80	13,289,621.42	1.50
Pengadaan Listrik dan Gas	1,594,536.37	0.19	9,036,942.56	1.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,937,303.84	0.35	3,986,886.43	0.45
Konstruksi	139,144,279.06	16.58	152,919,243.78	17.26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	87,112,039.60	10.38	93,647,532.26	10.57
Transportasi dan Pergudangan	110,358,701.43	13.15	111,278,430.00	12.56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,407,432.15	2.67	29,148,569.64	3.29
Informasi dan Komunikasi	10,406,447.89	1.24	14,795,778.51	1.67
Jasa Keuangan	7,469,144.05	0.89	10,986,087.04	1.24
Real Estate	22,407,432.15	2.67	24,452,903.41	2.76
Jasa Perusahaan	2,098,074.17	0.25	3,012,314.19	0.34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,603,580.50	3.17	21,706,381.65	2.45
Jasa Pendidikan	33,653,109.71	4.01	33,312,651.02	3.76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,757,275.22	2.95	25,427,475.65	2.87
Jasa lainnya	19,889,743.15	2.37	18,782,664.94	2.12
	839,229,668.64	100.00	885,974,761.18	100.00

Lampiran 39. PDRB Kecamatan Kapetakan

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	470,812,127.09	39.79	548,896,336.21	42.72
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	17,630,310.87	1.49	14,618,390.61	1.14
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,324,590.53	0.45	6,277,417.12	0.49
Konstruksi	136,072,869.10	11.5	154,256,046.89	12.01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	214,521,836.24	18.13	246,743,325.72	19.21
Transportasi dan Pergudangan	130,748,278.57	11.05	147,978,629.77	11.52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,367,433.99	2.82	33,171,645.64	2.58
Informasi dan Komunikasi	4,614,645.13	0.39	5,440,428.17	0.42
Jasa Keuangan	21,653,334.82	1.83	19,361,327.99	1.51
Real Estate	32,065,867.41	2.71	31,637,165.90	2.46
Jasa Perusahaan	3,313,078.55	0.28	3,905,948.43	0.30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	42,123,427.30	3.56	43,494,509.34	3.39
Jasa Pendidikan	41,176,833.43	3.48	42,378,524.08	3.30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,542,368.80	1.06	8,619,969.81	0.67
Jasa lainnya	17,511,986.63	1.48	14,478,892.45	1.13
Total	1,183,478,988	100	1,321,258,558.14	100.00

Lampiran 40. PDRB Kecamatan Karangsembung

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	131,400,899.44	21.61	151,607,809.40	22.97
Pertambangan dan Penggalian	5,776,531.91	0.95	6,804,103.79	1.03
Industri Pengolahan	89,688,258.53	14.75	102,475,017.81	15.53
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	486,444.79	0.08	572,977.16	0.09
Konstruksi	78,378,417.11	12.89	89,153,298.81	13.51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	100,390,043.95	16.51	115,080,515.36	17.44
Transportasi dan Pergudangan	39,827,667.35	6.55	43,744,858.77	6.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,931,066.94	2.62	15,597,355.71	2.36
Informasi dan Komunikasi	11,249,035.82	1.85	13,250,096.86	2.01
Jasa Keuangan	16,417,511.73	2.7	16,170,332.88	2.45
Real Estate	20,005,042.07	3.29	20,396,039.44	3.09
Jasa Perusahaan	3,405,113.54	0.56	4,010,840.13	0.61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,429,909.92	4.84	31,497,471.94	4.77
Jasa Pendidikan	33,747,107.45	5.55	36,582,644.25	5.54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,647,564.59	2.08	11,729,759.87	1.78
Jasa lainnya	19,275,374.88	3.17	19,536,573.70	2.96
Total	608,055,990	100.00	678,209,695.87	100.00

Lampiran 41. PDRB Kecamatan Karangwareng

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	130,755,646.21	21.51	151,025,989.68	22.88
Pertambangan dan Penggalian	4,559,122.95	0.75	5,376,379.93	0.81
Industri Pengolahan	79,571,892.55	13.09	90,667,164.32	13.73
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	486,306.45	0.08	573,480.53	0.09
Konstruksi	78,356,126.43	12.89	89,233,463.00	13.52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	98,173,114.19	16.15	112,602,794.44	17.06
Transportasi dan Pergudangan	34,649,334.42	5.7	37,691,900.73	5.71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,203,090.60	2.83	17,118,286.86	2.59
Informasi dan Komunikasi	16,473,630.93	2.71	19,426,652.82	2.94
Jasa Keuangan	18,236,491.80	3	18,336,932.97	2.78
Real Estate	21,579,848.63	3.55	22,279,611.59	3.38
Jasa Perusahaan	3,464,933.44	0.57	4,086,048.75	0.62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	32,704,108.63	5.38	35,397,978.62	5.36
Jasa Pendidikan	35,925,888.85	5.91	39,197,287.11	5.94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,014,711.58	2.47	14,537,624.49	2.20
Jasa lainnya	20,728,812.35	3.41	21,276,020.67	3.22
Total	607,883,060	100	678,827,616.50	100.00

Lampiran 42. PDRB Kecamatan Kedawung

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	40,369,466.93	3.92	42,491,284.75	3.79
Pertambangan dan Penggalian	2,471,600.02	0.24	2,931,085.45	0.26
Industri Pengolahan	138,718,550.90	13.47	159,124,059.96	14.19
Pengadaan Listrik dan Gas	9,371,483.39	0.91	11,113,699.00	0.99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	109,574,267.38	10.64	124,561,677.36	11.11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	261,062,751.69	25.35	304,212,789.74	27.13
Transportasi dan Pergudangan	55,405,033.69	5.38	60,322,054.57	5.38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70,440,600.46	6.84	78,152,824.39	6.97
Informasi dan Komunikasi	4,222,316.69	0.41	5,007,270.98	0.45
Jasa Keuangan	75,383,800.49	7.32	84,014,995.29	7.49
Real Estate	34,190,466.89	3.32	35,163,571.12	3.14
Jasa Perusahaan	39,339,633.59	3.82	46,653,110.08	4.16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,686,166.82	2.3	22,706,457.96	2.02
Jasa Pendidikan	71,676,400.46	6.96	79,618,367.12	7.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,217,433.52	2.74	28,080,114.62	2.50
Jasa lainnya	65,806,350.43	6.39	72,657,039.17	6.48
Total	1,029,936,323	100	1,156,810,401.56	100.00

Lampiran 43. PDRB Kecamatan Klangenan

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	137,659,265.95	15.99	157,639,388.39	16.87
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	43,475,878.24	5.05	46,717,818.10	5.00
Pengadaan Listrik dan Gas	6,542,904.45	0.76	7,705,703.24	0.82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	124,917,820.45	14.51	142,633,545.24	15.27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	179,585,508.93	20.86	207,016,723.61	22.16
Transportasi dan Pergudangan	130,255,453.02	15.13	148,919,776.83	15.94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,972,794.78	3.83	34,348,136.59	3.68
Informasi dan Komunikasi	55,098,142.72	6.4	64,890,132.53	6.95
Jasa Keuangan	40,376,607.71	4.69	43,067,748.14	4.61
Real Estate	17,906,896.38	2.08	16,604,740.97	1.78
Jasa Perusahaan	2,496,634.59	0.29	2,940,334.13	0.31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	35,038,975.14	4.07	36,781,516.56	3.94
Jasa Pendidikan	19,714,804.19	2.29	18,733,948.45	2.01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,781,266.50	1.02	5,857,312.77	0.63
Jasa lainnya	25,999,436.10	3.02	26,135,479.19	2.80
Total	860,822,389	100	959,992,304.72	100.00

Lampiran 44. PDRB Kecamatan Lemahabang

Sektor	2018		2019	
	PDRB ADHB (Milyar Rp)	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	114,868,157.71	11.41	130,525,328.84	11.93
Pertambangan dan Penggalian	25,268,981.23	2.51	29,869,023.98	2.73
Industri Pengolahan	130,069,815.74	12.92	148,494,343.26	13.57
Pengadaan Listrik dan Gas	8,255,205.02	0.82	9,758,007.83	0.89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	704,712.62	0.07	833,000.67	0.08
Konstruksi	126,143,559.70	12.53	143,853,339.54	13.14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	151,412,540.93	15.04	173,722,363.52	15.87
Transportasi dan Pergudangan	53,558,159.42	5.32	58,054,270.65	5.30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,181,461.07	1.21	9,145,231.38	0.84
Informasi dan Komunikasi	70,169,242.70	6.97	82,943,066.60	7.58
Jasa Keuangan	154,734,757.58	15.37	177,649,366.67	16.23
Real Estate	22,550,803.97	2.24	21,402,241.22	1.96
Jasa Perusahaan	3,120,870.19	0.31	3,689,002.96	0.34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44,396,895.31	4.41	47,225,261.95	4.31
Jasa Pendidikan	50,034,596.30	4.97	53,889,267.30	4.92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,201,658.03	1.51	12,715,234.24	1.16
Jasa lainnya	24,362,922.14	2.42	23,544,242.94	2.15
Total	1,007,034,340	100	1,127,312,593.56	100.00

Lampiran 45. PDRB Kecamatan Losari

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	291,123,546.14	28.99	338,458,309.79	31.02
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	29,524,085.05	2.94	29,618,220.46	2.71
Pengadaan Listrik dan Gas	3,414,349.97	0.34	4,030,926.31	0.37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	134,665,979.78	13.41	153,747,039.47	14.09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	156,156,300.19	15.55	179,118,163.89	16.42
Transportasi dan Pergudangan	53,725,801.03	5.35	58,190,374.60	5.33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45,792,458.45	4.56	48,824,398.76	4.47
Informasi dan Komunikasi	73,508,946.46	7.32	86,783,472.32	7.95
Jasa Keuangan	44,286,127.58	4.41	47,046,048.92	4.31
Real Estate	29,423,662.99	2.93	29,499,663.80	2.70
Jasa Perusahaan	2,209,285.28	0.22	2,608,246.44	0.24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45,290,348.16	4.51	48,231,615.48	4.42
Jasa Pendidikan	51,315,671.64	5.11	55,345,014.85	5.07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,464,996.93	1.54	13,020,288.59	1.19
Jasa lainnya	28,319,020.36	2.82	28,195,540.58	2.58
Total	1,004,220,580	100	1,122,717,324.26	100.00

Lampiran 46. PDRB Kecamatan Mundu

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	191,925,083.94	18.6	219,657,982.98	19.66
Pertambangan dan Penggalian	26,415,495.42	2.56	30,970,626.26	2.77
Industri Pengolahan	224,015,783.46	21.71	257,282,454.72	23.03
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	232,270,625.78	22.51	266,960,775.43	23.89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	118,250,616.23	11.46	133,278,970.68	11.93
Transportasi dan Pergudangan	104,630,126.41	10.14	117,309,741.51	10.50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,485,449.01	1.21	9,275,486.63	0.83
Informasi dan Komunikasi	9,183,512.08	0.89	10,767,131.79	0.96
Jasa Keuangan	10,008,996.31	0.97	6,371,990.42	0.57
Real Estate	25,486,825.66	2.47	24,518,841.74	2.19
Jasa Perusahaan	3,095,565.87	0.3	3,629,370.26	0.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,764,526.96	2.4	23,671,988.68	2.12
Jasa Pendidikan	27,240,979.66	2.64	26,575,484.89	2.38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,119,801.50	0.69	2,984,578.17	0.27
Jasa lainnya	14,858,716.18	1.44	12,058,003.83	1.08
Total	1,031,752,104	100	1,145,313,427.99	100.00

Lampiran 47. PDRB Kecamatan Pabedilan

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	199,204,306.95	29.51	231,674,990.07	31.59
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	25,178,992.37	3.73	26,207,474.84	3.57
Pengadaan Listrik dan Gas	2,160,128.03	0.32	2,550,411.36	0.35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	90,320,353.34	13.38	103,118,317.43	14.06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	110,841,569.64	16.42	127,347,225.36	17.36
Transportasi dan Pergudangan	34,562,048.51	5.12	37,285,824.19	5.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,934,096.40	3.99	28,279,684.07	3.86
Informasi dan Komunikasi	42,662,528.63	6.32	50,370,624.37	6.87
Jasa Keuangan	29,566,752.44	4.38	31,387,997.92	4.28
Real Estate	19,306,144.29	2.86	19,273,543.96	2.63
Jasa Perusahaan	1,215,072.02	0.18	1,434,606.39	0.20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,094,224.43	4.31	30,830,095.43	4.20
Jasa Pendidikan	35,237,088.52	5.22	38,082,827.74	5.19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,395,616.15	1.54	8,753,097.10	1.19
Jasa lainnya	18,361,088.27	2.72	18,157,738.99	2.48
Total	675,040,010	100	754,754,459.22	100.00

Lampiran 48. PDRB Kecamatan Pabuaran

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	91,885,206.72	10.88	103,472,024.12	11.31
Pertambangan dan Penggalian	1,182,346.41	0.14	1,387,957.67	0.15
Industri Pengolahan	90,787,313.63	10.75	102,183,206.29	11.17
Pengadaan Listrik dan Gas	5,236,105.53	0.62	6,146,669.68	0.67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	422,266.58	0.05	495,699.17	0.05
Konstruksi	87,240,274.40	10.33	98,019,333.28	10.71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	198,380,836.94	23.49	228,487,354.23	24.97
Transportasi dan Pergudangan	62,073,186.53	7.35	68,475,662.88	7.48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,113,505.87	7.71	72,044,696.89	7.87
Informasi dan Komunikasi	61,059,746.75	7.23	71,678,099.66	7.83
Jasa Keuangan	31,078,819.92	3.68	32,091,343.97	3.51
Real Estate	19,593,169.08	2.32	18,608,326.61	2.03
Jasa Perusahaan	4,898,292.27	0.58	5,750,110.35	0.63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,433,887.60	3.13	26,638,653.12	2.91
Jasa Pendidikan	34,288,045.89	4.06	35,858,657.64	3.92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,059,569.63	2.02	15,634,131.60	1.71
Jasa lainnya	47,800,576.29	5.66	51,721,031.01	5.65
Total	844,533,150	100	938,692,958.16	100.00

Lampiran 49. PDRB Kecamatan Palimanan

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	112,414,176.45	4.06	116,832,568.63	3.91
Pertambangan dan Penggalian	93,586,186.30	3.38	109,217,272.08	3.65
Industri Pengolahan	1,275,042,567.84	46.05	1,473,647,140.99	49.27
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	276,882.21	0.01	323,128.02	0.01
Konstruksi	194,648,192.22	7.03	212,801,591.73	7.11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	149,239,510.11	5.39	159,808,595.81	5.34
Transportasi dan Pergudangan	387,081,326.78	13.98	437,375,568.34	14.62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,776,972.90	1.87	46,067,531.40	1.54
Informasi dan Komunikasi	49,285,033.02	1.78	57,516,788.25	1.92
Jasa Keuangan	45,962,446.53	1.66	39,281,842.90	1.31
Real Estate	41,255,448.99	1.49	33,788,666.49	1.13
Jasa Perusahaan	31,287,689.50	1.13	36,513,466.70	1.22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	81,680,251.36	2.95	80,965,357.98	2.71
Jasa Pendidikan	121,828,171.52	4.4	127,818,921.44	4.27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47,069,975.36	1.7	40,574,354.99	1.36
Jasa lainnya	86,387,248.90	3.12	86,458,534.39	2.89
Total	2,768,822,080	100	3,058,991,330.15	100.00

Lampiran 50. PDRB Kecamatan Pangenan

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	122,928,967.57	13.69	140,068,569.39	14.38
Pertambangan dan Penggalian	24,424,163.02	2.72	28,758,798.68	2.95
Industri Pengolahan	346,068,839.32	38.54	402,809,800.02	41.34
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	62,586,917.75	6.97	69,017,419.70	7.08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	77,043,867.19	8.58	86,040,090.98	8.83
Transportasi dan Pergudangan	54,146,214.35	6.03	59,078,717.22	6.06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,738,591.70	1.53	11,499,822.33	1.18
Informasi dan Komunikasi	4,938,709.44	0.55	5,815,198.26	0.60
Jasa Keuangan	7,632,550.95	0.85	4,310,122.66	0.44
Real Estate	16,971,201.51	1.89	15,306,133.92	1.57
Jasa Perusahaan	2,693,841.51	0.3	3,171,926.33	0.33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,612,022.65	1.85	14,883,210.41	1.53
Jasa Pendidikan	102,994,540.40	11.47	116,596,314.59	11.97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,350,614.35	3.38	31,060,034.67	3.19
Jasa lainnya	14,726,333.59	1.64	12,662,861.99	1.30
Total	897,857,375	100	1,001,079,021.18	100.00

Lampiran 51. PDRB Kecamatan Panguragan

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	98,974,430.66	8.3	110,173,455.29	8.52
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	24,326,245.61	2.04	22,397,541.89	1.73
Pengadaan Listrik dan Gas	2,742,664.95	0.23	3,224,993.62	0.25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,889,098.38	0.41	5,748,901.68	0.44
Konstruksi	100,882,371.49	8.46	112,416,929.11	8.69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	541,258,964.78	45.39	630,238,731.32	48.74
Transportasi dan Pergudangan	93,608,347.07	7.85	103,863,685.16	8.03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,757,201.23	2.16	24,080,147.26	1.86
Informasi dan Komunikasi	55,568,776.73	4.66	65,341,175.15	5.05
Jasa Keuangan	30,050,068.10	2.52	29,127,963.36	2.25
Real Estate	19,914,132.43	1.67	17,209,508.67	1.33
Jasa Perusahaan	2,504,172.34	0.21	2,944,559.40	0.23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,131,629.51	3.03	36,279,036.18	2.81
Jasa Pendidikan	75,125,170.26	6.3	82,130,032.48	6.35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,060,565.87	1.85	19,733,416.72	1.53
Jasa lainnya	58,669,180.58	4.92	62,780,070.74	4.86
Total	1,192,463,020	100	1,327,690,148.02	100.00

Lampiran 52. PDRB Kecamatan Pasaleman

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	161,030,203.83	38.93	186,463,072.00	41.65
Pertambangan dan Penggalian	26,059,344.57	6.3	30,522,855.46	6.82
Industri Pengolahan	28,375,730.75	6.86	31,087,203.03	6.94
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	289,548.27	0.07	339,142.84	0.08
Konstruksi	29,658,015.96	7.17	32,589,121.31	7.28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	33,380,779.47	8.07	36,949,529.24	8.25
Transportasi dan Pergudangan	31,436,669.64	7.6	34,672,427.32	7.75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,586,979.64	4.01	17,279,244.61	3.86
Informasi dan Komunikasi	3,557,307.35	0.86	4,166,612.01	0.93
Jasa Keuangan	9,555,093.01	2.31	9,042,918.53	2.02
Real Estate	16,669,707.72	4.03	17,376,142.56	3.88
Jasa Perusahaan	1,034,100.98	0.25	1,211,224.42	0.27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,915,677.61	5.54	24,691,938.08	5.52
Jasa Pendidikan	12,326,483.62	2.98	12,288,999.99	2.75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,523,206.38	0.61	806,592.46	0.18
Jasa lainnya	18,241,541.20	4.41	19,217,203.68	4.29
Total	413,640,390	100	458,704,227.53	100.00

Lampiran 53. PDRB Kecamatan Plered

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	46,127,110.24	2.13	42,807,236.11	1.83
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	977,331,683.14	45.13	1,134,170,192.31	48.38
Pengadaan Listrik dan Gas	2,815,269.64	0.13	3,299,469.40	0.14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	119,973,798.46	5.54	129,354,856.59	5.52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	304,049,121.01	14.04	345,089,394.45	14.72
Transportasi dan Pergudangan	123,005,627.30	5.68	132,908,131.34	5.67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76,445,398.66	3.53	78,339,983.53	3.34
Informasi dan Komunikasi	65,400,879.31	3.02	76,649,212.27	3.27
Jasa Keuangan	39,197,215.74	1.81	34,685,465.28	1.48
Real Estate	28,802,374.00	1.33	22,502,809.02	0.96
Jasa Perusahaan	26,636,781.97	1.23	31,218,056.65	1.33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	38,114,419.73	1.76	33,416,438.58	1.43
Jasa Pendidikan	174,763,276.82	8.07	193,567,607.27	8.26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,604,748.00	2.66	56,258,919.06	2.40
Jasa lainnya	84,891,207.58	3.92	88,238,391.73	3.76
Total	2,165,158,912	100	2,402,506,163.60	100.00

Lampiran 54. PDRB Kecamatan Plumbon

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	64,483,080.99	2.21	59,685,158.55	1.90
Pertambangan dan Penggalian	4,960,237.00	0.17	5,654,383.44	0.18
Industri Pengolahan	1,870,009,348.62	64.09	2,093,378,402.96	66.64
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	109,125,213.98	3.74	111,202,874.35	3.54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	160,478,255.85	5.5	170,888,032.89	5.44
Transportasi dan Pergudangan	184,987,662.20	6.34	199,474,082.51	6.35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	118,753,909.33	4.07	122,511,641.23	3.90
Informasi dan Komunikasi	25,384,742.29	0.87	29,214,314.45	0.93
Jasa Keuangan	89,284,265.98	3.06	88,271,208.17	2.81
Real Estate	37,055,888.17	1.27	27,957,784.79	0.89
Jasa Perusahaan	11,962,924.53	0.41	13,507,693.78	0.43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	48,143,476.76	1.65	40,837,213.74	1.30
Jasa Pendidikan	74,695,333.63	2.56	71,622,190.26	2.28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37,639,445.46	1.29	28,586,049.62	0.91
Jasa lainnya	80,822,685.22	2.77	78,533,103.35	2.50
Total	2,917,786,470	100.00	3,141,324,134.09	100.00

Lampiran 55. PDRB Kecamatan Sedong

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	199,857,209.92	26.72	231,875,618.68	28.54
Pertambangan dan Penggalian	10,920,341.56	1.46	12,882,924.26	1.59
Industri Pengolahan	21,092,714.52	2.82	20,983,913.39	2.58
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	221,697,893.04	29.64	257,641,467.19	31.71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	121,918,881.80	16.3	139,930,364.74	17.22
Transportasi dan Pergudangan	37,024,445.70	4.95	39,778,864.53	4.90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,206,541.82	3.37	25,837,069.79	3.18
Informasi dan Komunikasi	2,393,499.52	0.32	2,823,654.63	0.35
Jasa Keuangan	4,338,217.88	0.58	1,218,330.97	0.15
Real Estate	32,985,415.26	4.41	35,013,947.34	4.31
Jasa Perusahaan	4,562,608.46	0.61	5,382,591.64	0.66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,034,168.86	2.01	13,836,537.60	1.70
Jasa Pendidikan	26,104,104.14	3.49	26,895,940.27	3.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,582,123.68	0.88	3,865,507.18	0.48
Jasa lainnya	18,325,230.70	2.45	17,719,062.72	2.18
Total	748,043,397	100	835,685,794.92	100.00

Lampiran 56. PDRB Kecamatan Sumber

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	104,763,342.86	9.35	118,890,271.44	9.72
Pertambangan dan Penggalian	21,176,761.28	1.89	25,218,737.52	2.06
Industri Pengolahan	29,020,006.20	2.59	28,689,919.25	2.35
Pengadaan Listrik dan Gas	11,092,589.24	0.99	13,209,814.89	1.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,577,066.19	0.23	3,068,946.89	0.25
Konstruksi	130,534,004.74	11.65	149,579,740.38	12.23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	228,014,334.46	20.35	265,665,992.45	21.73
Transportasi dan Pergudangan	165,940,653.24	14.81	191,744,402.05	15.68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,275,145.03	4.13	49,238,520.19	4.03
Informasi dan Komunikasi	20,280,390.44	1.81	24,151,277.73	1.98
Jasa Keuangan	135,912,229.83	12.13	155,984,499.11	12.76
Real Estate	18,263,556.03	1.63	15,880,401.78	1.30
Jasa Perusahaan	14,341,933.57	1.28	17,079,356.63	1.40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27,339,310.86	2.44	26,688,432.15	2.18
Jasa Pendidikan	98,264,654.21	8.77	111,151,187.97	9.09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,485,026.04	2.81	31,625,433.67	2.59
Jasa lainnya	35,070,509.43	3.13	35,895,272.83	2.94
Total	1,120,351,514	100	1,263,762,206.94	100.00

Lampiran 57. PDRB Kecamatan Suranenggala

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	394,820,432.17	40.89	460,741,250.72	43.93
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	14,580,064.87	1.51	12,166,320.86	1.16
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,441,609.17	0.46	5,239,829.04	0.50
Konstruksi	115,578,395.04	11.97	131,315,476.94	12.52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	165,594,776.52	17.15	190,320,508.34	18.15
Transportasi dan Pergudangan	94,046,246.25	9.74	105,913,697.01	10.10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,422,108.76	2.84	27,316,261.35	2.60
Informasi dan Komunikasi	4,248,495.72	0.44	5,012,010.39	0.48
Jasa Keuangan	19,021,674.04	1.97	17,406,149.90	1.66
Real Estate	25,490,974.34	2.64	25,038,074.81	2.39
Jasa Perusahaan	2,317,361.30	0.24	2,733,823.85	0.26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	35,339,759.89	3.66	36,656,826.17	3.50
Jasa Pendidikan	37,560,564.47	3.89	39,276,740.69	3.75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,331,569.15	1.07	7,154,310.47	0.68
Jasa lainnya	14,773,178.31	1.53	12,394,139.51	1.18
Total	965,567,210	100	1,078,685,420.05	100.00

Lampiran 58. PDRB Kecamatan Susukan

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	384,021,328.08	34.4	448,322,805.41	36.93
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	24,671,137.65	2.21	23,349,294.85	1.92
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	280,424,876.78	25.12	325,807,919.48	26.84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	93,661,015.77	8.39	104,937,871.90	8.64
Transportasi dan Pergudangan	125,588,370.38	11.25	142,695,692.35	11.75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31,592,452.28	2.83	31,534,556.62	2.60
Informasi dan Komunikasi	9,935,435.52	0.89	11,749,811.26	0.97
Jasa Keuangan	35,053,109.60	3.14	35,627,187.51	2.93
Real Estate	40,188,278.52	3.6	41,700,123.67	3.43
Jasa Perusahaan	2,902,486.78	0.26	3,432,529.13	0.28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	38,402,132.81	3.44	39,587,798.05	3.26
Jasa Pendidikan	24,782,771.75	2.22	23,481,315.20	1.93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,177,531.59	1.27	10,939,381.83	0.90
Jasa lainnya	10,940,142.49	0.98	7,110,791.65	0.59
Total	1,116,341,070	100	1,250,277,078.91	100.00

Lampiran 59. PDRB Kecamatan Susukan Lebak

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	76,031,987.28	11.17	86,445,801.37	11.67
Pertambangan dan Penggalian	14,702,694.05	2.16	17,403,866.30	2.35
Industri Pengolahan	91,687,633.72	13.47	104,977,696.04	14.18
Pengadaan Listrik dan Gas	6,262,258.58	0.92	7,412,757.87	1.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	476,476.20	0.07	564,014.19	0.08
Konstruksi	85,493,443.17	12.56	97,645,511.63	13.19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	98,834,776.66	14.52	113,437,908.83	15.32
Transportasi dan Pergudangan	42,338,313.42	6.22	46,561,941.10	6.29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,963,959.28	1.17	5,872,346.27	0.79
Informasi dan Komunikasi	43,291,265.81	6.36	51,244,717.44	6.92
Jasa Keuangan	101,965,905.94	14.98	117,144,287.76	15.82
Real Estate	15,451,442.36	2.27	14,735,426.33	1.99
Jasa Perusahaan	1,769,768.73	0.26	2,094,909.83	0.28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,813,796.26	4.38	31,736,425.36	4.29
Jasa Pendidikan	38,594,571.88	5.67	42,130,401.07	5.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,618,612.37	1.56	9,014,711.02	1.22
Jasa lainnya	15,315,306.30	2.25	14,574,279.42	1.97
Total	680,612,212	100	762,997,001.82	100.00

Lampiran 60. PDRB Kecamatan Talun

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	169,745,264.77	15.51	193,756,297.26	16.33
Pertambangan dan Penggalian	20,246,856.21	1.85	23,790,054.34	2.01
Industri Pengolahan	129,251,552.35	11.81	146,176,188.59	12.32
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	370,462,747.41	33.85	429,599,322.40	36.21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	103,970,342.70	9.5	116,470,769.39	9.82
Transportasi dan Pergudangan	103,642,015.30	9.47	116,084,984.73	9.79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56,800,639.85	5.19	61,046,372.54	5.15
Informasi dan Komunikasi	8,864,839.75	0.81	10,416,185.95	0.88
Jasa Keuangan	9,849,821.94	0.9	5,879,165.45	0.50
Real Estate	28,017,271.30	2.56	27,225,916.91	2.29
Jasa Perusahaan	3,392,716.45	0.31	3,986,441.54	0.34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	43,558,101.47	3.98	45,486,391.05	3.83
Jasa Pendidikan	23,420,687.72	2.14	21,824,931.60	1.84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,909,893.16	0.54	1,249,749.48	0.11
Jasa lainnya	17,401,352.09	1.59	14,752,212.75	1.24
Total	1,094,534,102	100	1,217,744,983.98	100.00

Lampiran 61. PDRB Kecamatan Tengah Tani

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	36,512,180.40	3.63	37,928,210.18	3.47
Pertambangan dan Penggalian	2,816,366.53	0.28	3,330,576.97	0.30
Industri Pengolahan	124,423,050.00	12.37	141,889,791.27	12.97
Pengadaan Listrik dan Gas	9,454,944.79	0.94	11,181,222.68	1.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	108,631,280.52	10.8	123,214,770.41	11.26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	233,154,915.04	23.18	270,473,852.09	24.73
Transportasi dan Pergudangan	56,126,161.60	5.58	61,123,299.78	5.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,681,690.91	6.53	72,423,471.64	6.62
Informasi dan Komunikasi	4,928,641.43	0.49	5,828,509.70	0.53
Jasa Keuangan	83,485,150.77	8.3	93,477,476.05	8.55
Real Estate	36,109,842.32	3.59	37,452,413.47	3.42
Jasa Perusahaan	41,943,744.42	4.17	49,601,807.00	4.53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,353,143.98	2.62	25,914,343.25	2.37
Jasa Pendidikan	76,745,988.00	7.63	85,507,881.16	7.82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,583,538.97	3.14	32,099,700.48	2.93
Jasa lainnya	67,693,381.29	6.73	74,802,455.19	6.84
Total	1,005,644,021	100	1,126,249,781.29	100.00

Lampiran 62. PDRB Kecamatan Waled

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	198,961,437.76	35.19	229,669,928.84	37.57
Pertambangan dan Penggalian	42,687,094.49	7.55	49,905,157.08	8.16
Industri Pengolahan	41,782,467.32	7.39	45,913,191.49	7.51
Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0	0.00	0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	339,235.19	0.06	396,597.27	0.06
Konstruksi	43,817,878.45	7.75	48,292,775.14	7.90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	46,984,073.54	8.31	51,994,349.71	8.51
Transportasi dan Pergudangan	39,747,056.19	7.03	43,533,607.84	7.12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23,746,463.16	4.2	24,827,436.38	4.06
Informasi dan Komunikasi	5,145,067.02	0.91	6,015,058.67	0.98
Jasa Keuangan	13,286,711.53	2.35	12,599,020.41	2.06
Real Estate	24,820,707.92	4.39	26,083,327.75	4.27
Jasa Perusahaan	1,752,715.14	0.31	2,049,085.92	0.34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,072,008.32	6.38	39,237,137.37	6.42
Jasa Pendidikan	13,795,564.31	2.44	13,193,916.32	2.16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,335,812.68	0.59	965,500.34	0.16
Jasa lainnya	29,117,686.97	5.15	31,106,893.23	5.09
Total	565,391,980	100	625,782,983.77	100.00

Lampiran 63. PDRB Kecamatan Weru

	2018		2019	
Sektor	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**	**PDRB ADHB (Milyar Rp)**	**% terhadap Total PDRB**
Pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	39,168,258.32	1.86	34,884,615.38	1.53
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0	0.00	0.00
Industri Pengolahan	1,014,373,657.78	48.17	1,175,625,004.43	51.62
Pengadaan Listrik dan Gas	2,526,984.41	0.12	2,955,924.13	0.13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0	0.00	0.00
Konstruksi	111,397,895.99	5.29	119,374,780.24	5.24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	302,606,382.86	14.37	343,039,706.44	15.06
Transportasi dan Pergudangan	87,602,126.14	4.16	91,539,827.97	4.02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,071,965.80	3.47	74,543,264.19	3.27
Informasi dan Komunikasi	58,962,969.52	2.8	68,971,563.15	3.03
Jasa Keuangan	35,377,781.71	1.68	30,450,729.18	1.34
Real Estate	27,796,828.49	1.32	21,582,956.78	0.95
Jasa Perusahaan	27,165,082.39	1.29	31,776,184.45	1.40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	34,535,453.58	1.64	29,465,421.14	1.29
Jasa Pendidikan	159,621,181.77	7.58	175,783,665.81	7.72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,856,090.53	2.51	50,895,871.11	2.23
Jasa lainnya	78,757,680.72	3.74	81,194,093.50	3.56
Total	2,105,820,340	100	2,332,083,607.90	100.00

PENERBIT
FKIP UNSWAGATI PRESS
Jl. Perjuangan no. 01 Cirebon
Telp. : (0231) 482115, fax : (0231) 487249
Email : fkipunswagatipress@unswagati.ac.id

ISBN 978-602-71252-8-5